



BUKU AJAR

PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN PADA MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU) DI PERGURUAN TINGGI



**DIREKTORAT KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2018**

Perpustakaan Nasional R.I : Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Buku Ajar Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan Pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Di Perguruan Tinggi Tahun 2017 / Penulis, DR. Indang Dewata, M.Si, Editor, Sofyan Zakaria, Jakarta; Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN, 2017.

195 hlm : 25 x 16 cm

ISBN : 978-602-316-107-2

**BUKU AJAR PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN PADA MATA KULIAH WAJIB UMUM
(MKWU) DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2017**

Diterbitkan oleh : Direktorat Kerjasama Pendidikan
Kependudukan, BKKBN

Penanggung Jawab : Ahmad Taufik

Penulis : DR. Indang Dewata, M.Si

Edito : 1. Sofyan Zakaria
2. Ade Isyanah
3. Yovita Elvy S
4. Miptah Abdurrojak Romli

Desain sampul : Muhammad Firmansyah

Cetakan Pertama Tahun 2018

Modul dapat diperbanyak oleh pihak lain dengan seizing penerbit, Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan – BKKBN, Telp. 021-8009029 / 8009045 ext. 711, email : ditpenduk@bkkbn.go.id atau ditpenduk711@gmail.com

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan buku bahan ajar Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) pendidikan kependudukan di perguruan tinggi dapat diselesaikan dengan baik.

Pendidikan kependudukan merupakan upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan kependudukan yaitu kelahiran, kematian, perpindahan serta kualitas penduduk dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan lingkungan hidup sehingga mampu meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku yang berwawasan kependudukan.

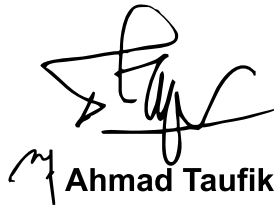
Tersusunnya buku bahan ajar MKWU pendidikan kependudukan ini ditujukan sebagai sumber referensi dan pegangan bagi para dosen dan mahasiswa dalam memahami dan mempelajari ilmu kependudukan.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada tim penulis dan pihak-pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan kependudukan Indonesia di masa yang akan datang.

Jakarta, 22 Desember 2017

Direktur Kerjasama

Pendidikan Kependudukan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Taufik', with a stylized flourish at the end.

KATA SAMBUTAN



Sesuai Peraturan Kepala BKKBN nomor 72/PER/B5/2011 tentang organisasi dan tata kerja BKKBN, dan salah satunya dibentuk Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan yang bernaung dibawah Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk. Salah satu tugas dari Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku anak didik, keluarga dan masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

Isu kependudukan merupakan hal yang perlu menjadi perhatian masyarakat luas. Saat ini Indonesia menghadapi sedikitnya delapan permasalahan kependudukan. **Pertama**, jumlah penduduk Indonesia sangat besar. Masalah **kedua** yang dihadapi oleh Indonesia adalah jumlah dan proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sampai dengan tahun 2030 sangat besar dan merupakan potensi pembangunan hanya jika dikelola dengan baik. **Ketiga**, meningkatnya penduduk lanjut usia (>64 tahun) setelah tahun 2030. Peningkatan proporsi dan jumlah penduduk lansia pasca periode peluang demografi merupakan suatu keniscayaan. Kondisi ini sebenarnya bisa diantisipasi. **Keempat**, penduduk yang tinggal di perkotaan akan semakin meningkat utamanya karena migrasi dari desa. **Kelima**,

ketidakseimbangan persebaran penduduk & ekonomi. Persebaran penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa (59%), sedangkan di pulau lainnya lebih rendah yaitu Sumatera (21%), Sulawesi (8%), Kalimantan (6%), dan Kepulauan di Timur (6%). **Keenam**, kualitas penduduk yang masih rendah (pada aspek kesehatan dan pendidikan). **Ketujuh**, masalah kemiskinan. **Kedelapan**, cakupan dan kualitas data kependudukan untuk perencanaan pembangunan belum baik dan akurat. Ketepatan data penduduk sangat diperlukan agar kebijakan dan program pembangunan tepat sasaran. Sayangnya, cakupan dan kualitas data dan informasi kependudukan di Indonesia masih memprihatinkan. Selain itu, data yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal.

Penduduk adalah pusat pembangunan yang merupakan pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan. Prasyarat dalam *People Center Development* adalah penduduk yang berkualitas. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan Negara yang makmur. Melalui *SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional.*

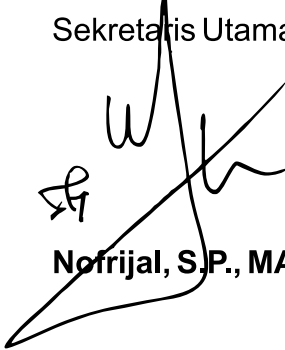
Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, maka perlu dilakukan literasi kependudukan kepada masyarakat melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan kependudukan melalui jalur formal dilakukan pada sekolah tingkat dasar, menengah dan tinggi serta perguruan tinggi. Khusus pada Perguruan Tinggi, pada tahun 2017 Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan menerbitkan buku bahan ajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam mempelajari ilmu kependudukan.

Pendidikan kependudukan bukan hanya sekedar ilmu, namun masalah kependudukan adalah masalah sikap dan perilaku yang berawal dari individu, generasi muda, keluarga dan masyarakat. Keberhasilan pendidikan kependudukan pada jalur formal akan sangat berdampak pada meningkatnya pengetahuan, pemahaman serta kesadaran para mahasiswa tentang kondisi kependudukan serta diharapkan tumbuh sikap dan perilaku yang rasional dan bertanggungjawab terhadap masalah kependudukan.

Semoga dengan diterbitkannya buku pendidikan kependudukan ini dapat membuka wawasan mahasiswa tentang masalah kependudukan, dan diharapkan mahasiswa lebih peduli terhadap masalah kependudukan yang terjadi saat ini dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 22 Desember 2017

Sekretaris Utama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nofrijal', written over the printed name.

Nofrijal, S.P., MA.

SAMBUTAN

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, *Buku Ajar Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan pada mata kuliah wajib umum (MKWU) di Perguruan Tinggi* dapat tersusun. Buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan dan pedoman sebagai sumber informasi bagi dosen dan mahasiswa dalam memahami Pendidikan Kependudukan.

Salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa di Indonesia adalah wawasan dan kecakapan berkenaan dengan Pendidikan Kependudukan. Dalam usaha Peningkatan kualitas wawasan mengenai Pendidikan Kependudukan maka di susunlah buku ajar yang seiring dengan konteks kependudukan di era global.

Melalui Buku Ajar ini diharapkan dapat membentuk warga negara yang memiliki wawasan, sikap, dan perilaku yang mengerti akan masalah kependudukan dalam hal penduduk dan pembangunan, karena peningkatan populasi penduduk memicu kerusakan lingkungan.

Besarnya jumlah remaja dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi guna menekan laju pertumbuhan penduduk, karena remajalah yang akan menjadi cikal bakal penerus bangsa. Memalalui pengintegrasian pendidikan kependudukan pada mata kuliah wajib umum (MKWU) di perguruan tinggi mahasiswa

mendapat pemahaman mengenai materi kependudukan. Maka desain pembelajaran buku ajar ini difokuskan kepada pemahaman terhadap standar isi bahan ajar untuk menghadapi tantangan Indonesia dalam usaha memaksimalkan potensi generasi muda.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Buku Ajar ini. Semoga Buku Ajar ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen dalam memahami pendidikan kependudukan dan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan mata kuliah wajib umum (MKWU) di Perguruan Tinggi.

Padang, 03 Juli 2017

Kepala Pusat Penelitian

Kependudukan Dan Lingkungan

Hidup Universitas Negeri Padang



Dr. Indang Dewata, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
SAMBUTAN	iii
SAMBUTAN PENULIS	vii
DAFTAR ISI	ix
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	3
B. Deskripsi.....	7
C. Tujuan.....	8
D. Sasaran	8
E. Materi Dasar	8
F. Metode Pembelajaran.....	8
MATERI 1	
KONSEP DASAR KEPENDUDUKAN	9
A. Pendahuluan	11
B. Kelahiran	13
C. Kematian	21
D. Migrasi	25
E. Umur Harapan Hidup	30
F. Data Kependudukan	30
G. Perkembangan dan Dampak Kependudukan.....	34
H. Rangkuman	38
MATERI 2	
MASALAH KEPENDUDUKAN	41
A. Pendahuluan	43
B. Dinamika Kependudukan.....	47

C. Penduduk Remaja 55

D. Bonus Demografi 61

E. Penduduk Lanjut Usia 77

F. Lingkungan Ramah Penduduk 85

G. Rangkuman 107

MATERI 3

KARAKTER PENDUDUK BERKEBANGSAAN 113

A. Pendahuluan 115

B. Revolusi Mental 126

C. Pancasila sebagai Dasar Revolusi Mental..... 134

D. Pengutamaan Revolusi Mental 139

E. Warga Negara dan Bela Negara..... 142

F. Rangkuman 152

PENDALAMAN MATERI 159

A. Materi 1 Konsep Dasar Kependudukan 161

B. Materi 2 Masalah Kependudukan 168

C. Materi 3 Karakter Penduduk Berkebangsaan 175

DAFTAR PUSTAKA..... 182

RENCANA PEMBELAJARAN..... 187

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Kependudukan telah menjadi isu dunia ditandai dengan adanya Deklarasi Kependudukan PBB tahun 1967 yang menyatakan bahwa pemecahan masalah kependudukan harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan komprehensif dalam jangka panjang dengan mengikutsertakan bidang dan sektor pembangunan terkait termasuk pendidikan. Tahun 1970 menjadi “Tahun Pendidikan Internasional” yang ditetapkan oleh PBB, pada tahun yang sama telah diselenggarakan seminar dengan tajuk “Pendidikan Kependudukan” (Population Education) se-Asia Pasifik di Bangkok Thailand yang disponsori oleh UNESCO. Dari hal ini terlihat bahwa masalah kependudukan telah menjadi perhatian dunia.



Sumber : Iwan Hermawan Geografi Sebuah Pengantar.

Indonesia sendiri sebagai negara berkembang tidak terlepas dari masalah kependudukan. Jumlah penduduk Indonesia berada di urutan ke empat terbesar di dunia setelah berturut-turut China, India, Amerika Serikat dan keempat adalah Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia dari hasil Sensus 2010 mencapai angka 237.641.326 (www.bps.go.id). Bukan tidak mungkin jika masalah kependudukan ini tidak cepat diatasi, jumlah penduduk Indonesia di masa yang akan datang bisa mencapai 2 miliar jiwa.

Pertambahan laju penduduk yang tidak terkendali, penyebaran penduduk yang tidak merata bahkan rendahnya kualitas penduduk, merupakan masalah kependudukan yang ada di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk akan membuat pemerintah kesulitan untuk mensejahterakan rakyat karena anggaran untuk membantu masyarakat menengah kebawah juga ikut meningkat. Jumlah lowongan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jumlah pengangguran tentu akan semakin memperburuk keadaan ekonomi di Indonesia bahkan hal ini juga akan mendorong tingginya tingkat kriminalitas, kemiskinan dan lingkungan kumuh.

Karakter dari suatu bangsa sangat ditentukan oleh pendidikan yang ada pada bangsa tersebut. Sebuah bangsa tidak akan maju tanpa adanya pendidikan yang mendasarinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yaitu dengan pendidikan kependudukan.

Pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Sedangkan

kependudukan adalah hal-hal yang berhubungan dengan struktur, jumlah, jenis kelamin, umur, perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian dan lain-lain hingga ketahanan yang berhubungan dengan ekonomi, soisal, budaya serta politik. Kata dasar kependudukan yaitu penduduk yang berarti warga negara dan orang asing yang tinggal di negara tersebut.

Dengan demikian pendidikan kependudukan bertujuan untuk merubah sikap serta perilaku, reproduksi dan penyebaran penduduk secara rasional dan bertanggungjawab. Dimana diharapkan masyarakat/remaja dapat mengetahui faktor yang menyebabkan tingginya angka pertumbuhan penduduk, akibat yang ditimbulkan serta dapat menghubungkan antara pertumbuhan penduduk dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan kependudukan bagi remaja sangat diperlukan, karena 25% atau sekitar 63.233.703 jiwa (enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga jiwa) dari total jumlah penduduk Indonesia yaitu 255.182.144 jiwa (dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh empat jiwa) yang berumur 16-30 tahun adalah Pemuda (menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009). Besarnya jumlah penduduk usia muda di Indonesia merupakan potensi besar bagi keberlangsungan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita bangsa, Maka peranan Pendidikan Kependudukan diperlukan agar para pemuda ini tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta sikap dan perilaku berwawasan kependudukan.

Dunia pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran yang meliputi guru, siswa, dan lingkungan pembelajaran yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam rangka tercapainya tujuan pembelajaran. Buku ajar merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Buku ajar yang sesuai dapat menarik minat, menstimulasi, dan memotivasi para pembacanya untuk lebih aktif dan giat dalam mempelajari suatu materi.

Buku ajar merupakan karya tulis dalam bentuk buku pada bidang tertentu, yang merupakan buku standar yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk maksud dan tujuan instruksional, yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh pemakainya sehingga dapat menunjang proses pembelajaran.

Pembelajaran mengenai Pendidikan Kependudukan bagi remaja dilakukan dengan Pembuatan ***Buku Ajar Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan pada mata kuliah wajib umum (MKWU) di Perguruan Tinggi.*** Pendekatan terpadu (Integratif) yang digunakan pada buku ajar didasarkan pada pemikiran bahwa program suatu mata pelajaran harus terpadu dengan mata pelajaran lain. Selain itu, dengan pendekatan terpadu mahasiswa tidak akan terbebani dengan penambahan bidang studi Pendidikan Kependudukan sehingga pendidikan kependudukan menjadi tanggung jawab semua bidang studi.

Hal inilah yang melatarbelakangi pembuatan Buku Ajar Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan pada mata kuliah wajib umum (MKWU) di Perguruan Tinggi.

B. Deskripsi

Dalam usaha Peningkatan kualitas wawasan mengenai Pendidikan Kependudukan maka di susunlah buku ajar yang seiring dengan konteks kependudukan di era global. Melalui Buku Ajar ini diharapkan dapat membentuk warga negara yang memiliki wawasan, sikap, dan perilaku yang mengerti akan masalah kependudukan dalam hal penduduk dan pembangunan, karena peningkatan populasi penduduk memicu kerusakan lingkungan, seperti semakin banyaknya jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat yang menyebabkan banyaknya lahan yang dijadikan pemukiman penduduk. Dimana penebangan hutan untuk memenuhi area pemukiman dan pertanian yang tidak terkendali dapat menyebabkan banjir, erosi bahkan terganggunya habitat tumbuhan dan hewan yang ada disana.

Selain memberikan materi substansial, secara praktis buku ajar ini diorientasikan untuk memberikan wawasan dan kecakapan bagi Mahasiswa dalam materi Kependudukan, karena isu kependudukan menjadi salah satu hal penting yang perlu melibatkan dukungan mahasiswa. Melalui pengintegrasian pendidikan kependudukan pada mata kuliah wajib umum (MKWU) di perguruan tinggi mahasiswa mendapat pemahaman mengenai materi kependudukan. Maka desain pembelajaran buku ajar ini difokuskan kepada pemahaman terhadap standar isi bahan ajar untuk menghadapi tantangan Indonesia dalam usaha memaksimalkan potensi generasi muda.

C. Tujuan

Agar Mahasiswa memiliki wawasan mengenai kependudukan dan dapat mengetahui faktor yang menyebabkan tingginya angka pertumbuhan penduduk, akibat yang ditimbulkan serta dapat menghubungkan antara pertumbuhan penduduk dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

D. Sasaran

Setelah membaca dan mempelajari buku ajar ini, mahasiswa memiliki wawasan mengenai kependudukan dan dapat mengetahui faktor yang menyebabkan tingginya angka pertumbuhan penduduk, akibat yang ditimbulkan serta dapat menghubungkan antara pertumbuhan penduduk dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

E. Materi Dasar

Adapun materi dasar pada Buku Ajar Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan pada mata kuliah wajib umum (MKWU) di Perguruan Tinggi yaitu, Konsep Dasar Kependudukan, Masalah Kependudukan, Karakter Penduduk Berkebangsaan, Masyarakat Ekonomi Asean, dan Isu Disabilitas.

F. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan yaitu : ceramah, tanya jawab, diskusi, active debate, penugasan, kerja kelompok, dan unjuk kerja.

MATERI 1

KONSEP DASAR

KEPENDUDUKAN

A. Pendahuluan

Jumlah penduduk dunia yang menempati planet bumi dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk yang menemndiami planet bumi menyebabkan semakin berkurangnya daya dukung planet bumi. Jumlah penduduk yang semakin banyak akan mendorong peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Tabel 2.1. Distribusi dan Jumlah Penduduk Dunia
Sumber : BPS 2015

No	Benua dan Wilayah	Jumlah Penduduk	%
1	Asia	4,384,844,097	59.86%
2	Afrika	1,166,239,306	15.92%
3	Eropa	743,122,816	10.15%
4	Amerika Selatan dan Karibia	630,088,917	8.60%
5	Amerika Utara	361,127,819	4.93%
6	Australia dan Oseania	39,359,270	0.54%
	Total	7,324,782,225	100.00%

Jumlah penduduk dunia pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 7,3 milyar jiwa. Berdasarkan hasil laporan dari Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang prospek penduduk dunia yang memperkirakan jumlah penduduk dunia dengan metode medium fertility mengingat adalah tidak mungkin menghitung penduduk dunia secara tepat dalam suatu periode tertentu. Benua Asia menjadi benua dengan penduduk terbanyak, sedangkan benua Australia dan Oseania menjadi benua dengan penduduk tersedikit.

Pertumbuhan jumlah penduduk dunia berlansung cepat dari waktu ke waktu. Pada periode sebelum perang dunia ke dua untuk mencapai jumlah penduduk 1 milyar membutuhkan waktu sekitar 125 tahun, namun kemudian sesudah periode perang dunia ke dua untuk mencapai jumlah penduduk 1 milyar membutuhkan waktu semakin pendek yakni sekitar 12-13 tahun. Untuk masa yang akan datang sesudah tahun 2025 hanya membutuhkan waktu 1 sampai 1,5 tahun untuk mencapai jumlah penduduk 1 milyar. Gambar 2.1. merupakan grafik pertumbuhan penduduk dunia

Peningkatan jumlah penduduk pada suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari faktor lingkungan meliputi norma dan nilai, budaya, dan pendidikan. Rendahnya pengetahuan tentang pemahaman akan nilai dan budaya menyebabkan dibanyak tempat terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Misalnya masih adanya anggapan dimasyarakat lokal tentang banyak anak banyak rezeki menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan angka jumlah penduduk.

Adapun persebaran penduduk dunia berdasarkan benua dan wilayah adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Grafik Penduduk Dunia

Penduduk pada suatu negara dapat diketahui melalui sensus yang dilakukan setiap 10 tahun. Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara ditentukan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi.

B. Kelahiran

Kelahiran (Fertilitas) sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Natalitas mempunyai arti yang sama dengan fertilitas hanya berbeda ruang lingkupnya. Fertilitas menyangkut peranan kelahiran pada perubahan penduduk sedangkan natalitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi manusia.

Mantra (2000) menjelaskan bahwa istilah fertilitas sama dengan kelahiran hidup (*live birth*), artinya bahwa fertilitas merupakan jumlah bayi yang lahir dari seorang perempuan dengan tanda-tanda kehidupan; misalnya bernafas, jantung berdenyut, berteriak dan sebagainya. Apabila tidak terdapat tanda kehidupan maka dalam demografi tidak dianggap peristiwa kelahiran. Kelahiran bayi hidup dalam demografi sangat terkait dengan fekunditas (*fecundity*). Fekunditas merupakan sebagai indikator kemampuan fisiologis dan biologis seorang perempuan untuk menghasilkan anak lahir hidup.

Dalam demografi terdapat ukuran-ukuran fertilitas tahunan, meliputi; 1) Tingkat Fertilitas Kasar (*Crude Birth Rate*); 2) Tingkat Fertilitas Umum (*General Fertility Rate*); 3) Tingkat Fertilitas Menurut Umur (*Age Specific Fertility Rate*); dan 4) Tingkat Fertilitas Menurut Ukuran Kelahiran (*Birth Order specific Rate*).

Tingkat fertilitas kasar (*Crude Birth Rate/CBR*) dapat didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun. Untuk menentukan tingkat fertilitas kasar dapat menggunakan persamaan 2.1.

$$CBR = \frac{B}{P_m} \times k \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana :

CBR = tingkat fertilitas kasar

P_m = penduduk pertengahan tahun

B = jumlah kelahiran pada tahun tentu

k = bilangan konstan dengan nilai 1000

Contoh

Jumlah penduduk pada suatu wilayah sebanyak 500.000 jiwa, sedangkan jumlah kelahiran sebesar 5.000 bayi. Tentukanlah tingkat fertilitas kasar pada wilayah tersebut.

$$CBR = \frac{5.000}{500.000} \times 1.000$$

Hasil perhitungan CBR pada wilayah tersebut sebesar 10, artinya sertiap 1000 penduduk pada wilayah tersebut terdapat 10 kelahiran bayi.

Berdasarkan data World Population (1982) pada tahun 1980 tingkat fertilitas kasar (CBR) di dunia berkisar antara 10 hingga 53 kelahiran tiap 1000 penduduk. Tingkat fertilitas kasar tertinggi terdapat pada negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin, sedangkan yang terendah terdapat pada negara-negara Eropa. Artinya tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap jumlah kelahiran. Tingkat fertilitas kasar (CBR) Indonesia periode 1960-1980 pernah mencapai angka sekitar 43,8 sebagai bukti keberhasilan program Keluarga Berencana (KB), namun angka tersebut kembali naik seiring dengan program tersebut tidak lagi gencar ditengah masyarakat.

Tingkat fertilitas kasar (CBR) yang telah dibahas sebagai ukuran fertilitas masih terlalu kasar karena membandingkan jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Padahal penduduk yang mempunyai risiko hamil adalah perempuan dalam usia reproduktif (umur 15-49 tahun). Dengan alasan tersebut ukuran fertilitas ini perlu diadakan perubahan yang membandingkan jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk perempuan usia 15-49 tahun.

Tingkat fertilitas penduduk yang dihasilkan dari perhitungan ini disebut Tingkat Fertilitas Umum (*General Fertility Rate* atau GFR). Pesamaan yang digunakan untuk menentukan GFR dapat disajikan sebagai berikut.

$$GFR = \frac{B}{Pf(15-49)} \times k \dots\dots\dots (2.2)$$

- Dimana
- GFR = tingkat fertilitas umum
 - B = jumlah kelahiran
 - Pf(15-49) = jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan tahun

Diantara kelompok perempuan usia reproduktif (15-49 tahun) terdapat variasi kemampuan melahirkan. Artinya semakin tua usia perempuan maka tingkat kesuburannya semakin menurun. Jumlah kelahiran bayi pada tiap-tiap jumlah kelompok umur perempuan disebut dengan Tingkat Fertilitas Menurut Umur (*Age Specific Fertility Rate = ASFR*). Untuk menentukan ASFR digunakan persamaan 2.3.

$$ASFR_i = \frac{B_i}{P_{fi}} \times k \dots\dots\dots (2.3)$$

- Dimana
- ASFR_i = jumlah kelahiran bayi pada kelompok umur i
 - P_{fi} = jumlah perempuan kelompok umur i pada perengahan tahun
 - K = angka konstanta 1000

Contoh

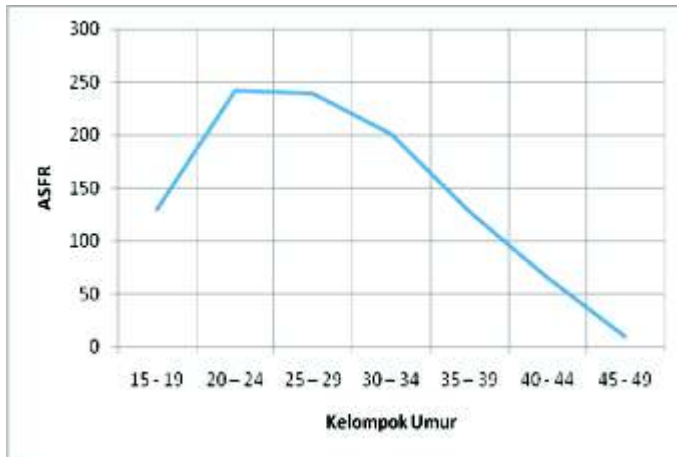
Perhitungan tingkat fertilitas menurut umur pada suatu wilayah, disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Perhitungan tingkat fertilitas menurut umur (ASFR)

Kelompok Umur	Jumlah Perempuan	Jumlah Kelahiran	ASFR
1	2	3	$4 = \frac{3}{2} \times 1000$
15 – 19	1.170.505	151.697	129,6
20 – 24	859.154	208.001	242,1
25 – 29	777.519	186.138	239,4
30 – 34	842.807	169.910	201,6
35 – 39	810.804	103.621	127,8
40 – 44	683.817	44.927	65,7
45 – 49	504.942	4.999	9,9
Jumlah ASFR			1.016,1

Hasil perhitungan tingkat fertilitas menurut umur (ASFR) pada contoh dalam Tabel 2.2 menunjukkan bahwa jumlah kelahiran pada usia subur sangat tinggi. Semakin tua usia perempuan maka tingkat kesuburannya akan berkurang.

Hasil perhitungan ASFR disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.2. Grafik ASFR

Tingkat fertilitas total atau total fertility rates (TFR) merupakan jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1.000 perempuan yang hidup hingga akhir masa reproduksinya dengan catatan:

1. Tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum meakhiri masa reproduksinya;
2. Tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu tertentu.

$$TFR = 5 \times ASFR_i \dots\dots\dots (2.4)$$

Dimana

TFR = Total Fertility Rate

$\square$ = penjumlahan dan tingkat fertilitas menurut umur

$ASFR_i$ = tingkat fertilitas menurut umur ke i dari kelompok berjenjang 5 tahunan

Contoh

Bila jumlah tingkat fertilitas menurut umur (ASFR) sebesar 1.016,1 maka besaran Total Ferlility Rate (TFR) adalah:

$$\begin{aligned} \text{TFR} &= 5 \times \text{ASFR}_i \\ &= 5 \times 1.016,1 \\ &= 5.080,5 \end{aligned}$$

Artinya setiap 1000 perempuan setelah melewati masa subur akan melahirkan 5.080,5 bayi laki-laki dan perempuan pada periode tertentu.

TFR menggambarkan riwayat fertilitas dari sejumlah perempuan hipotesis selama reproduksinya. Hal ini sesuai dengan riwayat kematian dari tabel kematian penampang lintang (Crps Sectional Life Table).

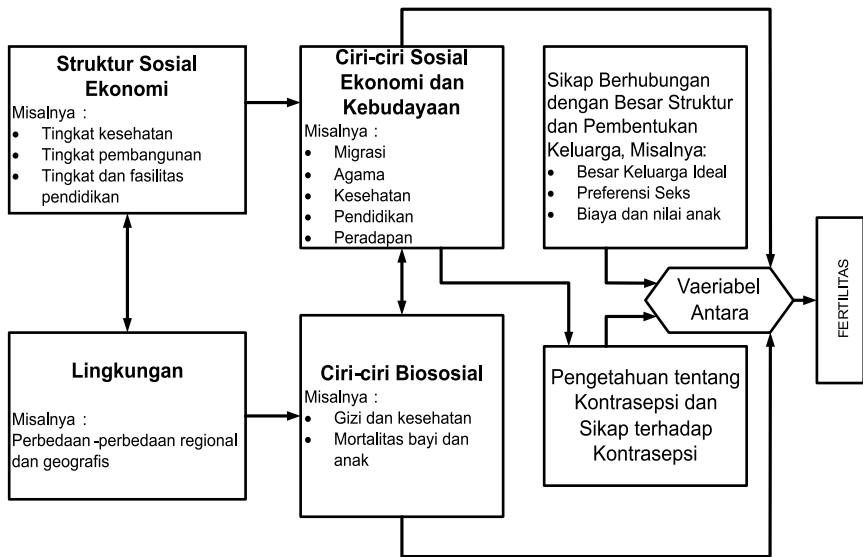
Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor demografi dan faktor non demografi. Faktor demografi di antaranya adalah: struktur umur, struktur perkawinan, umur kawin pertama, paritas, dan proporsi yang kawin. Sedangkan faktor non demografi antara lain, keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status perempuan, dan urbanisasi dan industrialisasi. Variabel-variabel di atas dapat mempengaruhi secara langsung terhadap fertilitas, ada juga berpengaruh secara tidak langsung.

Dr. Davis dan Dr. Blake (1956) dan Mantra (2000) menyatakan bahwa terdapat tiga faktor sosial mempengaruhi fertilitas. Tiga faktor sosial yang mempengaruhi fertilitas

tersebut antara lain: hubungan kelamin, konsepsi, dan kehamilan atau kelahiran. Ketiga faktor tersebut dapat diuraikan lebih rinci menjadi 11 variabel yaitu:

- a. Umur memulai hubungan kelamin
- b. Selibat permanen, yaitu proporsi wanita yang tidak pernah mengadakan hubungan kelamin
- c. Lamanya masa reproduksi yang hilang karena faktor perceraian, perpisahan, dan atau ditinggal mati (meninggal)
- d. Abstinensi sukarela
- e. Abstinensi karena terpaksa (impotensi dan sakit kelamin)
- f. Frekuensi hubungan seks
- g. Kesuburan dan kemandulan biologis
- h. Menggunakan atau tidak menggunakan alat kontrasepsi
- i. Kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor disengaja, misalnya sterilisasi
- j. Kematian janin karena faktor-faktor yang tidak disengaja
- k. Kematian janin karena faktor-faktor yang disengaja.

Kesebelas faktor-faktor itu masing-masing dapat mempunyai akibat negatif dan positif terhadap fertilitas. Akibat dari variabel-variabel di atas terhadap masyarakat satu dengan yang lain berbeda-beda. Freedman (1975) mengembangkan model keterkaitan faktor lingkungan dan struktur sosial ekonomi terhadap fertilitas. Gambar 2.3 disajikan kerangka model faktor fertilitas oleh Freedman (1975).



Gambar 2.3. Kerangka dasar untuk analisis fertilitas

C. Kematian

Kematian (Mortalitas) merupakan salah satu komponen demografi yang akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Tinggi atau rendahnya mortalitas tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, namun juga menjadi baramoter tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Mortalitas atau kematian dapat didefinisikan suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Dengan kata lain, bahwa yang dikatakan kematian apabila telah terjadi kelahiran hidup.

Peristiwa kematian pada bayi dapat terjadi dalam rahim (*intra uterin*) dan di luar rahim (*extra uterim*). Pada masa janin dikadung seorang perempuan, terdapat peristiwa-peristiwa kematian janin sebagai berikut:

- a) Abortus, kematian janin menjelang dan sampai 16 minggu;
- b) Immatur, kematian janin antara umur kandungan diatas 16 minggu sampai pada umur kandungan 28 minggu; dan
- c) Pematurn, kematian bayi dalam kandungan pada umur di atas 28 minggu sampai waktu lahir.

Selanjutnya kematian bayi di luar rahim (*extra uterin*), dibedakan atas:

- a) Lahir mati (*still birth*), kematian bayi yang cukup masanya pada waktu keluar dari rahim, tidak ada tanda-tanda kehidupan;
- b) Kematian baru lahir (*neo natal death*), merupakan kematian bayi sebelum berumur satu bulan tetapi kurang dari satu tahun;
- c) Kematian lepas baru lahir (*post neo natal death*), merupakan kematian bayi setelah berumur satu bulan, tetapi kurang dari satu tahun;
- d) Kematian bayi (*infant mortality*), kematian bayi setelah bayi lahir hidup hingga berumur kurang dari satu tahun.

Dalam demografi terdapat beberapa pengukuran data kematian penduduk, yaitu: a) tingkat kematian kasar (*Crude Death Rate* atau *CDR*), b) tingkat kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate*, atau *ASDR*), dan c) kematian bayi (*Infant Mortality Rate* atau *IMR*). Tingkat kematian kasar (*CDR*) adalah jumlah kematian pada tahun tertentu dalam per

1000 penduduk pada pertengahan tahun. Untuk menentukan CDR digunakan persamaan 2.4 disajikan berikut.

$$CDR = \frac{D}{P_m} \times k \dots\dots\dots (2.4)$$

Dimana :

D = jumlah kematian pada tahun tertentu

P_m = jumlah penduduk pada pertengahan tahun

K = bilangan konstan yang biasanya bernilai 1000

Contoh

Jika suatu wilayah memiliki jumlah penduduk sebanyak 500.000 jiwa, dan jumlah kematian sebanyak 20.000 jiwa. Maka tingkat kematian kasarnya adalah

$$\begin{aligned} CDR &= \frac{D}{P_m} \times k \\ &= \frac{20.000}{500.000} \times 1000 \\ &= 40 \end{aligned}$$

Artinya setiap 1000 penduduk terdapat 40 orang kematian pada periode waktu tertentu.

CDR merupakan ukuran mortalitas yang sangat kasar dalam demografi. Kematian seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan status perkawinan. Secara umum orang yang berusia lebih dari 70 tahun lebih berisiko kematian lebih tinggi dibandingkan usia 20 tahun, atau sorang pembalap mobil lebih berisiko kematian dibandingkan sopir angkot. Untuk itu maka dalam demografi digunakan ukuran tingkat kematian

menurut kelompok umur (ASDR). ASDR merupakan tingkat kematian berdasarkan kelompok umur tiap 1000 penduduk dalam pertengahan tahun. Untuk penentuan ASDR digunakan persamaan 2.5.

$$ASDR_i = \frac{D_i}{P_{mi}} \times 1000 \dots\dots\dots (2.5)$$

Dimana:

- D_i = jumlah kematian pada kelompok umur i
- P_{mi} = jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada kelompok umur i

Selanjutnya tingkat kematian bayi (*Infant Mortality Rate atau IMR*) merupakan jumlah kematian bayi setiap 1000 kelahiran hidup pada pertengahan tahun. Untuk menentukan IMR digunakan persamaan 2.5 berikut.

$$IMR = \frac{D_o}{B} \times 1000 \dots\dots\dots (2.5)$$

Dimana :

- D_o = jumlah kematian bayi pada tahun tertentu
- B = jumlah bayi lahir pada tahun tertentu

Contoh

Di suatu wilayah pada tahun 2016 jumlah kematian bayi sebesar 263.000 jiwa dan jumlah kelahiran pada tahun tersebut sebesar 1.594.000. Maka besar tingkat kematian kasar (IMR) dapat ditentukan sebesar:

$$\begin{aligned}\text{IMR} &= \times 1000 \\ &= 164,99\end{aligned}$$

Ini berarti, pada tahun 2016 di daerah yang bersangkutan terdapat 164,99 bayi meninggal tiap 1000 kelahiran.

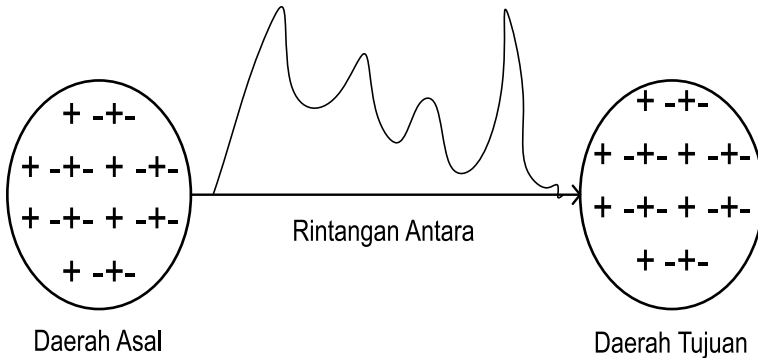
D. Migrasi



Gambar 2.4 Peristiwa Migrasi
(Sumber : Google)

Migrasi penduduk merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat atau keadaan menuju tempat atau keadaan lain. Migrasi penduduk dapat juga diistilahkan dengan mobilitas penduduk. Migrasi penduduk berdasarkan sifatnya dapat dibedakan atas dua yaitu migrasi vertikal dan migrasi horizontal. Migrasi vertikal merupakan perpindahan penduduk yang disebabkan terjadinya perubahan status sosial, misalnya seseorang yang bekerja di sektor pertanian berubah statusnya menjadi sektor perdagangan.

Selain itu, migrasi horizontal merupakan perpindahan atau pergerakan penduduk yang melintasi batas wilayah menuju wilayah lain dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah merupakan dasar dan menjadi indikator dalam penentuan migrasi horizontal.



Gambar 2.5. Faktor migrasi penduduk

Everett S. Lee (1976) dalam Mantra (1999) menjelaskan besar kecilnya arus migrasi dipengaruhi oleh rintangan. Rintangan antara dalam arus migrasi dapat dibedakan beberapa bentuk, misalnya biaya pindah, topografi, dan aksesibilitas. Artinya semakin kecil rintangan antara daerah asal dengan daerah tujuan maka arus migrasi terjadi lebih tinggi. Selain itu, migrasi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

- Faktor individu
- Faktor-faktor daerah asal
- Faktor-faktor daerah tujuan, dan
- Faktor rintangan antara daerah asal dengan daerah tujuan.

Seseorang melakukan migrasi karena adanya faktor pendorong pada daerah asal dan besarnya faktor penarik pada daerah tujuan. Beberapa faktor pendorong seseorang untuk melakukan migrasi antara lain:

- a. Semakin berkurangnya sumberdaya alam
- b. Menyempitnya lapangan kerja
- c. Adanya tekanan diskriminatif politis, agama, dan ras
- d. Ketidakcocokan budaya
- e. Perkawinan, dan
- f. Bencana alam.

Sedangkan faktor penarik antara lain adalah:

- a. Adanya perasaan superior atau peningkatan status sosial atau kebanggaan,
- b. Kesempatan mendapatkan pekerjaan lebih baik,
- c. Kesempatan mendapatkan pendidikan,
- d. Keadaan lingkungan yang lebih menyenangkan, seperti iklim, perumahan, sekolah, dan lain-lainnya,
- e. Adanya tarikan orang yang berfungsi sebagai pelindung, dan
- f. Adanya aktivitas hiburan, kebudayaan yang menarik.

Terdapatnya perbedaan antar wilayah dari segi ekonomi dan kesempatan kerja menjadi faktor pendorong terjadinya migrasi penduduk. Semakin tinggi perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain, maka migrasi yang terjadi semakin tinggi. Misalnya perbedaan antara desa dengan kota, yang berbeda dari segi ekonomi dan kesempatan kerja. Di kawasan perdesaan sektor ekonomi masyarakat sebagian

besar adalah pertanian dan upah tenaga kerja sangat rendah, berbanding terbalik dengan wilayah perkotaan. Sebagai akibatnya terjadi migrasi masyarakat desa menuju wilayah perkotaan yang diistilahkan urbanisasi.



Gambar 2.6 Ilustrasi Peristiwa Urbanisasi
(Sumber : Google)

Contoh Urbanisasi :

penduduk yang berasal dari desapergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan.

Urbanisasi merupakan masalah yang dihadapi banyak kota besar di dunia dan Indonsia khususnya. Tingginya angka urbanisasi menimbulkan banyak persoalan, diantaranya peningkatan kepadatan penduduk, permukiman kumuh, lapangan pekerjaan, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya. Ketidak merataan pembangunan dan persoalan ekonomi dianggap sebagai faktor penyebab permasalahan urbanisasi. Selain itu, adanya budaya merantau bagi masyarakat suku minang juga sebagai faktor penyebab terjadinya urbanisasi.

Urbanisasi telah menyebabkan masalah ketidakmerataan persebaran penduduk. Pulau Jawa dengan luas 6,9 persen dari total luas daratan Indonesia, telah ditempati sekitar 60 persen total penduduk Indonesia. Dampak dari peningkatan jumlah penduduk pada wilayah perkotaan menimbulkan peningkatan persaingan lapangan pekerjaan, upah dibayar semakin murah, peningkatan pengangguran di daerah perkotaan, ketersediaan lahan, dan persoalan sosial. Sedangkan pada wilayah luar pulau Jawa sendiri sumberdaya alam belum dimanfaatkan secara optimal.

Urbanisasi di banyak wilayah kota-kota besar telah menjadi masalah perkotaan. Pada tahun 1950 di bawah Kementerian Sosial dibentuk program transmigrasi. Transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan penduduk. Sasaran lebih jauh dari program transmigrasi yakni peningkatan ekonomi penduduk dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal.

Transmigrasi telah memindahkan penduduk dari pulau Jawa menuju luar pulau Jawa, seperti wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Transmigrasi telah memberikan kontribusi dalam meratakan persebaran jumlah penduduk. Meskipun pada saat ini, jumlah penduduk masih terkonsentrasi di pulau Jawa, namun cerita keberhasilan program transmigrasi dalam pemanfaatan sumberdaya alam khususnya pertanian telah berkontribusi dalam ekonomi nasional.

E. Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup merupakan suatu indikator kesehatan masyarakat. Umur harapan hidup merupakan representasi dari nilai angka kematian kasar (CDR) dan tingkat kematian bayi (IMR). Semakin tinggi CDR dan IMR maka semakin rendah angka harapan hidup pada suatu wilayah. Banyak penelitian menyebutkan adanya keterkaitan antara peningkatan umur harapan hidup dengan tingkat kesejahteraan dan kesehatan penduduk.

Data WHO tahun 1992 mencatat negara dengan umur harapan hidup paling tinggi adalah Hongkong yakni 77,3 tahun. Sedangkan negara Indonesia menempati urutan 70 dengan umur harapan hidup sebesar 61,5 tahun. Semakin lama umur harapan hidup pada suatu negara memberikan suatu gambaran kondisi kesehatan penduduk secara umum. Semakin tinggi perhatian pemerintah terhadap pelayanan kesehatan dan penjagaan kualitas lingkungan maka diasumsikan terjadi peningkatan umur harapan hidup pada suatu negara.

F. Data Kependudukan

Setiap negara ingin mengetahui jumlah penduduk di negara masing-masing terkait dengan persebaran dan komposisinya. Untuk itu dibuatlah suatu sistem pengumpulan data penduduk yang kemudian dikembangkan sebagai data pelaksanaan Sensus Penduduk. Sensus penduduk yang sering dianalogikan sebagai pemotretan penduduk pada suatu saat, hanya akan memberikan data penduduk pada saat sensus penduduk dilaksanakan.

Di Indonesia terdapat tiga sumber data demografi penduduk, yaitu, sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei. Sensus penduduk dikenal dengan istilah cacah jiwa. Di Indonesia sensus penduduk telah dimulai semasa pemerintahan Raffles pada tahun 1815 yang menghitung jumlah penduduk pada pulau Jawa.

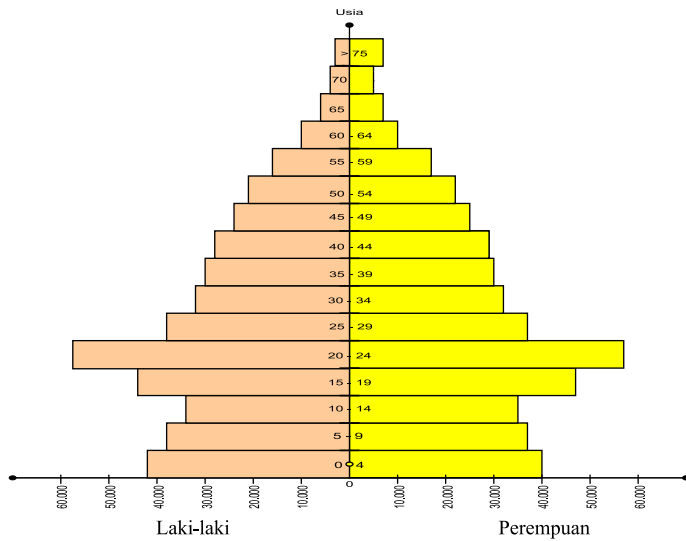
Sensus penduduk merupakan suatu proses keseluruhan dari pengumpulan data, penilaian, menganalisis, dan penyajian data penduduk. Informasi yang disajikan dari sensus penduduk menggambarkan tentang ciri-ciri demografi, sosial ekonomi, dan lingkungan. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang Indonesia telah melaksanakan sensus enam kali yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.

Sensus penduduk hanya memberikan informasi kependudukan pada saat dilaksanakan sensus. Sensus dapat dianalogikan sebagai pemotretan penduduk yang dilaksanakan pada hari tertentu. Selain itu, untuk menggambarkan catatan kejadian-kejadian kependudukan yang terjadi setiap saat maka dilakukan registrasi penduduk. Registrasi penduduk terdata pada kantor pemerintahan paling rendah yakni desa/kelurahan. Registrasi penduduk merupakan sistem pasif, artinya data kependudukan terkumpul dari hasil laporan penduduk ke kelurahan/desa. Kelemahan dari sistem pasif ini tidak semua penduduk akan melaporkan kejadian kependudukan ke kantor kelurahan/desa.

Hasil sensus penduduk dan registrasi penduduk mempunyai keterbatasan. Mereka hanya menyediakan data statistik kependudukan, dan kurang memberikan informasi tentang sifat dan perilaku kependudukan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka perlu dilakukan survei kependudukan. Survei kependudukan dilaksanakan dengan sistem sampel atau dalam bentuk studi kasus.

Komposisi penduduk dalam demografi disajikan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk pada hekekatnya adalah diagram balok, dibuat sebagai berikut:

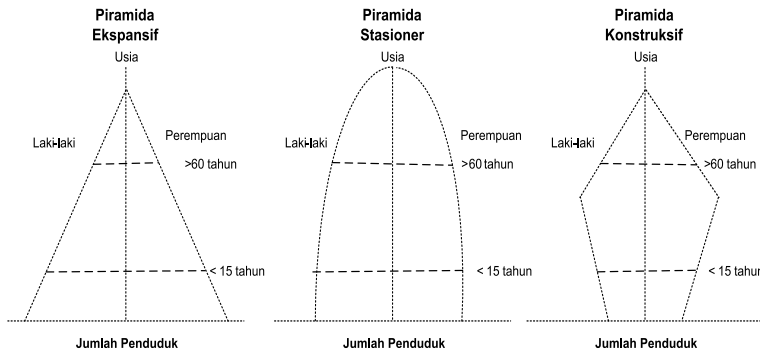
- a. Sumbu vertikal, adalah usia
- b. Sumbu horizontal untuk jumlah penduduk dalam persen atau nilai absolut,
- c. Sebelah kiri untuk penduduk laki-laki dan sebelah kanan untuk penduduk perempuan
- d. Dasar sumbu vertikal untuk kelompok usia termuda, semakin ke atas kelompok usia semakin tua,
- e. Puncak piramida penduduk tertua, biasanya dalam interval terbuka, dan
- f. Besarnya balok bagi semua usia adalah sama.



Gambar 2.7. Piramida Penduduk

Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, karakteristik penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Ekspansif, jika sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur usia muda. Tipe ini umum terjadi pada negara-negara dengan tingkat kelahiran tinggi dan angka kematian tinggi.
2. Konstruktif, jika penduduk yang berada dalam kelompok termuda jumlahnya sedikit. Tipe ini terjadi karena angka kelahiran turun dan angka kematian rendah.
3. Stasioner, jika banyaknya penduduk usia dalam umur hampir sama. Tipe ini terjadi apabila tingkat kelahiran dan kematian berjalan rendah.



Gambar 2.8. Tipe Piramida Penduduk

G. Perkembangan dan Dampak Kependudukan

Pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah dipengaruhi tiga faktor alami, yaitu faktor kelahiran, faktor kematian, dan faktor migrasi. Namun pada sisi lain, pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh faktor non alami. Faktor-faktor yang bersifat non alami dapat berupa peperangan, penemuan obat, program kesehatan lingkungan dan masyarakat, serta lain-lainnya. Peperangan atau konflik yang terjadi pada suatu wilayah akan dapat mematikan dan akan mengurangi pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah atau negara. Hal ini dapat dilihat dari grafik pertumbuhan penduduk dunia, bahwa periode sebelum tahun 1950 pada saat itu terjadi peperangan dunia jumlah untuk mencapai 1 milyar membutuhkan waktu yang relatif lama sekitar 123 tahun. Namun usai perang dunia atau PD II, maka angka pertumbuhan penduduk berlangsung sangat tinggi atau relatif cepat untuk mencapai 1 milyar.



Gambar 2.9. Perkembangan Penduduk Dunia

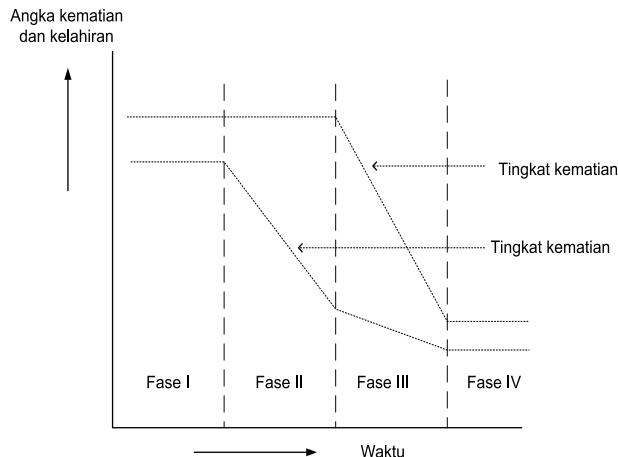
Selanjutnya, penemuan alat-alat kesehatan dan semakin tingginya kesadaran untuk menjaga kesehatan dan lingkungan berdampak terhadap umur harapan hidup manusia semakin lama. Semakin majunya dunia kedokteran dan kesehatan, berbagai macam penyakit dapat disembukan maka semakin lama hidup seseorang. Untuk itu fase-fase perkembangan penduduk dunia atau diistilahkan dengan transisi demografi dapat dibedakan atas empat kategori, yaitu:

Fase I, pada fase I angka kelahiran dan kematian keduanya tinggi, hal ini terjadi karena reproduksi tidak terkendali, dan kematian pun demikian. Pada fase ini teknologi kesehatan belum lagi berfungsi, sehingga masih terjadi banyak wabah penyakit. Sekalipun tidak adanya pembatasan kelahiran, namun populasi tidak akan bertambah atau praktis stationer, karena angka kematian pun tinggi. Kematian bayi saat melahirkan sangat besar, meskipun jumlah bayi yang lahir tinggi, namun bayi yang lahir banyak yang tidak dapat bertahan hidup hingga mencapai dewasa.

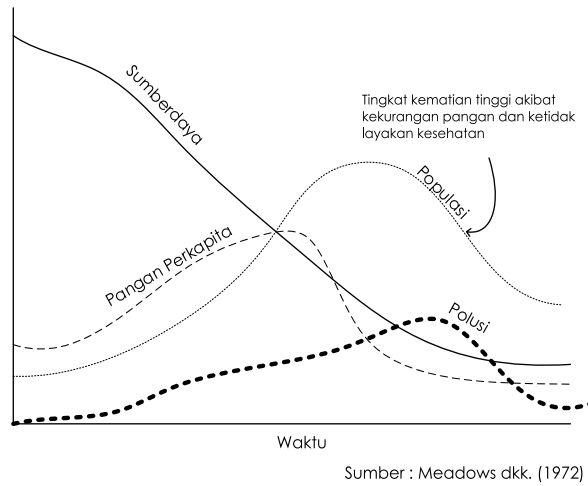
Fase II, pada fase II angka kematian menurun sedangkan angka kelahiran tetap tinggi. Fase ini terjadi karena ditemukan beberapa vaksin untuk kesehatan masyarakat, berbagai virus dapat ditekan dan tingkat kesehatan masyarakat mulai membaik, namun pada fase tersebut tidak dilakukan penurunan jumlah kelahiran.

Fase III. Pada fase III mulai terjadi kemajuan pada dunia kedokteran, kesehatan masyarakat meningkat, namun dampak dari fase ke II bahwa angka kelahiran tinggi. Peningkatan jumlah penduduk, menyebabkan terjadinya kekurangan pangan, kelaparan, dan gizi buruk, sehingga menimbulkan banyak kematian.

Fase IV. Pada fase ini angka kelahiran dan kematian sama kecilnya, sehingga penduduk relatif tetap atau stabil. Pada fase ini manusia sudah berfikir perencanaan anak yang dikehendaki, kapan hamil, kapan melahirkan. Seorang ibu tidak lagi harus menderita untuk melahirkan anak.



Gambar 2.10. Transisi Demografi

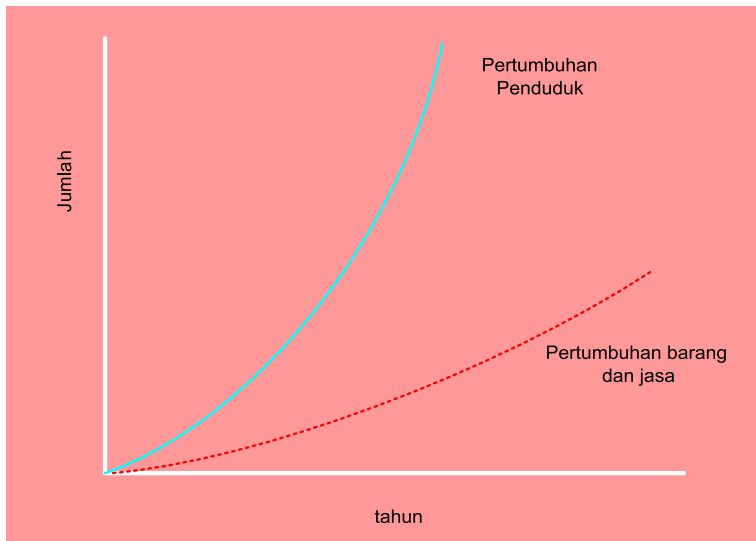


Gambar 2.11. Dampak populasi penduduk di dunia

Meadows dkk. (1972) menjelaskan bahwa perkembangan penduduk dunia akan berdampak terhadap ketersediaan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumberdaya alam yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan manusia bersifat terbatas. Meskipun ada jenis sumberdaya alam dapat diperbaharui, namun tidak sedikit kebutuhan manusia tergantung pada sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui dan akan habis. Jika manusia yang hidup di planet bumi tidak terkendali, maka dampak buruk untuk masa depan akan terjadi. Sehingga dibutuhkan model dan atau program-program pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Pertumbuhan penduduk dapat juga dikaitkan dengan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Bila dilihat secara global, maka mungkin saja jumlah penduduk dan sumberdaya alam masih memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun

banyaknya yang menggunakan sumberdaya alam, menyebabkan percepatan habisnya sumberdaya alam dan menurunkan daya dukung lingkungan. Usaha yang paling tepat untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya dukung lingkungan yakni dengan program penurunan jumlah penduduk. Gambar 2.10 disajikan kesenjangan antara jumlah penduduk dengan produksi barang dan jasa.



Gambar 2.10. Skema kesenjangan antara jumlah penduduk dengan barang dan jasa

H. Rangkuman

Pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan masalah yang dihadapi banyak negara berkembang, khususnya Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ranking ke empat dunia, yakni sebesar

238 juta jiwa tahun 2010. Jumlah penduduk pada suatu negara dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Tingginya jumlah kelahiran dan ditambah banyaknya penduduk yang datang (*in migration*) akan menyebabkan pertumbuhan penduduk akan mengalami peningkatan.

Perbedaan ekonomi, kesempatan kerja, dan budaya masyarakat menjadi faktor penyebab terjadinya urbanisasi. Tingginya arus urbanisasi berdampak besar terhadap wilayah perkotaan, seperti jumlah penduduk semakin padat, peningkatan kriminalitas, kota semakin kumuh, dan persaingan tenaga kerja. Sedangkan pada wilayah desa yang ditinggalkan menjadi tidak optimal sumberdaya alam dimanfaatkan. Upaya untuk mengurangi kepadatan penduduk dan peningkatan ekonomi masyarakat maka pemerintah melakukan program transmigrasi dari pulau Jawa menuju wilayah lain diluar pulau Jawa.

Indonesia memiliki umur harapan hidup sebesar 61,5 tahun. Umur harapan hidup dipengaruhi angka kematian kasar (CDR) dan tingkat kematian bayi (IMR). Tinggi rendahnya umur harapan hidup merupakan indikator kesehatan masyarakat, artinya semakin tinggi umur harapan hidup maka kesehatan masyarakat semakin baik. Untuk mengetahui data demografi pada suatu wilayah, maka merujuk tiga sumber, yaitu sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk.

MATERI 2

MASALAH

KEPENDUDUKAN

A. Pendahuluan

Masalah kependudukan di Indonesia sampai saat sekarang belum dapat diatasi. Permasalahan ini antara lain diwarnai jumlah yang besar dengan pertumbuhan yang tinggi, serta angka kelahiran yang tinggi. Secara garis besar terdapat tiga aspek permasalahan kependudukan di Indonesia yaitu struktur umur muda, kualitas pendudukan, dan persebaran penduduk antar wilayah yang tidak merata (BKKBN, 2013).

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010 sebanyak 237,6 juta jiwa, terdiri atas 119,6 juta pria dan 118 juta wanita dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49% per tahun sehingga merupakan jumlah penduduk terbesar keempat didunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Pertumbuhan penduduk ini tentu saja berimplikasi secara signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan negara. Berdasarkan jumlah tersebut, maka setiap harinya penduduk Indonesia bertambah sebesar 9.027 jiwa. Setiap jam terjadi pertambahan pertumbuhan penduduk sebanyak 377 jiwa, bahkan setiap detik jumlah pertambahan penduduk masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 1,04% (1-2 juta jiwa). Pertambahan penduduk di Indonesia umumnya bisa dikatakan 99,9% disebabkan oleh kelahiran, sisanya berupa migrasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam 1 detik di Indonesia terjadi kelahiran bayi sebanyak 1 -2 jiwa (Irianto, 2014).

Persoalan kependudukan Indonesia tersebut juga diperberat dengan kondisi kependudukan lain yang kurang baik, diantaranya masih 60% penduduk hanya tamat SD dan bahkan tidak atau belum tamat SD. Angka *Human*

Development Index (HDI) Indonesia masih menduduki peringkat ke 108 dari 188 negara (2009) dan urutan ke 7 dari 10 negara ASEAN setelah Vietnam, di atas Laos, Kamboja, dan Myanmar (UNDP, 2009).

Kenaikan laju pertumbuhan penduduk (LPP) Indonesia selama periode 2000-2010 yang lebih tinggi dari pada satu dekade sebelumnya menunjukkan bahwa selama dasawarsa terakhir ini pemerintah tidak melakukan upaya serius atau lalai untuk menurunkan atau setidaknya menjaga stabilitas pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan upaya yang dilakukan oleh rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Rezim Reformasi sepertinya kurang memiliki komitmen dan kurang memandang strategis permasalahan kependudukan, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Kependudukan KB dan Perlindungan Anak Bappenas Dr Suharti PhD, "Pemerintah di daerah, khususnya gubernur, wali kota dan bupati selaku penentu kebijakan harus mempunyai komitmen yang sama terkait masalah kependudukan dan KB."

Hal ini juga dipertegas oleh James Grant, Mantan Direktur Jendral UNICEF, "Persoalan inti pada jaman sekarang ini berkisaran di seputar usaha-usaha masyarakat dunia untuk mengatasi ledakan penduduk." Lebih jauh, hasil konferensi kependudukan di Kairo menegaskan bahwa "Berbagai sasaran dan kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan merupakan bagian integral dari keseluruhan pembangunan di bidang kultural, ekonomi, dan sosial," (Program Aksi, Konferensi Internasional PBB tentang Kependudukan dan Pembangunan 1994, Torando dan Smith, 2003).

Telah jelas bahwasanya pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang menempatkan isu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Kesadaran pembangunan berwawasan kependudukan dilandasi oleh permasalahan kependudukan (demografi) yang mendasar di Indonesia. Permasalahan kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Masalah kependudukan ini berdampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan serta keamanan. Masalah kependudukan juga dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas, jumlah penduduk yang besar berarti permasalahan dalam kemampuan menyediakan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan dari segi kualitas melihat dari kemampuan daya saing Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia, sejak tahun 1970, pemerintah telah melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Program KB sampai dengan akhir tahun 1990 telah berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk dari semula sekitar 4,6 pada tahun

1970 menjadi sekitar 2,6 pada akhir tahun 1990. Keberhasilan program KB di Indonesia telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pada sidang majelis umum PBB menganugraahkan penghargaan kepada pemerintah Indonesia sebagai negara yang berhasil mengatasi laju pertumbuhan penduduk.

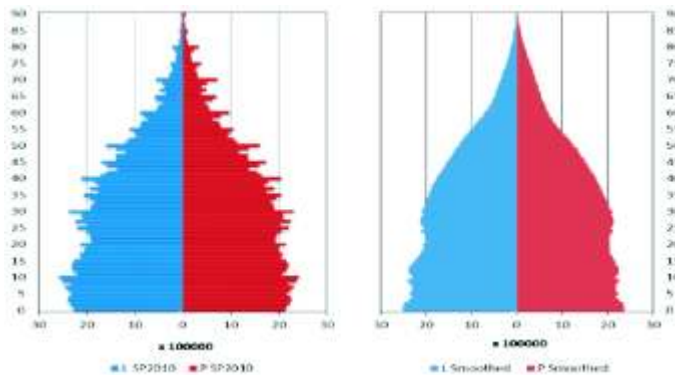
Namun sayang pelaksanaan program KB meredup, seiring dengan pergantian rezim orde baru dan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam UU nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan merupakan urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau urusan konkuren.

Program KB, seolah terlupakan karena tidak menghasilkan keuntungan. Fokus anggaran untuk pembangunan dan sektor lain yang dianggap menguntungkan. Beberapa tahun kemudian semua pemangku kepentingan terkaget-kaget ketika data kependudukan diumumkan, laju pertumbuhan penduduk Indonesia meningkat dibandingkan sebelum era reformasi. Pelan tapi pasti perhatian pemerintah pusat dan daerah kepada program KB mulai tumbuh kembali. Kesadaran terhadap pentingnya program KB mulai nampak setelah situasi dan kondisi memungkinkan serta ancaman ledakan jumlah penduduk mulai membayangi Indonesia.

Berdasarkan laman Biro Pusat Statistik Indonesia jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta jiwa. Sedangkan berdasarkan Survey Demografi Kesehatan Indonesia tahun

2012 menyebutkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 257 juta jiwa. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk tersebut, apabila diproyeksikan apa adanya tanpa intervensi pemerintah akan meningkat menjadi sekitar 280 juta jiwa atau naik sebesar 30 juta jiwa atau tambah rata-rata 4 juta jiwa pertahun.

Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2010



Berdasarkan pembahasan sebelumnya, faktor penduduk merupakan penggerak (*cost driver*) terjadinya berbagai kebutuhan yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Dinamika Kependudukan

Dinamika penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Perubahan tersebut terjadi secara terus menerus dari tahun ke tahun, akibatnya jumlah penduduk mengalami perubahan secara dinamis. Untuk mengetahui perubahan

jumlah penduduk dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk. sedangkan untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang dihitung dengan menggunakan proyeksi penduduk. Hal ini penting dilakukan untuk perencanaan pembangunan, khususnya di bidang kependudukan.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Indonesia adalah perubahan ($\square$) jumlah penduduk pada sebuah wilayah setiap tahun. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk Indonesia seperti, nalitas, kematian, migrasi (imigrasi dan emigrasi). LPP berguna untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang, dihitung menggunakan tiga metode pertumbuhan penduduk:

$$\text{aritmatik: } t = \frac{1}{r}$$

$$\text{geometrik: } t = \frac{\log 2}{\log (1+r)}$$

$$\text{eksponensial: } t = \frac{\ln 2}{r}$$

$$P_t = P_0 (1+r)^t$$

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$$

dimana :

P_t = jumlah penduduk pada tahun t

P_0 = jumlah penduduk pada tahu awal

r = laju pertumbuhan penduduk

t = periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya ledakan penduduk yang pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah kependudukan. Jumlah penduduk berarti kuantitas penduduk yang ada pada suatu wilayah. Penentuan jumlah penduduk, terikat pada batasan tempat dan waktu. Misalnya jumlah penduduk pada wilayah X di satuan waktu tertentu, ialah sebanyak 1000 Jiwa. Angka 1000 menunjukkan banyak atau jumlahnya, dan jiwa merupakan satuan.

Oleh karena penentuan jumlah penduduk dibatasi oleh waktu dan tempat, maka jumlah penduduk ini disimbolkan dengan P_t . Simbol P berarti jumlah penduduk pada suatu wilayah, dan t adalah satuan waktu tertentu.

Pada suatu daerah yang telah melaksanakan sensus penduduk dengan baik, data jumlah penduduknya sudah tersedia dan bisa dijadikan sebagai estimasi terhadap variabel-variabel demografi ke depan. Contohnya di Provinsi Sumatera Barat pada Januari 2017 telah tercatat jumlah penduduk sebanyak 1.000.000 Jiwa. Dengan menggunakan persamaan matematis penduduk berimbang, kita bisa menentukan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat 1 tahun kemudian, yaitu di awal Tahun 2018.

Persamaan penduduk berimbang yang dimaksud ialah :

$$P_t = P_0 + B - D + I - E$$

Di mana :

- P_t : Jumlah penduduk di awal Tahun 2018
- P_0 : Jumlah penduduk tercatat (awal Tahun 2017)
- B : Jumlah kelahiran yang terjadi selama Tahun 2017
- D : Jumlah kematian yang terjadi selama Tahun 2017

- I : Jumlah imigrasi yang terjadi selama Tahun 2017
 E : Jumlah emigrasi yang terjadi selama Tahun 2017

Terlihat dari persamaan di atas beberapa variabel yang menentukan jumlah penduduk. Persamaan di atas dilahirkan berdasarkan fakta bahwa memang jumlah penduduk pada suatu wilayah ditentukan oleh kelahiran (B), kematian (D), jumlah orang yang masuk (I) dan jumlah orang yang keluar (E).

Sehingga untuk menghitung perkiraan jumlah penduduk di awal Tahun 2018, dapat dihitung, apabila tercatat misalnya B = 100.000, D = 50.000 serta I = 50.000 dan E = 100.000. Perhitungan ini dilanjutkan dengan memasukkan angka masing masing variabel ke dalam persamaan di atas, yaitu :

$$\begin{aligned} P_t &= P_0 + B - D + I - E \\ &= 1.000.000 + 100.000 - 50.000 + 50.000 - 100.000 \\ &= 1.000.000 \text{ Jiwa.} \end{aligned}$$

Kondisi yang demikian disebut *stationer* yaitu di mana jumlah penduduk tetap di selang waktu pada suatu daerah. Lalu bagaimanakah dengan pertumbuhan penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam **contoh** ini? Mari kita lanjutkan dengan kajian tentang pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk per satuan waktu tertentu. Artinya, karena jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah seiring waktu akan senantiasa berubah, atau tidak konstan, maka data atau informasi mengenai jumlah penduduk (P_t) saja, belumlah cukup dijadikan variabel untuk menelaah masalah

kependudukan yang sedemikian kompleks. Sehingga diperlukan penghitungan terhadap pertumbuhan penduduk ini.

Dari contoh di atas, sudah dipahami tentang *stationer* yang mengindikasikan jumlah penduduk yang tetap, di Tahun 2017 dengan Tahun 2018. Pada situasi ini, tentu pertumbuhan penduduk adalah 0 (nol). Pertumbuhan penduduk disimbolkan dengan r , dengan satuan Jiwa/Tahun. Menentukan pertumbuhan penduduk, berdasarkan data jumlah penduduk yang ada, mesti ditentukan dulu jumlah penduduk di pertengahan tahun.

Dari contoh di atas, jumlah penduduk di pertengahan Tahun 2017 dapat dihitung dengan cara yang sama. Di mana pada Bulan Juni jumlah penduduk = 1.000.000 Jiwa. Besarnya B , D dan I serta E adalah setengah dari jumlah masing masingnya pada contoh di atas.

Dari persamaan penduduk berimbang di atas, dapat diturunkan rumus pertumbuhan penduduk.

$$\begin{aligned} r &= \frac{B - D + I}{P \text{ (tengah tahun)}} \times 100\% \\ &= \frac{100.000 - 50.000 + 50.000 - 100.000}{1.000.000} \times 100\% \\ &= 0 \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Dari contoh di atas, pertumbuhan penduduk adalah 0 %. Tentu saja demikian, karena kondisi penduduknya *stationer*.

Walaupun itu hanya sebagai contoh, tapi paling tidak sudah dipahami tentang apa itu jumlah dan pertumbuhan penduduk, apa saja variabel yang menentukannya, serta bagaimana cara menghitungnya. Sub bahasan terakhir adalah untuk apa gunanya penghitungan jumlah dan laju penduduk ini?

Kondisi kependudukan di masa depan, merupakan konsekuensi dari data kependudukan saat ini. Secara teoritis, laju pertumbuhan penduduk akan menentukan jumlah penduduk di suatu masa nanti. Oleh karena itu, suatu analisis terhadap situasi saat ini, diperlukan sekali sebagai instrument dalam memprediksi jumlah penduduk masa mendatang.

Penentuan perkiraan jumlah penduduk di masa mendatang, merupakan salah satu pertimbangan untuk melahirkan kebijakan kependudukan. Dengan kata lain, kebijakan kependudukan berangkat dari situasi saat ini, yang memperkirakan situasi mendatang. Kebijakan itu ditujukan agar situasi mendatang sesuai dengan yang diinginkan.

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 juta pada tahun 2035 (Tabel 3.1). Walaupun demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 2010-2035 menunjukkan kecenderungan terus menurun. Dalam periode 2010-2015 dan 2030-2035 laju pertumbuhan penduduk turun dari 1,38 persen menjadi 0,62 persen per tahun (Tabel 3.2).

**Tabel. 3.1 Proyeksi Penduduk menurut Provinsi,
2010-2035 (Ribuan)**

Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Aceh	4 523,1	5 002,0	5 459,9	5 870,0	6 227,6	6 541,4
12 Sumatera Utara	13 028,7	13 937,8	14 703,5	15 311,2	15 763,7	16 073,4
13 Sumatera Barat	4 865,3	5 196,3	5 498,8	5 757,8	5 968,3	6 130,4
14 Riau	5 574,9	6 344,4	7 128,3	7 898,5	8 643,3	9 363,0
15 Jambi	3 107,6	3 402,1	3 677,9	3 926,6	4 142,3	4 322,9
16 Sumatera Selatan	7 481,6	8 052,3	8 567,9	9 000,4	9 345,2	9 610,7
17 Bengkulu	1 722,1	1 874,9	2 019,8	2 150,5	2 264,3	2 360,6
18 Lampung	7 634,0	8 117,3	8 521,2	8 824,6	9 026,2	9 136,1
19 Kep. Bangka Belitung	1 230,2	1 372,8	1 517,6	1 657,5	1 788,9	1 911,0
21 Kepulauan Riau	1 692,8	1 973,0	2 242,2	2 501,5	2 768,5	3 050,5
Pulau Sumatera	50 860,3	55 272,9	59 337,1	62 898,6	65 938,3	68 500,0
31 DKI Jakarta	9 640,4	10 177,9	10 645,0	11 034,0	11 310,0	11 459,6
32 Jawa Barat	43 227,1	46 709,6	49 935,7	52 785,7	55 193,8	57 137,3
33 Jawa Tengah	32 443,9	33 774,1	34 940,1	35 958,6	36 751,7	37 219,4
34 DI Yogyakarta	3 467,5	3 679,2	3 882,3	4 064,6	4 220,2	4 348,5
35 Jawa Timur	37 565,8	38 847,6	39 886,3	40 646,1	41 077,3	41 127,7
36 Banten	10 688,6	11 955,2	13 160,5	14 249,0	15 201,8	16 033,1
Pulau Jawa	137 033,3	145 143,6	152 449,9	158 738,0	163 754,8	167 325,6
51 Bali	3 907,4	4 152,8	4 380,8	4 586,0	4 765,4	4 912,4
52 N T B	4 516,1	4 835,6	5 125,6	5 375,6	5 583,8	5 754,2
53 N T T	4 706,2	5 120,1	5 541,4	5 970,8	6 402,2	6 829,1
Bali dan Kep. Nusa Tenggara	13 129,7	14 108,5	15 047,8	15 932,4	16 751,4	17 495,7
61 Kalimantan Barat	4 411,4	4 789,6	5 134,8	5 432,6	5 679,2	5 878,1
62 Kalimantan Tengah	2 220,8	2 495,0	2 769,2	3 031,0	3 273,6	3 494,5
63 Kalimantan Selatan	3 642,6	3 989,8	4 304,0	4 578,3	4 814,2	5 016,3
64 Kalimantan Timur	3 576,1	4 068,6	4 561,7	5 040,7	5 497,0	5 929,2
Pulau Kalimantan	13 850,9	15 343,0	16 769,7	18 082,6	19 264,0	20 318,1
71 Sulawesi Utara	2 277,7	2 412,1	2 528,8	2 624,3	2 696,1	2 743,7
72 Sulawesi Tengah	2 646,0	2 876,7	3 097,0	3 299,5	3 480,6	3 640,8
73 Sulawesi Selatan	8 060,4	8 520,3	8 928,0	9 265,5	9 521,7	9 696,0
74 Sulawesi Tenggara	2 243,6	2 499,5	2 755,6	3 003,0	3 237,7	3 458,1
75 Gorontalo	1 044,8	1 133,2	1 219,6	1 299,7	1 370,2	1 430,1
76 Sulawesi Barat	1 164,6	1 282,2	1 405,0	1 527,8	1 647,2	1 763,3
Pulau Sulawesi	17 437,1	18 724,0	19 934,0	21 019,8	21 953,5	22 732,0
81 Maluku	1 541,9	1 686,5	1 831,9	1 972,7	2 104,2	2 227,8
82 Maluku Utara	1 043,3	1 162,3	1 278,6	1 391,0	1 499,4	1 603,6
Kep. Maluku	2 585,2	2 848,8	3 110,7	3 363,7	3 603,6	3 831,4
91 Papua Barat	765,3	871,5	981,8	1 092,2	1 200,1	1 305,0
94 Papua	2 857,0	3 149,4	3 435,4	3 701,7	3 939,4	4 144,6
Pulau Papua	3 622,3	4 020,9	4 417,2	4 793,9	5 139,5	5 449,6
Indonesia	238 518,8	255 461,7	271 066,4	284 829,0	296 405,1	305 652,4

Turunnya laju pertumbuhan ini ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian. Salah satu ciri penduduk Indonesia adalah persebaran antar pulau dan provinsi yang tidak merata. Sejak tahun 1930, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, padahal luas pulau itu kurang dari tujuh persen dari luas total wilayah daratan Indonesia. Namun, secara perlahan persentase penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa terus menurun dari sekitar 57,4 persen pada tahun 2010 menjadi 54,7 persen pada tahun 2035. Sebaliknya persentase penduduk yang tinggal di pulau-pulau lain meningkat, seperti, Pulau Sumatera naik dari 21,3 persen menjadi 22,4 persen, Kalimantan naik dari 5,8 persen menjadi 6,6 persen pada periode yang sama.



Selain pertumbuhan alami di pulau-pulau tersebut memang lebih tinggi dari pertumbuhan alami di Jawa, faktor arus perpindahan yang mulai menyebar ke pulau-pulau tersebut juga menentukan distribusi dan komposisi penduduk.

C. Penduduk Remaja

Remaja berasal dari kata latin ***adolensence*** yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock, 1992). Pada masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. Seperti yang dikemukakan oleh Calon (dalam Monks, dkk 1994) bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak. Menurut Sri Rumini & Siti Sundari (2004: 53) masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), populasi anak remaja di Indonesia mencapai tidak kurang dari 43,6 juta jiwa atau 19,64%. Sebagai generasi penerus bangsa jumlah yang cukup besar ini merupakan potensi yang besar pula bagi negara. Remaja memiliki kedudukan dan peran penting dalam pembangunan. Kedudukan dan peran strategis remaja ini tercermin dari eksistensinya sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang merupakan perwujudan dari kedudukan dan perannya dalam pembangunan nasional. Namun yang harus disadari bersama adalah bahwa kedudukan dan peran strategis remaja tersebut tidak akan bermakna bila kita melihat kondisi eksisting remaja pada saat ini. Yaitu terjadinya degradasi kemampuan remaja dalam berbagai bidang, diantaranya

masih banyaknya angka pengangguran usia produktif serta rendahnya rasa kebersamaan dan nasionalisme.

Selain itu, remaja juga mempunyai permasalahan yang sangat kompleks seiring dengan masa transisi yang dialami oleh remaja. Masa transisi ini menurut Bank Dunia mencakup 5 hal:

- 1) Melanjutkan sekolah (*continue learning*),
- 2) Mencari pekerjaan (*start working*),
- 3) Memulai kehidupan berkeluarga (*form families*),
- 4) Menjadi anggota masyarakat (*exercise citizenship*),
- 5) mempraktekkan hidup sehat (*practice healthy life*).

Penduduk remaja sebenarnya merupakan sub variabel yang ada pada jumlah penduduk, yang telah diuraikan di atas. Artinya, penduduk remaja dan merupakan salah satu komponen yang ada dalam variabel jumlah penduduk. Jika dipandang jumlah penduduk sebagai suatu sistem, maka penduduk remaja dan orang muda merupakan subsistem yang ada di dalamnya. Karena bahasan kita mengenai kuantitas penduduk, maka dalam jumlah penduduk, terdapatlah jumlah penduduk yang remaja dan orang muda.

Telaah tentang bagian bagian yang ada di dalam jumlah penduduk, sebenarnya salah satu bentuk pendekatan sistem. Tujuannya ialah untuk lebih bisa memandang sistem kependudukan itu secara holistik dan komprehensif. Bahwa dalam jumlah penduduk itu, terdapat komposisi yang merupakan sub sistem yang saling berinteraksi membentuk kuantitatif terhadap total penduduk di suatu wilayah, yang

atara lain ialah penduduk remaja dan usia muda serta penduduk usia lanjut.

Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam bahasan tentang penduduk remaja ini, ada baiknya kita telusuri terlebih dahulu relevansinya dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk yang sudah dipahami sebelumnya. Karena penduduk bersifat dinamis, tidaklah mudah mengidentifikasi persoalan yang ada di dalam penduduk tersebut, sehingga salah satu metode yang dikembangkan ialah dengan memunculkan istilah komposisi penduduk.

1. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk sesuai dengan makna komposisi yang bisa dipahami sebagai komponen penyusun yang secara kuantitatif menentukan terhadap hal yang disusunnya. Oleh karena itu, terkait dengan komposisi penduduk, berarti kita akan menelisik dan menganalisis hal hal yang ada di dalam jumlah penduduk. Tentu saja banyak komponen yang menyusun jumlah penduduk, diantaranya ialah jenis kelamin dan usia penduduk yang ada. Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk laki laki dan perempuan, yang tersusun dari tingkatan umur.

Lalu bahasan kita tentang penduduk remaja termasuk pendekatan dalam menelaah jumlah kependudukan dari komposisi apa? Tentu saja kompoisis berdasarkan usia penduduk. Rusli (1994) berargumen bahwa di antara beragam komposisi penduduk yang dapat disusun (dalam

studi kependudukan), komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin adalah yang terpenting. Umpamanya penting dalam pertaliannya dengan angka angka kelahian, kematian, rasio beban tanggungan dan jumlah penduduk usia sekolah.

Pembangunan berkelanjutan yang tegak dan berkembang dengan kerangka ekologis, ekonomis dan sosial tak akan lepas dari kependudukan. Penduduk adalah sebagai subjek dan sekaligus objek dalam pembangunan. Oleh karena itu, kajian tentang kependudukan secara umum tentang jumlah dan pertumbuhan saja tidak akan memuaskan untuk sampai pada konteks fungsi ekologis, ekonomis dan sosial.

Kaitan antara pendapat Rusli di atas dengan konsep pembangunan berkelanjutan ialah bahwa mempelajari komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin, akan sangat penting dalam hubungannya dengan fungsi ekonomis dan sosial di masyarakat. Ke 2 (dua) fungsi ini pun tidak bisa berdiri sendiri, karena ia terintegrasi satu sama lain dalam fungsi ekologis. Dengan demikian telaah tentang penduduk remaja dan orang muda menurut jenis kelamin menjadi hal yang penting untuk dibahas. Dengan kalimat lainnya ialah, menentukan jumlah penduduk laki laki dan perempuan di tiap tingkatan umur pada jumlah penduduk yang ada di satu wilayah adalah hal yang penting dalam studi kependudukan.

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk di Wilayah X
Berdasarkan Umur**

No	Interval Umur	Jumlah Laki Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total
1	0-4	10	10	20
2	5-9	10	15	25
3	10-14	20	30	50
4	15-19	15	15	30
5	20-24	20	30	50
6	25-29	10	40	50
7	30-34	20	30	50
8	35-39	25	25	50
9	40-44	10	15	25
10	45-49	10	15	25
11	50-54	10	15	25
12	55-59	15	15	30
13	60-64	10	20	30
14	65-69	10	10	20
15	70 ke atas	10	10	20
	Jumlah	205	295	500

Dalam komposisi penduduk, di samping jenis kelamin, terdapat pembagian penduduk menurut umur, yang dikategorikan menurut interval 4 tahun, yaitu (1) 0 - 4 tahun, (2) 5 - 9 tahun, (3) 10 – 14 tahun, (4) 15 – 19 tahun, (5) 20 - 24, (6) 25 – 29 tahun, (7) 30 – 34, (8) 35 – 39 tahun, (9) 40 – 44 tahun dan seterusnya. Berdasarkan interval umur ini, maka yang dikelompokkan sebagai penduduk remaja ialah pada butir ke (4) 15-19. Sedangkan orang muda bisa menempati point ke (5) - (8), yaitu berumur 20 – 39 tahun. Jika ditabulasikan jumlah penduduk di satu wilayah, menurut komposisi usia berdasarkan interval 4 tahun ini dapat dilihat pada Tabel 2.1

Dari Tabel 2.1 dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk yang ada sebanyak 500 Jiwa, terdiri dari jumlah masing masing penduduk menurut komposisi umur. Dalam hal ini, dicontohkan komposisi umur itu, dikategorikan sebanyak 15 kategori dengan interval 4 tahun.

Dari tabel sederhana itu, sebenarnya banyak hal yang bisa dijadikan bahan kajian dan dasar analisis di masa mendatang terkait terapan ilmu kependudukan ini. Disinggung sedikit bahwa terapan dari ilmu kependudukan itu adalah aplikasi dari konsep dan pendekatan di dalam ilmu kependudukan yang dibahas sekarang. Salah satunya ialah perumusan arahan strategi dan kebijakan kependudukan dalam konsep besar pembangunan kependudukan.

Dari Tabel 2.1 paling tidak, bisa dijelaskan hal hal sebagai berikut.

- a. Jumlah penduduk yang terbesar adalah pada nomor 6,7,8, dengan jumlah masing masingnya 50 jiwa. Yaitu jumlah penduduk yang berumur 25 – 29 tahun, 30 – 34 tahun, dan 35 – 39 tahun.
- b. Jumlah penduduk yang terendah adalah pada nomor 1,14,15, dengan jumlah masing masingnya 20 Jiwa. Yaitu jumlah penduduk yang berumur 0 - 4 tahun, 65 – 69 dan 70 ke atas.
- c. Jumlah penduduk laki laki total adalah sebanyak 205 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan total sebanyak 295 Jiwa.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada kondisi yang demikian, mengindikasikan usia penduduk dalam rentang 25 – 39 tahun adalah berjumlah $50 \times 3 = 150$ Jiwa. Sedangkan yang berusia 0 – 4 tahun sebanyak 20 Jiwa, umur 65 – 70 ke atas = $20 \times 2 = 40$ Jiwa.

Selanjutnya, bisa dihitung persentase penduduk yang berusia 25 – 39 tahun, yaitu $150 / 500 \times 100\% = 30\%$. Sedangkan yang berusia 65 – 70 ke atas adalah $40 / 500 \times 100\% = 8\%$. Kita bisa juga menambahkan satu kolom lagi pada Tabel 2.1 di atas yang memuat masing masing persentase dari setiap baris.

Kegunaan persentase ini ialah untuk dapat mengukur besarnya atau kecilnya komposisi yang ada. Penghitungan persentase ini sangat penting, sebagai informasi dan data awal dalam menentukan suatu kondisi kependudukan satu wilayah. Data ini sangat diperlukan untuk bahan analisis dengan menggunakan pendekatan dari variabel lain, untuk perumusan kebijakan pembangunan. Variabel lain yang dimaksud misalnya berkaitan dengan tingkat kesejahteraan (fungsi ekonomis) dan tingkat partisipasi masyarakat dan lain sebagainya.

D. Bonus Demografi

Secara sekilas telah disinggung tentang bonus demografi pada bahasan sebelumnya. Pada sub bahasan ini khusus dikemukakan tentang bonus demografi, dengan tujuan di samping bonus demografi dipandang sebagai suatu konsep

dalam kajian kependudukan juga pengetahuan tentang bonus demografi ini merupakan cerminan komposisi penduduk kita, yang akan menjadi pijakan menghadapi masa mendatang. Dengan alasan itu maka bonus demografi agaknya perlu dikaji khusus di sini.

1. Pengertian

Bonus demografi ialah suatu keadaan keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang (Wongboonsin, 2003). Selanjutnya Ross, (2004) menyatakan bahwa bonus demografi terjadi karena penurunan kelahiran yang dalam jangka panjang menurunkan proporsi penduduk muda sehingga investasi untuk pemenuhan kebutuhannya berkurang dan sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dari definisi di atas, dapat dipahami 2 (dua) hal berikut:

- Perubahan struktur umur penduduk dan menurunnya beban ketergantungan memberikan peluang yang disebut bonus demografi atau *demographic dividend*
- Kondisi bonus demografi ini, merupakan suatu keadaan yang akan memunculkan suatu peluang yang disebut sebagai *window of opportunity*. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat.

2. Terjadinya Bonus Demografi

Bonus demografi adalah bonus atau peluang (*window of opportunity*) yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi **penduduk produktif** (rentang usia **15-64 tahun**) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Di Indonesia fenomena ini terjadi karena proses transisi demografi yang berkembang sejak beberapa tahun lalu dipercepat oleh keberhasilan kita menurunkan tingkat fertilitas, meningkatkan kualitas kesehatan dan suksesnya program-program pembangunan sejak era Orde Baru hingga sekarang.

Jika diperhatikan lebih seksama, bonus demografi akan menjadi pilar peningkatan produktifitas suatu Negara dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM yang produktif dalam arti bahwa penduduk usia produktif tersebut benar-benar mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka dan memiliki tabungan yang dapat dimobilisasi menjadi investasi. Akan tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana penduduk usia produktif yang jumlah besar tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia dalam sebuah perekonomian, maka akan menjadi beban ekonomi karena penduduk usia produktif yang tidak memiliki pendapatan akan tetap menjadi beban bagi penduduk yang bekerja dan akan memicu terjadinya angka pengangguran yang tinggi.

Terjadinya bonus demografi jelas merupakan suatu proses panjang dalam riwayat kependudukan Bangsa Indonesia. Karena bonus demografi tidak bisa terjadi pada satu waktu atau satu generasi. Dari pengertian di

atas dapat dipahami bahwa bonus demografi terjadi dimulai dari suatu keadaan di mana fertilitas menurun. Selanjutnya pada kurun waktu tertentu ke depan, dalam komposisi penduduk terjadi jumlah usia produktif yang besar dibanding dengan penduduk usia non produktif (yang menjadi tanggungan yaitu anak-anak dan lansia). Akan tetapi tentu saja hal ini percuma dan bahkan bisa jadi petaka bagi suatu bangsa apabila jumlah usia produktif yang besar tersebut ternyata malah pengangguran (tidak produktif secara kenyataannya dalam kehidupan, walaupun secara komposisi umur mereka adalah pada usia produktif).

Untuk melihat catatan panjang terjadinya bonus demografi ini, mari cermati Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Angka Ketergantungan per 100 penduduk usia kerja

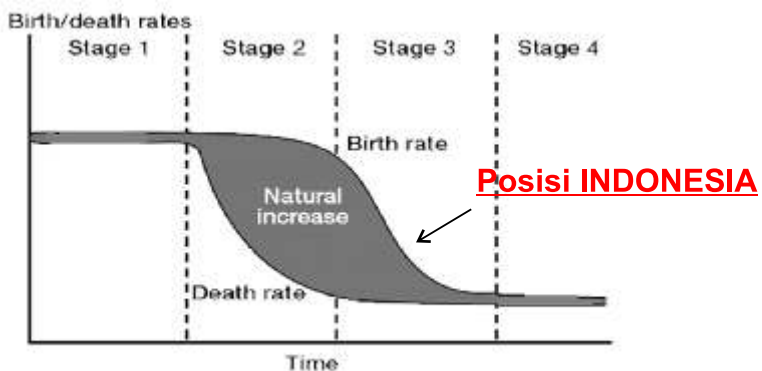
1971	2000	2020 - 2030	> 2030
86	54	44	> 50
100 orang bekerja menanggung 86	100 orang bekerja menanggung 54	100 orang bekerja menanggung 44	tanggungan meningkat karena pesatnya penambahan lansia

Dari Tabel 2.5 terlihat bagaimana sejak Tahun 1971 sampai Tahun 2000 peningkatan usia produktif yang bekerja dan memiliki kondisi 100 orang bekerja menanggung 54 orang. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi kesejahteraan bangsa di saat Tahun 1971, di mana 100 orang bekerja menanggung 86 orang.

Tetapi, tantangan ke depan terlihat jelas. Di atas Tahun 2030 terjadi konsekuensi setelah bonus demografi, di mana penduduk lansia meningkat. Keadaan ini sudah kita pahami bersama di bahasan sebelumnya. Semakin jelas urgensi dan keutamaan pembangunan berbasis kependudukan dilaksanakan di tanah air kita bukan? Karena jika tidak, kondisi yang akan terjadi benar benar berkaitan langsung dengan masalah kependudukan yang kita pelajari saat ini di masa masa mendatang.

Sedangkan *window of opportunity* terjadi di titik terendah beban tanggungan penduduk yaitu 2020 – 2030. Ini adalah puncak bonus demografi. Ini hanya terjadi sekali dalam sejarah atau riwayat kependudukan suatu bangsa. Artinya kesempatan emas ini lah yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, karena hanya sekali terjadi dalam catatan sejarah kependudukan kita. Karena, setelah itu, pada Tahun 2030 ke atas, tantangan akan semakin berat. .

Secara kronologis dapat proses Bonus Demografi dapat dijelaskan seperti gambar 2.6 berikut.



Gambar 2.6. Skema Terjadinya Bonus Demografi

Deskripsi Gambar 2.6 :

Ada 4 (empat) fase yang terjadi untuk terbentuknya bonus demografi. Secara rinci masing masing fase (disebut pada gambar sebagai *stage*) dijelaskan sebagai berikut:

Stage 1

Pada fase ini, terjadi angka kelahiran dan angka kematian yang sangat tinggi. Biasanya hal ini terjadi pada negara negara ketiga. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Di samping derajat kesehatan yang rendah, juga pola dan sikap hidup yang tidak berencana untuk kehidupan masing masing keluarga, dan lain sebagainya.

Stage 2

Selanjutnya pada fase ke dua, terjadi peningkatan ketersediaan makanan dan sumberdaya alam sudah mulai dimanfaatkan (tapi belum tentu secara arif dan bijaksana) diiringi tingkat kesehatan yang mulai meningkat, maka konsekuensinya adalah terjadi penurunan angka kematian.

Dengan kata lain, pada fase ke dua ini, terjadi penurunan angka kematian seiring dengan peningkatan kesehatan dan ketersediaan kebutuhan pokok manusia untuk bertahan hidup.

Stage 3

Pada fase ke tiga terjadi penurunan angka kelahiran. Hal ini dimungkinkan terjadi karena peluang untuk mengontrol kelahiran sudah ada. Indonesia mengalami fase ketiga ini pada tahun tahun 80 an.

Stage 4

Pada fase ke empat inilah terjadi angka kelahiran dan angka kematian rendah. Keadaan terjadi di negara negara maju. Artinya secara proses kependudukan, negara yang sudah berada pada fase ke empat ini, berada beberapa generasi di atas kita.

Pada Gambar 2.6 di atas, terlihat posisi Negara Indonesia. Bahwa negara kita sedang berada pada fase ke tiga saat ini. Puncak emas masa bonus demografi kita akan terjadi antara Tahun 2020 - 2030. Saat ini, kita menikmati bonus demografi adalah sebagai akibat dari telah terjadinya penurunan angka kelahiran. Hal ini disebabkan karena program Keluarga Berencana pernah berhasil dulunya di era orde baru. Hasilnya baru kelihatan sekarang ini. Untuk mencermati bagaimana fluktuasi dan dinamika angka ketergantungan penduduk di negara kita ini, dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut.



Gambar 2.7. Grafik Rasio Ketergantungan Penduduk Sejak Tahun 1965 – 2045

Dari Gambar 2.7 terlihat bagaimana fluktuasi dan dinamika angka ketergantungan penduduk di negara kita sejak Tahun 1965 sampai Tahun 2045. Apabila kita lihat antara Tahun 1965- 2005 terjadi penurunan tajam. Penurunan angka terjadi dari 80,2 sampai pada tingkat 52,0. Memang terjadi juga fluktuasi kenaikan dalam interval tersebut, yaitu kenaikan menjadi 82,5 di Tahun 1965 sampai 1975.

Selanjutnya sejak Tahun 2005 terjadi penurunan sampai pada Tahun 2035 ke tingkat angka 47,3. Terjadi penurunan yang paling tajam di Tahun 2025 – 2035 yaitu sampai pada tingkat angka 46,9. Kondisi inilah masa emas bonus demografi Bangsa Indoneisa.

Dari grafik di atas, banyak pelajaran yang bisa dipetik. Belajar dari masa lalu untuk persiapan ke depan adalah mutlak diperlukan. Di samping itu, perencanaan strategis dalam konsep pembangunan berbasis kependudukan pun adalah suatu konsekuensi. Perencanaan strategis berarti berdasarkan situasi saat ini, dengan segala variabel dan faktor yang ada, untuk mendisain masa depan ke arah yang lebih baik sesuai dengan harapan dan visi bangsa.

3. Dwi Implikasi Bonus Demografi di Masa Datang

Dari uraian sebelumnya, sudah dipahami posisi bangsa dalam perspektif kependudukan. Bonus demografi saat ini, terjadi karena angka kelahiran yang berhasil ditekan dalam kurun waktu antara Tahun 1965 –

2015. Selanjutnya posisi bonus demografi akan mencapai puncaknya antara Tahun 2020 – 2035. Ini adalah masa masa yang optimal bagi kependudukan bangsa kita.

Tapi, bagaimana implikasinya di masa mendatang? Kembali disinggung di bahasan sebelumnya, bahwa persiapan generasi muda berupa peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya penduduk remaja dan orang muda adalah suatu keharusan. Peningkatan kualitas ini, dikarenakan mereka nantinya adalah salah satu angkatan produktif yang akan dibebani tanggungan. Tidak itu saja, mereka pula lah yang akan menempati posisi lansia terbesar nantinya.

Dapat dirasakan sekarang. Bahwa implikasi bonus demografi ini mempunyai 2 (dua) kemungkinan. Kemungkinan implikasi pertama ialah ketika semua langkah optimisime yang telah kita bicarakan di atas terwujud. Para generasi muda kita yang belum memasuki usia produktif telah berada pada rel di mana mereka meningkatkan kualitas mereka.

Di samping itu, diiringi pula oleh pembangunan multisektoral yang dikawal untuk menopang fungsi ekologis yang selaras dengan fungsi ekonomis serta sosial, akan menghadirkan kondisi lingkungan hidup yang memiliki daya dukung optimal ke depan. Implikasinya apabila ini terjadi, Indonesia akan meraih masa masa emas di atas Tahun 2035. Indonesia memiliki generasi emas bersamaan dengan momen 100 tahun Indonesia merdeka nantinya.

Tapi, implikasi kedua adalah hal yang sama sama tidak kita inginkan. Tapi mempunyai peluang yang sama besarnya untuk bisa terjadi sebagaimana implikasi pertama. Kondisi saat ini, kendatipun kita sudah dalam masa bonus demografi, tapi pembangunan yang bergerak secara simultan dan multidimensi, tak bisa ditentukan dengan sektor kependudukan saja. Fungsi lingkungan dan fungsi sosial ikut serta mempengaruhi kondisi kependudukan itu. terjadinya krisis sosial politik, memberikan imbas pada sektor lainnya, dan bukan tidak mungkin menurunkan fungsi fungsi di sektor lain seperti fungsi pendidikan dan kesehatan.

Akibatnya, generasi emas yang kita harapkan di masa mendatang akan berhadapan dengan situasi yang amat sulit. Pada suatu kondisi sumberdaya lingkungan yang tidak kondusif lagi, pada saat dimana terjadinya degradasi lingkungan hidup dan lingkungan alamiah, maka generasi emas dan masa depan emas bangsa yang kita idamkan tinggal mimpi hari ini.

Artinya, kependudukan yang sudah optimal dalam kajian aspek kependudukan dan demografis, tidak bisa serta merta berimplikasi pada tercapainya visi pembangunan bangsa apabila fungsi lingkungan hidup tidak selaras mendukungnya. Ketersediaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas akan sangat menentukan kondisi manusia atau penduduk bangsa nantinya.

Di samping itu, hal yang menjadi faktor berpotensianya implikasi kedua ini ialah kondisi terjadinya degradasi sikap hidup yang dalam hal ini adalah termasuk variabel sumberdaya manusianya. Penduduk yang tidak berahklak mulia dan mementingkan diri sendiri juga menjadi penyebab gagalnya generasi emas pada masa depan.

Oleh karena itu, bonus demografi ini sebenarnya bukan hanya suatu modal yang dipandang dari sudut pandang kependudukan saja. Sebab percuma saja bonus demografi ada kalau tidak dijadikan modal dasar bagi semua pihak dalam pergerakan pembangunan untuk masa depan.

Seyogyanya bonus demografi menjadi bahasan bagi sektor dan domain lain. Tidak hanya secara teoritis keilmuan dan konsep praksis di sektor lain, tapi juga menjadi bahan kajian untuk terapan bagi semua pihak dalam pembangunan. Istilah bonus demografi hendaknya populer dan dimaknai secara benar oleh para *stakeholders* dan dipandang utuh oleh semua kepentingan. Bonus demografi harusnya menjadi asas dalam perencanaan strategis apapun juga di negara kita. Kebijakan dan arahan di semua bidang hendaknya mengacu pada bonus demografi, sehingga adanya perpaduan dan fokus sasaran yang pada akhirnya bermuara pada titik optimum kondisi bangsa yang bisa dinamakan dengan generasi emas di masa 100 tahun kemerdekaan bangsa.

4. Generasi Emas 2045 dan Pembangunan

Generasi emas akan terjadi pada catatan sejarah kependudukan Bangsa Indonesia tepat saat kemerdekaan bangsa genap berusia 100 tahun. Monumental ini terjadi di Tahun 2045. Artinya situasi ini bisa dicapai setelah bonus demografi yang telah dibahas sebelum ini. Generasi emas tidak datang begitu saja pada Tahun 2045. Tapi melewati proses panjang dan berliku, yaitu proses pembangunan.

Generasi emas tentu generasi yang berkualitas. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, saat inilah kondisi ideal dan visi pembangunan itu relatif tercapai. Tapi, generasi emas yang dimaksud tentu generasi yang telah melewati proses pembangunan dengan segala dimensinya. Proses pembangunan itu sedang berlangsung hari ini. Terkait tentang pembangunan yang sudah sering dikemukakan ini, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu tentang konsep pembangunan yang ada di Indonesia.

Ada 4 (empat) konsep pembangunan yang ada, yaitu (1) pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), (2) pembangunan sumberdaya manusia (*human capital development*), (3) pembangunan manusia (*human development*), (4) pembangunan berwawasan kependudukan (*people centered development*). Sebenarnya satu sama lain bukan bersifat meniadakan atau pun melengkapi. Akan tetapi ke semua konsep tersebut berada dalam satu visi dan makna. Perbedaannya satu sama lain hanya terletak pada sudut pandang.

Pembangunan berkelanjutan dipahami sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa melupakan kebutuhan generasi masa depan dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi dan lingkungan hidup. Berarti sudut pandangnya adalah fungsi sosial ekonomis dan lingkungan hidup (ekologis). Sementara itu, pembangunan sumberdaya manusia adalah usaha untuk memperbesar kemampuan memproduksi seseorang atau masyarakat, baik dalam pekerjaan, seni dan kegiatan lainnya yang dapat memperbaiki taraf hidup bagi diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini terlihat sudut pandangnya adalah sumberdaya manusia. Tetapi visi dan makna pembangunan antara keduanya tetap sama.

Pembangunan manusia adalah suatu proses memperbesar pilihan pilihan penduduk mulai dari hidup sehat dan panjang umur, terdidik, dan punya akses terhadap sumber ekonomi. Pilihan tambahan adalah kemerdekaan politik, hak asasi manusia yang terjamin dan kehormatan pribadi. Sudut pandang dalam pembangunan ini adalah manusia dalam makna hak asasinya. Selanjutnya konsep pembangunan berwawasan kependudukan diartikan dan dipahami sebagai suatu kenyataan bahwa (1) penduduk sebagai subyek (pelaku) dan obyek (penikmat) pembangunan dan (2) penduduk sebagai titik sentral pembangunan (sejak dari perencanaan, implementasi, dan monitoring evaluasi).

Terlihat bahwa kesemua konsep pembangunan itu sebenarnya saling sinergis satu sama lain. Lalu apakah hubungan antara pembangunan dengan generasi emas di Tahun 2045? Tentu hubungannya erat dan tegas sekali. Generasi emas, adalah produk dari proses pembangunan. Sekaligus generasi emas adalah pelaku dalam proses pembangunan. Yang menjadi sasaran dari rangkaian proses dan mekanisme pembangunan itu pun adalah generasi emas tersebut.

Apapun konsep pembangunan yang kita jadikan pendekatan atau sudut pandang dalam hubungannya dengan generasi emas, tetap saja generasi emas itu adalah sebagai produk dan pelaku serta objek dari pembangunan. Dari ke 4 (empat) konsep pembangunan yang sudah dibicarakan di atas, konsep dan ruang lingkup yang paling representative dan eksplisit menjelaskan hal ini adalah pembangunan berwawasan kependudukan. Di mana penduduk, yang terdiri dari generasi emas itu, adalah titik sentral dalam mekanisme pembangunan dimulai dari perencanaan, implementasi dan monitoring dan evaluasi.

5. Antara Generasi Emas dan Pendidikan

Setelah kita ketahui hubungan yang sangat erat dan tegas antara generasi emas di Tahun 2045 dengan proses pembangunan yang diselenggarakan di masa lalu, masa kini dan masa mendatang, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara generasi emas dengan pendidikan. Secara eksplisit jelas sekali kalau generasi emas tentulah orang yang berkualitas. Kualitas generasi emas salah satunya ditentukan oleh pendidikan.

Pendidikan lahir dari keinginan masyarakat untuk memelihara dan mewariskan kebudayaan dan filsafat hidup masyarakat kepada generasi muda (Parkay et al, 2010). Artinya pendidikan sebagai upaya sadar, terencana dan sistematis adalah suatu mekanisme untuk melestarikan dan mewariskan nilai dan kebijaksanaan kepada generasi muda, agar generasi muda mampu hidup lebih baik di masa depan. Ini adalah jawaban atas mengapa pendidikan itu ada. Selanjutnya apakah batasan pendidikan itu?

Batasan pendidikan dapat merujuk pada pengertian dan batasan “pendidikan” dalam Undang Undang No 20 Tahun 2003 dinyatakan pada Bab I Pasal 1 Ayat 1 bahwa pendidikan itu ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Semakin jelas bahwa pendidikan baik secara teoritis, maupun menurut legalitas, pada prinsipnya ialah untuk menuju suatu perubahan perilaku yang terwujud pada akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan seseorang, masyarakat dan bangsa dan negara.

Generasi emas adalah generasi yang merupakan refleksi dari pendidikan. Fungsi pendidikan dikemukakan oleh Taba (1962) mempunyai 3 fungsi utama, yaitu (1) sebagai pemelihara dan pewarisan kebudayaan, (2)

instrument transformasi kebudayaan dan (3) alat pengembangan individual. Sebelumnya, Brubacker (1950) telah menyampaikan pendapatnya bahwa fungsi pendidikan itu merupakan fungsi sosial. Sebagai fungsi sosial, maka terdapat 2 (dua) variasi dalam pelaksanaannya, yaitu (1) mengutamakan pada kebutuhan dan perubahan sosial dan (2) mengutamakan pada rekonstruksi sosial.

Dari ke 2 (dua) pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan berfungsi dalam kehidupan sosial. Artinya perubahan sosial maupun rekonstruksi sosial bisa dilaksanakan melalui pendidikan.

Dengan fungsi pendidikan di atas, dapat ditentukan peranan yang bisa dijalankan oleh pendidikan sesuai dengan fungsinya tersebut. Pendidikan dapat berperan dalam (1) penyampaian nilai dan iptek antar generasi, (2) merekonstruksi sosial dan (3) mentransformasi sosial, (4) mengembangkan potensi manusia menuju perubahan perilaku yang bermanfaat untuk dirinya, masyarakat dan negara.

Inilah substansi yang menjadi benang merah antara generasi emas dengan pendidikan. Generasi emas tidak hanya sebagai hasil (*output*) dari pendidikan, tapi juga dampak (*impact*) dari pendidikan itu. Generasi emas, adalah generasi yang telah menempuh kondisi di mana proses pendidikan yang ada, telah sesuai dengan fungsi pendidikan itu sendiri. Proses pendidikan bisa dilaksanakan dalam 3 bentuk yaitu (1) formal, (2) non

formal dan (3) in formal. Di semua proses tersebut, disitulah generasi emas akan memperoleh ahklak mulia dan keterampilan sehingga berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.

Dengan demikian, persiapan Indonesia untuk menuju 100 tahun kemerdekaan yang jatuh pada Tahun 2045 bukan semata hanya wacana di bidang kependudukan saja. Tapi menjadi komitmen semua sektor dan *stakeholders* di tiap dimensi pembangunan.

E. Penduduk Lanjut Usia

Penduduk Lanjut Usia (Lansia) adalah penduduk yang telah mengalami fase menurunnya kemampuan akal dan fisik, yang di mulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Sebagai mana di ketahui, ketika manusia mencapai usia dewasa, ia mempunyai kemampuan reproduksi dan melahirkan anak. Ketika kondisi hidup berubah, seseorang akan kehilangan tugas dan fungsi ini, dan memasuki selanjutnya, yaitu usia lanjut, kemudian mati. Bagi manusia yang normal, siapa orangnya, tentu telah siap menerima keadaan baru dalam setiap fase hidupnya dan mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi lingkunganya (Darmojo, 2004).

Pengertian lansia (lanjut usa) menurut UU no 4 tahun 1965 adalah seseorang yang mencapai umur 55 tahun, tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan menerima nafkah dari orang lain (Wahyudi, 2000) sedangkan menurut UU no.12 tahun 1998 tentang

kesejahteraan lansia (lanjut usia) adalah seseorang yang telah mencapai usia diatas 60 tahun (Depsos, 1999). Usia lanjut adalah sesuatu yang harus diterima sebagai suatu kenyataan dan fenomena biologis. Kehidupan itu akan diakhiri dengan proses penuaan yang berakhir dengan kematian (Hutapea, 2005).

1. Peluang dan Ancaman

Peluang tetap ada. Keberadaan lansia sampai pada Tahun 2020 masih kecil dibanding dengan usia produktif dan angkatan kerja. Diharapkan kondisi ini tetap stabil sehingga penduduk lanjut usia tidak akan disia - siakan dan tidak berada pada keadaan miskin dan terlunta lunta. Artinya peluang kita ialah memberdayakan kemampuan produktivitas dari penduduk angkatan kerja.

Peluang ini, selaras dan konsisten dengan bahasan sebelumnya. Yang menjadi angkatan produktif pada Tahun 2020 dan 2030 adalah penduduk yang pada Tahun 2015 ada sebagian besar yang tergolong penduduk remaja dan orang muda. Program yang telah diluncurkan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan indek pembangunan berwawasan lingkungan telah menghantarkan masa depan bangsa pada kesiapan menanggung beban lansia dan balita.

Tantatangannya adalah suatu paradigma bahwa lansia itu adalah beban bagi usia produktif. Kondisi ini mengakibatkan banyak hal. Dikutip dari Butler & Lewis (1983) kaum lansia sering dianggap orang orang sebagai

kaum yang tidak berguna, karena mengalami penurunan kondisi fisik mereka. Penilaian yang terjadi secara terus menerus itu, secara tidak langsung membuat kaum lansia memiliki gambaran yang negative mengenai diri mereka sendiri di masa tua. Mereka sudah merasa lemah sebelum lemah, mereka sudah merasa tidak berdaya sebelum mereka sebenarnya masih bisa berkarya. Dengan demikian masyarakatlah yang sering menuntut lansia untuk memiliki anggapan bahwa mereka tidak lagi berdaya, dan masa tua adalah masa yang penuh dengan masa ketidakberdayaan.

Tantangan ini lebih kepada kaum lansia itu sendiri untuk tidak merasakan hal yang demikian. Akan tetapi, adalah suatu kewajiban pula bagi penduduk usia produktif dalam suatu keluarga mensejahterakan orang tuanya masing masing. Mereka harus bisa mengkondisikan orang tua mereka sebagai orang yang bukan sia sia dan tak berguna.

Terkait dengan penduduk lanjut usia, dilaporkan oleh Panjaitan dan Moeliono (2013) bahwa di luar sana, di negara negara lain sudah banyak dilakukan program oleh pemerintahnya terhadap penduduk lanjut usia ini, seperti :

- a. Amerika Serikat: *Program of All Inclusive Care for the Elderly.*

Program ini memberikan perawatan kesehatan secara menyeluruh terhadap penduduk lanjut usia seperti cek kesehatan berkala, perawatan dan pelayanan sosial.

- b. Brasil: Program *Christian Foundation for Children and Aging*.

Program ini di samping untuk anak-anak juga sama halnya terhadap penduduk lanjut usia. Di mana dilakukan pelayanan sosial dan perawatan medis terhadap lansia dan anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan

- c. China: Program *Hetong Association*.

Program ini ditujukan pada lansia dengan berbagai aspek layanan. Bahkan juga dibiayai para peneliti yang meneliti persoalan sekitar lansia untuk menemukan program-program lainnya di masa mendatang yang lebih baik. Artinya di samping layanan yang ada sekarang, juga layanan itu tetap di monitor dan dievaluasi efektivitasnya melalui riset.

- d. Singapura: Program *for Integrated Care for the Elderly*.

Program ini juga sama halnya dengan program di Amerika Serikat, yaitu pelayanan kesehatan terhadap lansia. Bahkan lebih dari itu, juga diprogramkan bagaimana agar lansia bisa hidup bersenang-senang di masa tuanya.

Dengan melihat negara lain melakukan program-program khusus untuk kehidupan penduduk lanjut usia, lalu bagaimanakah di negara kita? Paling tidak, dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memberikan *respect* dan merupakan amal

bagi penganut Agama Islam untuk memperlakukan orang tuanya yang dalam hal ini apabila telah dikategorikan lansia. Beberapa tips sederhana itu ialah :

- a. Dengarkan dengan baik apapun yang diceritakan oleh lansia kepada kita
- b. Jangan bosan untuk bertanya apa yang mereka butuhkan
- c. Sebelum ingin membantu apa yang mereka lakukan, tanya dulu apa benar mereka ingin dibantu atau tidak.
- d. Beri mereka semangat dan katakan kalau mereka itu penting bagi hidup kita

Tips itu sangat mudah dan sederhana. Hal itu penting dilakukan, karena itulah cara yang paling mudah dilakukan oleh masing masing kita terhadap lansia yang dalam hal ini adalah orang tua masing masing.

2. Lansia Berkarya

Lansia sebenarnya bukan sia sia. Masih banyak yang bisa dilakukan lansia dalam bentuk karya nyata dan memungkinkan sekali bernilai ekonomis. Pekerjaan pekerjaan yang bersifat hobby masih bisa dilakukan oleh banyak kalangan lansia seperti menjual bunga dan perhiasan lainnya.

Penurunan kondisi fisik tidak sama dengan penyakit yang diderita. Kalau penyakit yang diderita, tidak saja lansia, kaum muda dan usia produktif pun tidak akan berkarya apabila terkena penyakit. Kondisi penurunan

fisik di usia lanjut memang suatu konsekuensi tetapi tidak menjadi alasan yang sangat utama untuk menghalangi berkarya.

3. Ledakan Usia Lanjut

Sebagaimana kondisi penduduk Indonesia saat ini, dari piramida penduduk yang sudah dibahas sebelumnya, maka kecenderungan terjadinya ledakan penduduk lanjut usia akan terjadi. Lalu apakah konsekuensinya dalam dinamika kependudukan? Panjaitan dan Moeliono (2013) mengemukakan sebagai berikut :

- a. Tingginya angka konsumsi dan rendahnya angka produksi barang atau jasa.

Hal ini sangat bisa terjadi karena orang-orang yang sudah tua biasanya tidak lagi bekerja di bidang produksi, justru sebaliknya mereka akan menjadi pengkonsumsi.

Contohnya mungkin saja di Tahun 2050, orang-orang akan banyak yang membutuhkan pakaian, sedangkan jumlah industri konveksi hanya sedikit. Hal itu terjadi karena kebutuhan akan pakaian tetap banyak, sementara orang-orang yang berada di usia produktif dan berprofesi sebagai pegawai konveksi bertambah sedikit.

- b. Kelangkaan sumber energi dan sumberdaya.

Semakin banyak orang yang tinggal di satu tempat maka akan semakin besar kebutuhan akan sumberdaya. Salah satunya adalah pangan.

Contoh biasanya seorang petani bekerja hingga umur 60 tahun. Ketika ia sudah berumur 70 tahun, atau 80 tahun ia tidak akan kuat untuk kembali bertani. Bayangkan ada ledakan orang yang sudah tidak kuat bertani sedangkan usia orang-orang yang kuat bertani berkurang. Maka jumlah kebutuhan akan beras akan tetap tinggi, sementara persediaan akan lebih sedikit. Dengan demikian, kita terancam untuk mengimpor beras.

Adanya kekuatan bangsa secara ekonomis untuk mengimpor beras apabila hal itu terjadi tentu tidak ada masalah. Yang dikhawatirkan ialah kemampuan ekonomi bangsa tidak pula sanggup untuk impor beras.

c. Kebutuhan yang tinggi akan fasilitas kesehatan

Kebutuhan lansia terhadap kesehatan tentu akan semakin tinggi berbanding lurus dengan jumlah lansia itu sendiri. Yang dikhawatirkan tentu ialah sementara tenaga medis yang berprofesi dalam pelayanan kesehatan itu berkurang jumlahnya.

Semua prediksi dan estimasi di atas seyogyanya menjadi bahan untuk persiapan bagi kita di masa kini. Paling tidak, terkait tentang kenyataan keberadaan lansia dalam komposisi penduduk, dapat disikapi dengan berbagai kebijakan yang pada intinya ialah mengikuti scenario sebagai berikut :

a. Penduduk lanjut usia akan meningkat secara *significant* di masa-masa mendatang.

- b. Penduduk lanjut usia harus tetap sehat dan sejahtera
- c. Penduduk lanjut usia harus tetap bisa produktif dan aktif.
- d. Penduduk yang masih produktif dan remaja saat sekarang telah dibekali oleh kualitas yang optimal dalam menghadapi fase menjadi lansia nanti.
- e. Penduduk yang masih produktif di masa sekarang, harus memberikan tempat kepada lansia sebagai orang yang mesti dihormati dan disayangi. Perlakukan lansia dengan baik dan jangan buat suatu anggapan yang bisa mendatangkan persepsi lansia itu sendiri terhadap dirinya yang merasa menjadi beban dan tidak berguna.

Di samping itu, ada pula beberapa tips untuk kita yang belum memasuki fase lansia di saat sekarang, untuk persiapan di masa datang menjadi lansia, yaitu :

- a. Menjaga gaya hidup agar tetap sehat dan berkualitas dengan cara menjaga makanan yang sehat, berolah raga dengan teratur dan cukup istirahat.
- b. Menghindari perilaku berisiko terhadap kesehatan seperti merokok dan lain sebagainya yang tidak sehat
- c. Membiasakan hidup berencana untuk masa mendatang baik dalam hal material maupun nonmaterial. Material berarti menabung sedangkan non material bermakna menjaga sikap terhadap sesama dan sayang pada orang-orang yang berusia di bawah kita, terutama pada balita.

- d. Tingkatkan keimanan dan ibadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mampu menimbulkan sifat optimis dan lapang dada menjalani kehidupan.

F. Lingkungan Ramah Penduduk

Lingkungan ramah penduduk adalah suatu keadaan di mana lingkungan hidup dan penduduk yang tinggal di dalamnya, membentuk kesatuan yang utuh dan mencerminkan tatanan kehidupan ideal. Disebut sebagai lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di luar suatu individu di mana terjadi interaksi antara keduanya. Kehidupan ideal adalah kehidupan manusia yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Manusia yang hidup pada suatu wilayah, membentuk kelompok sosial dan dinamakan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di satu wilayah tersebut saling berinteraksi sesamanya dan dengan lingkungannya. Lingkungan di mana masyarakat itu hidup, bisa disebut sebagai lingkungan hidup yang terdiri dari komponen lingkungan biotik (makhluk hidup) dan komponen lingkungan abiotik (air, udara dan tanah, cahaya dan lain sebagainya yang bukan makhluk hidup).

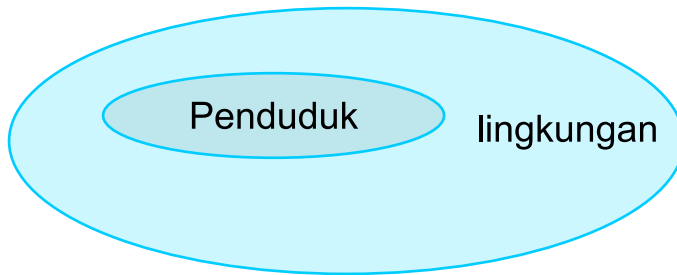
Pelestarian fungsi lingkungan, diiringi dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu akan menuju kondisi daya dukung lingkungan yang kondusif untuk tatanan kehidupan manusia yang ideal. Pelestarian fungsi lingkungan bukan berarti membiarkan apa adanya, tapi

mengandung makna melindungi dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan akan mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan (penurunan fungsi lingkungan). Pengelolaan lingkungan berarti manajemen lingkungan sehingga lingkungan mampu memberikan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dengan demikian, semakin tersimpul keterkaitan antara konsep konsep pembangunan yang telah dibicarakan di atas, dalam hubungannya dengan penduduk. Penduduk sebagai manusia yang hidup di suatu wilayah, yang mana wilayah itu disebut sebagai lingkungan hidup, akan selalu saling berinteraksi satu sama lain. Manusia membutuhkan lingkungan hidup yang berkualitas. Lingkungan hidup yang berkualitas adalah lingkungan yang sesuai dengan harapan manusia yang hidup di dalamnya. Dalam hal ini, berarti wacana pembicaraan adalah fungsi ekologis. Fungsi ekologis adalah peran peran komponen lingkungan yang ada dalam lingkungan hidup manusia, yang memiliki daya dukung berkesinambungan antar generasi.

Sementara itu, fungsi ekologis di atas tentu tidak bisa begitu saja memberikan daya dukung pada kehidupan manusia antar generasi. Dibutuhkan kearifan manusia dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup itu sehingga bisa demikian. Dalam hal ini adalah sumberdaya manusia sebagai manajerial lingkungan hidupnya diperlukan sekali.

Mustahil manusia yang hidup dalam suatu lingkungan yang ramah penduduk bisa tetap begitu selamanya, apabila manusia yang tinggal di situ, tidak memiliki kearifan terhadap pengelolaan lingkungannya. Artinya ialah bahwa terjadi keterkaitan yang saling interaktif antara penduduk yang hidup di satu wilayah dengan bagaimana lingkungan hidup yang menyertai dan berada pada wilayah itu. Penjelasan ini, bisa diilustrasikan seperti pada Gambar 2.12 berikut.



Gambar 2.13. Interaksi antara Penduduk dengan Lingkungan

Selanjutnya, kesejahteraan ekonomi dan sosial akan terwujud pada suatu penduduk apabila lingkungan tempat mereka tinggal memiliki fungsi yang sesuai dan kondusif bagi mereka. Pada tataran ini telah sampai pada keterkaitan antara fungsi ekologis, ekonomis dan sosial. Ke 3 (tiga) fungsi tersebut tak lepas dari peran manusia. Hanya manusia yang berkualitas pula lah yang bisa hidup pada lingkungan yang ramah penduduk. Karena antara keduanya berinteraksi seiring waktu.

1. Faktor dan Variabel Penentu Lingkungan Ramah Penduduk

Lingkungan ramah penduduk ditentukan oleh banyak variabel dan faktor. Variabel variabel yang ada pada kondisi lingkungan ramah penduduk adalah variabel yang ada di dalam komponen penyusun lingkungan hidup. Sementara itu, faktor yang ikut sebagai penentu adalah faktor yang berada di luar variabel tersebut.

Variabel lingkungan adalah beberapa kuantitas lingkungan yang dapat diukur atau terukur. Sedangkan faktor yang diluarnya ialah faktor manusia dengan segala perilaku perannya. Interaksi antara variabel dan faktor tersebut akan tersusun dan membentuk suatu kesatuan yang menentukan apakah lingkungan itu ramah penduduk atau tidak. Secara skematis, pernyataan di atas disajikan pada Gambar 2.13 berikut.

Pada Gambar 2.13 terlihat bahwa penduduk yang sebenarnya tak lain adalah manusia dapat dianalisis menurut perilaku dan perannya di dalam ranah lingkungan tersebut. Perilaku dan peran ini merupakan faktor yang menentukan apakah kesatuan yang akan tersusun bersama dengan lingkungan itu bisa menjadi lingkungan ramah penduduk atau tidak. Selanjutnya variabel lingkungan bisa dibedakan atas lingkungan alamiah (*natural*) dan buatan (*artificial*).

Perilaku manusia yang peduli dan cinta lingkungan adalah faktor utama, diikuti dengan faktor peran. Faktor peran adalah posisi manusia dalam hal yang

berhubungan dengan lingkungan hidup. Ada peran yang langsung dan ada pula yang tidak langsung. Peran langsung adalah manusia yang mempunyai kewenangan dan kepentingan terhadap rona lingkungan hidup. Peran tidak langsung adalah manusia yang tidak mempunyai kewenangan dan kepentingan secara langsung untuk menentukan rona lingkungan hidupnya.

Peran langsung manusia yang mempunyai kewenangan dan kepentingan ini bisa disebut sebagai *stakeholders* yang di samping mempunyai kekuasaan juga memiliki kepentingan atas suatu rekayasa lingkungan yang dianggapnya baik. Apabila para *stakeholders* memiliki perilaku yang cinta dan peduli pada lingkungan hidup, tentu variabel lingkungan hidup pun akan menjadi lingkungan yang ramah penduduk.

Sebaliknya, apabila dalam suatu komunitas, terdapat orang-orang yang berperilaku ramah terhadap lingkungan, tapi mereka tidak punya kekuasaan dan kepentingan terhadap perubahan rona lingkungan, sementara orang-orang yang berkuasa justru tidak memiliki perilaku yang ramah terhadap lingkungan maka dalam hal ini faktor penentu lingkungan ramah penduduk memiliki fungsi negative.

Faktor penentu dalam hal ini adalah “yang memberikan aksi” terhadap lingkungan alamiah. Lingkungan alamiah adalah variabel lingkungan. Selanjutnya lingkungan alamiah direkayasa menjadi lingkungan buatan. Pergeseran dari lingkungan alamiah

menjadi buatan ini, adalah sebuah proses transformasi. Dengan kata lain, aksi yang diberikan oleh faktor penentu akan membentuk suatu perubahan rona lingkungan.

Sebagaimana hukum keseimbangan energy, setiap aksi akan memberikan reaksi. Aksi – reaksi adalah keseimbangan. Sehingga apabila aksi negative yang diberikan terhadap beberapa variabel selanjutnya variabel akan merespon dengan reaksi negative pula. Lingkungan dengan segala variabel yang dimilikinya akan memberikan reaksi negative pada manusia yang telah memberikan aksi negative pula padanya.

Penjelasan di atas, bisa diterjemahkan dalam suatu contoh. Di suatu lingkungan hidup, yang didiami oleh masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah penduduk dan lingkungan di mana terjadi interaksi dengan penduduk itu disebut sebagai lingkungan hidup. Awalnya, di lingkungan hidup itu ada mata air. Mata air alami telah ada sejak dulu. Mata air yang jernih dan tak pernah kering.

Setelah masyarakat hidup didalam lingkungan tersebut, terjadi perubahan. Ada anggota masyarakat yang berperilaku tidak ramah terhadap lingkungan dengan cara menutup mata air itu untuk dijadikannya tempat pemukiman. Dalam ilustrasi ini, orang tersebut telah memberikan aksi negative terhadap komponen lingkungan. Komponen lingkungan yang dimaksud adalah variabel lingkungan alamiah berupa air.

Beberapa saat kemudian, terjadi musim kemarau. Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air. Orang-orang tua pada masyarakat itu menyesali perbuatan orang yang menutup mata air tersebut. Apabila ada orang yang datang ke tempat tersebut akan menilai bahwa lingkungan itu tidak ramah penduduk.

Orang yang tinggal di situ mengetahui persis bahwa dulu lingkungan hidup mereka pernah ramah penduduk, tapi karena perilaku salah seorang dari anggota masyarakat maka lingkungan tidak lagi ramah. Ini adalah suatu contoh bahwa suatu lingkungan alamiah yang ramah pada awalnya bisa menjadi tidak ramah karena perbuatan manusia.

Ilustrasi sebaliknya. Suatu lingkungan alami yang gersang, tandus dan tidak ada ketersediaan sumber air alamiah. Kemudian beberapa manusia hidup didalamnya membentuk suatu komunitas. Komunitas itu mulai melakukan upaya bercocok tanam. Pada lahan-lahan kritis dilakukan beberapa perlakuan seperti pengapuran, pemberian bahan organik berupa pupuk kandang, selanjutnya ditanami dengan tanaman. Untuk kebutuhan air mereka melakukan pengelolaan lingkungan dengan cara membuat irigasi teknis dari hulu sungai dari wilayah lain yang dialirkan ke wilayahnya dengan aliran tersier.

Pada contoh kedua ini adalah upaya manusia yang mengelola lingkungan alamiah untuk mendukung kesejahteraan manusia atau penduduk. Setelah beberapa generasi kemudian, orang lain datang ke

daerah itu. orang yang datang tersebut menyaksikan lingkungan yang hijau, air mengalir dan lain sebagainya. Lingkungan ramah lingkungan pun menjadi prediket bagi masyarakat di situ. Padahal dulunya lingkungan tersebut pernah tidak ramah.

Dari kedua ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan ramah penduduk tersusun atas faktor manusia dan variabel lingkungan alamiah dan buatan. Keduanya membentuk rona lingkungan yang akan menentukan prediket apakah bisa dinilai sebagai lingkungan ramah lingkungan atau tidak. Kembali persoalan berpulang kepada penduduk. Penduduk berarti merujuk pada manusia. Manusia disini ditentukan oleh peran dan perilakunya. Sebagaimana yang kita ketahui perilaku muncul dari adanya sikap dan pengetahuan. Keduanya juga merupakan cikal bakal dari sebuah karakter. Sementara karakter tidak begitu saja muncul pada manusia. Karakter berkembang dan bisa berubah. Kesimpulan akhir kita ialah bahwa karakter penduduk akan menentukan apakah suatu lingkungan ramah penduduk atau tidak.

2. Indikator Lingkungan Ramah Penduduk

Lingkungan ramah penduduk secara visual dan dirasakan akan berbeda dengan lingkungan yang tidak ramah lingkungan. Secara visual berarti dapat diindikasikan secara penglihatan. Apabila terlihat suatu lingkungan yang indah, dan dirasa kenyamanan untuk tinggal didalamnya maka kita sedang berada pada lingkungan ramah penduduk.

Sebaliknya, apabila kita sedang berada pada suatu kawasan tempat tinggal, lalu kita mengamati lingkungan sekitar, dan terlihat tidak bersih, dan suasana hati merasa tidak nyaman dan enggan untuk ikut tinggal di situ maka itu artinya lingkungan itu tidak ramah lingkungan.

Hal di atas adalah indikator berdasarkan panca indera dan perasaan manusia. Tapi tentu saja ini belum bersifat umum atau universal. Karena bersifat subjektif. Oleh karena itu, dapat ditentukan indikator lingkungan ramah penduduk itu berdasarkan (1) suasana lingkungan, (2) layanan akses dasar, (3) sarana dan prasarana pendukung.

Suasana lingkungan yang dimaksudkan adalah unsur yang bisa diamati, didengar dan dirasakan oleh manusia untuk menilai suatu kondisi lingkungan, baik lingkungan fisik yang terdiri dari makhluk hidup dan tidak hidup maupun lingkungan sosial. Contoh yang masuk ke dalam suasana lingkungan ini ialah sebagai berikut:

a. Asri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asri berarti indah dan sedap dipandang mata. Cakupan asri ini sangat luas. Mulai dari kebersihan fisik, higienis dan sanitasi lingkungan yang terjaga, dan lain sebagainya yang apabila dipandang, akan mendatangkan rasa yang positif di dalam hati. Contohnya suasana pemandangan alam, ataupun lingkungan taman yang merupakan buatan manusia.

b. Nyaman.

Nyaman berarti suasana lingkungan yang mendatangkan rasa ketenangan, senang dan bebas dari gangguan. Gangguan yang dimaksudkan di sini ialah gangguan dari faktor lingkungan seperti bebas dari kebisingan, dan pencemaran udara seperti asap, kabut dan debu, serta pada komponen lingkungan yang lainnya. Menurut KBBI nyaman berarti segar dan sehat.

c. Aman.

Suatu keadaan lingkungan yang tidak ada gangguan dari manusia dan makhluk hidup lain, maupun risiko atau potensi bahaya yang dapat dirasakan. yang berada pada lingkungan. Contohnya adalah apabila tinggal di hunian yang mewah tak jarang disediakan pos keamanan dan petugas keamanan demi mendatangkan rasa keamanan pada orang orang yang tinggal di dalamnya.

Ke tiga aspek di atas merupakan suasana yang ada di dalam lingkungan yang ramah penduduk. Kondisi yang demikian sangat tak ternilai harganya. Pada dasarnya semua manusia yang hidup pada suatu lingkungan menginginkan suasana yang demikian.

Selanjutnya ialah layanan akses kebutuhan dasar. Maksudnya ialah terjangkaunya kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan terhadap air bersih, listrik, telekomunikasi dan lain sebagainya. Contoh beberapa point yang dijadikan standard dan indikator yang masuk ke dalam akses dasar ini ialah :

a. Akses air bersih.

Manusia sepanjang peradapan selalu memulai suatu kehidupan untuk menetap pada lingkungan yang memiliki sumber air bersih. Hal ini disebabkan fungsi air bagi kehidupan sangat vital. Sehingga lingkungan ramah penduduk berarti pada lingkungan tersebut akses terhadap air bersih terjamin.

b. Akses listrik

Listrik sebagai sumber penerangan bagi manusia mesti tersedia pada lingkungan yang disebut sebagai ramah penduduk. Di samping untuk penerangan, sumber energy listrik telah menjadi kebutuhan dasar untuk aktivitas manusia saat ini.

c. Akses internet

Pada masa sekarang, akses terhadap teknologi informasi melalui internet merupakan hal yang sudah lekat dan dekat serta sangat dibutuhkan oleh manusia. Ini adalah suatu perkembangan teknologi yang telah masuk ke dalam gaya hidup manusia saat ini. Informasi melalui media cetak sudah mulai kurang digemari. Orang-orang akan merasa lebih efektif dan efisien dengan cukup melalui seluler mendapatkan informasi dan data lain yang diperlukan.

Tidak hanya itu, lingkungan ramah penduduk juga memiliki sarana dan prasarana pendukung aktivitas manusia sehari-hari. Sarana dan prasarana tersebut berupa infrastruktur yang memfasilitasi mobilitas dan aktivitas manusia, seperti jalan, jembatan dan lain sebagainya.

Perbedaan lingkungan ramah penduduk dengan yang tidak ramah penduduk terkait akses dan sarana prasarana pendukung ini terletak pada bagaimana akses dan sarana infrastruktur itu dalam hubungannya dengan lingkungan yang asri. Artinya, keberadaan layanan akses untuk kebutuhan dasar dan infrastruktur itu, tidak menyalahi kaidah kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Contohnya ialah pembangunan sarana transportasi pada suatu pemukiman tempat tinggal, di mana jalan atau jembatan yang dibangun, tidak merusak fungsi lingkungan yang ada.

Masing masing indikator di atas sebenarnya merupakan peningkatan fungsi ekologis. Dapat dipahami kemampuan lingkungan untuk memberikan daya dukung terhadap kehidupan manusia. Tapi perlu diingat bahwa hal yang demikian tidak terjadi begitu saja. Karena disitulah peran dan fungsi manajerial manusia terhadap lingkungannya. Terlihat dari indikator di atas, seperti akses listrik dan internet merupakan sumberdaya lingkungan berupa lingkungan buatan.

3. Implikasi Lingkungan Ramah Penduduk

Dari uraian di atas, setelah dipahami faktor dan variabel penentu lingkungan ramah penduduk beserta indikatornya, selanjutnya akan dibahas dalam hal implikasinya. Implikasi yang dimaksud ini akan memberikan makna manfaat dan kegunaan lingkungan ramah penduduk ini dan apa relevansinya dalam kajian kependudukan.

Sepanjang hidupnya manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Sementara itu lingkungan senantiasa berubah. Perubahan lingkungan yang terjadi bisa terjadi secara alamiah dan bisa pula sebagai hasil kreasi manusia. Setiap perubahan yang terjadi, selalu mempunyai akibat dan dampak. Akibat dari suatu perubahan dapat dirasakan langsung oleh manusia maupun komponen lingkungan hidup yang lain. Sementara itu, dampak perubahan bisa terjadi secara tak langsung pada saat itu juga, dan bisa efeknya jangka panjang dan memiliki *spectrum* yang luas.

Dengan demikian, lingkungan berkontribusi terhadap kualitas hidup manusia yang ada didalamnya. Apabila kondisi lingkungan yang tidak bersih, tidak sehat dan tidak ada akses air bersih dan penerangan serta akses informasi maka penduduk yang hidup di dalamnya mempunyai kecenderungan tidak sehat secara fisik dan psikis, dan ketertinggalan dalam informasi. Kondisi yang begini sudah dapat dipastikan adalah penduduk yang belum berkualitas.

Implikasi lingkungan ramah penduduk adalah terbentuknya masyarakat yang berkualitas dalam hal kesehatan. Sehat secara fisik karena memiliki akses air bersih sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan. Sehat secara psikis karena suasana asri. Di samping itu, penduduk itu pun memiliki pengetahuan karena akses informasi. Selanjutnya dengan adanya akses listrik, memungkinkan sekali penduduk itu untuk mengembangkan potensi dirinya dalam berkarya dan berkreasi.

Dalam topik isu kependudukan, dari lingkungan ramah lingkungan ini dapat berimplikasi pada kesiapan penduduk Indonesia mencapai Indonesia emas pada Tahun 2045. Karena generasi yang akan hidup dan menempati komposisi di tiap level piramida kependudukan saat itu adalah generasi yang telah dikondisikan dan mengkondisikan lingkungan ramah penduduk. Dengan kata lain, penduduk berkualitas telah terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan ramah penduduk.

4. Permasalahan dalam Mewujudkan Lingkungan Ramah Penduduk

Terwujudnya lingkungan ramah lingkungan bukan hal yang mudah. Tapi juga bukan berarti tidak bisa diwujudkan. Jika hal itu mudah, tentu sudah hampir semua wilayah kita di Indonesia telah menjadi lingkungan ramah penduduk. Tapi jika tidak bisa diwujudkan, kenyataannya ada beberapa wilayah dalam skala lingkungan mikro yang sudah berprediket lingkungan ramah penduduk.

Berarti ada beberapa hal yang menjadi kendala / permasalahan untuk mewujudkan lingkungan ramah penduduk. Sehingga dengan adanya kendala ini, maka tidak seluruh wilayah bisa menjadi lingkungan ramah penduduk. Terkait dengan masalah mewujudkan lingkungan ramah penduduk ini, bisa dicermati di tiap aspek yang ada dalam lingkungan ramah lingkungan itu sendiri. Seperti yang telah diuraikan, bahwa lingkungan ramah lingkungan itu terdiri dari faktor manusia dan

variabel lingkungan. Ke dua nya berinteraksi, disamping sesama manusia itu juga terjadi intra aksi. Begitu juga dengan variabel lingkungan yang berinteraksi satu sama lain.

Interaksi komponen lingkungan adalah siklus alamiah seperti siklus energy, siklus hidrologi dan siklus materi. Masing masing komponen dalam siklus tersebut sesuai dengan fungsinya membentuk keseimbangan alamiah. Sehingga melestarikan fungsi lingkungan yang dimaksud itu sebenarnya mempertahankan fungsi masing masing komponen lingkungan itu sehingga memiliki daya dukung antar generasi.

Oleh karena itu, masalah yang ada dalam mewujudkan lingkungan ramah penduduk itu dapat dirinci menjadi 2, yaitu :

a. Masalah pada manusia.

Masalah pada manusia berhubungan dengan perilaku dan karakter manusia itu sendiri. Tentu saja akar permasalahannya terletak pada kualitas manusia. Manusia yang mengutamakan eksploitasi sumberdaya lingkungan untuk kepentingannya tidak akan pernah memberikan dampak pada lingkungan yang akan menuju ramah penduduk.

Dalam hal ini kendala yang mendasar adalah :

- i. Karakter dan perilaku yang belum cinta dan berbudaya lingkungan.

- ii. Tingkat pendidikan yang belum optimal
- iii. Pelaksanaan fungsi pendidikan belum optimal, sehingga prinsip pendidikan sebagai perubahan perilaku dan pembentukan karakter belum sampai ke arah itu.
- iv. Tidak tegaknya hukum, dan nilai serta perilaku moral yang mulai luntur di tengah masyarakat. Hal ini berhubungan dengan kearifan lokal yang mulai pupus satu per satu.

b. Masalah pada lingkungan

Masalah pada lingkungan secara umum berhubungan dengan kondisi alamiah. Misalnya terjadinya bencana alam dan atau rona lingkungan alamiah memang sudah terbentuk alamiah yang diluar kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Contohnya pada lingkungan alamiah lahan lahan rawa dan gambut. Pada rona lingkungan alamiah seperti ini, memang akses untuk mendapatkan air bersih dan keberadaan sumber air bersih tidak ada.

Tapi disinilah peran manusia dengan ilmu dan teknologi yang ditopang dengan karakter peduli lingkungan, sehingga lingkungan alamiah yang tidak mendukung kehidupan dan kesejahteraan manusia bisa direkayasa menjadi lebih baik.

Dalam merekayasa lingkungan dibutuhkan cara pandang yang terintegrasi antara kepentingan ekonomis, sosial dan ekologis, sehingga fungsi

lingkungan justru meningkat selaras dengan peningkatan tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Bukan berarti untuk kesejahteraan sosial lalu manusia mengembangkan rekayasa lingkungan tanpa memperhatikan fungsi dari masing masing komponen lingkungan yang telah ada. Hal ini justru tidak akan mewujudkan lingkungan ramah penduduk.

5. Mewujudkan Lingkungan Ramah Penduduk

Mewujudkan lingkungan ramah penduduk berarti memuat serangkaian upaya sistematis dan terencana. Sedangkan pelakunya adalah manusia, tapi akan lebih efektif jika dilakukan oleh semua manusia yang menempati suatu lingkungan tempat tinggal. Apabila hanya dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang saja, maka lingkungan ramah penduduk tidak akan tercapai.

Istilah lingkungan yang dibahas di sini bersifat relative dalam hal luasannya. Maksudnya ialah bahwa lingkungan itu bisa dipandang dalam ukuran besar dan bisa pula dalam ukuran kecil tergantung topik yang dijadikan fokus kajian. Lingkungan mempunyai tingkatan luasan, seperti dari segi kewilayahan administrative, dimulai dari tingkat terendah seperti RT, RW, kelurahan, kecamatan dan sampai pada tingkat kota. Selanjutnya tingkat provinsi dan sampai pada negara.

Di samping itu, lingkungan bisa dipandang dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, komunitas, populasi, ekosistem dan biosfer. Level yang demikian didasari pada interaksi yang terbentuk dan komponen lingkungan yang berinteraksi di dalamnya. Apabila sel yang sama membentuk satu kesatuan, menjadi jaringan, maka di luar jaringan itu bisa disebut sebagai lingkungannya. Dalam skala yang lebih besar lagi, organisme yang sejenis membentuk interaksi pada suatu lingkungan hidupnya yang disebut habitat, akan membentuk suatu komunitas. Pada tingkatan yang lebih luas lagi, komunitas komunitas yang tersebar tersebut disebut sebagai populasi.

Contohnya sebutan populasi manusia, berarti ruang lingkungannya sangat luas. Artinya kita sedang membicarakan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi apabila komunitas di suatu ekosistem berarti skala luasannya lebih kecil. Misalnya komunitas masyarakat nelayan yang hidup di daerah pesisir. Secara ekologis, komunitas masyarakat itu adalah orang orang yang hidup di dalam suatu ekosistem pesisir. Tapi dalam kajian ilmu lingkungan, nelayan dan pesisir itu dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi karena terjadi interaksi yang kuat baik sesama nelayan, maupun antara nelayan dengan lingkungannya.

Dengan demikian, apabila ingin mewujudkan lingkungan ramah penduduk, maka dimulai dari ruang lingkup lingkungan yang dimaksud. Bisa saja lingkungan dalam batasan tempat tinggal, ataupun lebih luas dari itu.

Dalam bahasan ini, kita akan diperkenalkan dengan istilah “*think global act locally*”. Artinya ialah kita boleh berfikir tentang lingkungan secara global dan luas, bahkan kita memikirkan planet bumi dari segala persoalannya terkait perubahan iklim dan lain sebagainya. Tapi bisakah kita berbuat untuk menyelamatkan bumi dari masalah itu sendiri? Tentu tidak. Sehingga berbuatlah di lingkungan sendiri.

Dengan demikian, beberapa upaya dalam mewujudkan lingkungan ramah penduduk ini ialah :

- a. Dimulai dari diri sendiri untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup.
- b. Ikut bergabung dengan komunitas atau kelompok / institusi / lembaga apa pun yang bisa diikuti yang berperan aktif terhadap upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di manapun kita berada.
- c. Bagi *stakeholders* di bidang lingkungan, bekerja dengan hati dan dengan niat ikhlas untuk membuat lingkungan ramah penduduk dimanapun berada.
- d. Mendidik anak atau generasi muda untuk berbudaya dan cinta lingkungan, baik di rumah oleh orang tua, di pendidikan formal bagi tenaga pendidik profesional dan pada generasi muda di tengah masyarakat.

Selanjutnya, upaya yang dilakukan berdasarkan peran atau pembagian dalam struktur suatu negara, dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pemerintah

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang berdaulat pada suatu wilayah mempunyai hak untuk menegakkan aturan dan kebijakan, sekaligus menyediakan dan menjalankan sistem evaluasi dan kontrol sampai pada supremasi hukum.

Oleh karena itu, terkait tentang lingkungan ramah penduduk, peran pemerintah dalam hal ini lebih kepada peran pengatur (*regulator*).

b. Lembaga / perusahaan / instansi swasta.

Sebagai pihak swasta, fungsi pengatur tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan wilayah kewenangannya di lingkungan internal. Penegakkan aturan dan etika lingkungan bisa diterapkan pada setiap orang orang yang ada di dalamnya. Dengan demikian, sikap hidup untuk peduli lingkungan menjadi kebiasaan dan membentuk sebuah budaya di mana pun orang orang itu berada, baik di tempat kerja maupun di rumahnya.

Di samping itu, perusahaan swasta dituntut untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Sebuah bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan karena dampak dari aktivitas perusahaannya.

Prinsip CSR adalah salah satu bentuk nyata dari apa yang dikemukakan oleh Ronald Coase : "*polluter pays*" (siapa yang mencemari, maka dia yang membayar

akibatnya). Tentu demikian seharusnya. Karena si penerima dampak dalam hal ini sesungguhnya pihak yang dirugikan.

Indonesia menganut prinsip "*polluter pays*" yang dituang dalam Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Adanya seperangkat hukum dan perundangan terhadap PPLH ini merupakan salah satu peran yang dijalankan pemerintah dalam upaya lingkungan ramah penduduk. Akan tetapi, optimal tidaknya suatu aturan tentu tidak dinilai dari konsep dan substansi aturan tersebut, tapi dinilai dari bagaimana implementasi dan penegakkan aturan itu sendiri.

Mewujudkan CSR bagi perusahaan swasta pada prinsipnya memiliki 3 (tiga) alasan, yaitu (1) alasan amal dengan mendirikan yayasan amal yang konsentrasi terhadap lingkungan hidup, (2) alasan patuh pada hukum, dengan melakukan CSR dan melaporkannya pada pemerintah dan (3) alasan etika lingkungan hidup sebagai salah satu komponen dalam menjalankan budaya dan etika bisnis.

c. Lembaga masyarakat.

Lembaga masyarakat yang dimaksud adalah kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non profits. Lembaga swadaya masyarakat yang fokus terhadap upaya perlindungan lingkungan cukup

banyak di tanah air. Diharapkan agar para aktivis lingkungan hidup tetap konsisten bersama lembaga swadaya masyarakat menyuarakan pelestarian dan perlindungan lingkungan ke depan.

6. Pendekatan Lingkungan Ramah Lingkungan

Dalam praktisnya, semua upaya yang telah diuraikan di atas, sudah dilaksanakan, hanya saja mungkin belum optimal. Terdapat 4 (empat) pendekatan dalam upaya mewujudkan lingkungan ramah penduduk ini, yaitu :

a. Pendekatan legalitas.

Pendekatan ini dilandaskan kepada seperangkat aturan hukum dan kebijakan. Maksudnya adalah penegakkan aturan dan hukum yang telah ada untuk melindungi lingkungan hidup dari peristiwa degradasi lingkungan, baik karena pencemaran maupun kerusakan lingkungan.

b. Pendekatan ekonomi kreatif

Pendekatan ini dilandaskan pada pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang lebih kepada ekonomi kreatif yang tidak menguras sumberdaya alam. Contohnya usaha daur ulang sehingga barang yang tidak berguna menjadi bernilai ekonomis.

c. Pendekatan teknologis

Pendekatan ini dilandaskan pada penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Pendekatan spiritual, sosial dan budaya

Pendekatan ini dilandaskan pada keyakinan agama yang memerintahkan makhluk Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga lingkungan hidup. Atau berlandas pada kontrol sosial di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya peduli lingkungan.

G. Rangkuman

1. Dinamika Kependudukan

Dinamika penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Perubahan tersebut terjadi secara terus menerus dari tahun ke tahun, akibatnya jumlah penduduk mengalami perubahan secara dinamis. Jumlah penduduk didefinisikan sebagai banyaknya penduduk yang ada pada satu wilayah administrative yang dihitung pada satuan waktu tertentu. Sedangkan pertumbuhan penduduk ialah besarnya pertambahan penduduk yang ada pada satu wilayah per satuan waktu. Sedangkan yang dimaksud sebagai penduduk ialah setiap warga negara yang tinggal di wilayah tertentu, dalam waktu enam bulan atau lebih, dan mempunyai keinginan untuk menetap.

Persamaan jumlah dan pertumbuhan penduduk secara matematis ialah sebagai berikut :

$$P_t = P_0 + B - D + I - E$$

Di mana :

P_t : Jumlah penduduk pada waktu t

P_0 : Jumlah penduduk tercatat sebelum waktu t

B : Jumlah kelahiran

D : Jumlah kematian

I : Jumlah imigrasi

E : Jumlah emigrasi

Tujuan mempelajari jumlah dan pertumbuhan penduduk ini adalah sebagai landasan untuk mencermati permasalahan kependudukan yang ada, selanjutnya bisa dijadikan dasar dan acuan untuk melahirkan kebijakan yang relevan sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

Relevansi jumlah dan pertumbuhan penduduk dalam pembangunan kependudukan adalah bahwa jumlah dan pertumbuhan penduduk merupakan kondisi kuantitas penduduk. Sementara itu, penduduk adalah sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga apabila ada masalah di dalam kependudukan, hal itu menjadi potensi dan permasalahan besar bagi pembangunan yang dilaksanakan.

Masalah kependudukan secara umum dipandang dari masalah kuantitas dan kualitas penduduk itu. Dapat dirinci permasalahan penduduk sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk besar.
- b. Pertumbuhan penduduk yang cepat.
- c. Distribusi / penyebaran penduduk yang tidak merata

- d. Banyaknya pengangguran, yang berarti penduduk di usia produktif tapi tidak produktif.
- e. Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan, kompetensi dan keahlian yang belum optimal.

2. Penduduk Remaja

Penduduk remaja (umur 15 – 19 tahun) dan orang muda (umur 10 – 14 tahun) adalah generasi penerus bangsa dan pelaksana pembangunan di masa depan. Pada kondisi saat ini, mereka belum termasuk kelompok penduduk produktif. Tetapi di masa mendatang, menjadi penduduk usia produktif yang akan mempunyai tanggungan.

Peningkatan kualitas penduduk remaja dan usia muda mutlak dilakukan dalam kesiapan bangsa menghadapi masa depan. Kualitas penduduk berupa peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan untuk memiliki keterampilan dan kompetensi yang berguna bagi dirinya, masyarakat, nusa dan bangsa. Terkait hal ini, pembangunan kependudukan mesti melibatkan dimensi dan sektor pendidikan dan kesehatan. Karena masalah kependudukan bukan masalah yang bisa diselesaikan oleh BKKBN saja.

3. Penduduk Lanjut Usia

Penduduk lanjut usia tergolong penduduk yang tidak produktif. Dalam komposisi penduduk Indonesia saat ini, penduduk lansia memiliki jumlah yang sedikit dibanding dengan penduduk angkatan kerja. Penduduk lanjut usia

adalah orang-orang yang telah mengalami penurunan fungsi fisiknya sehingga cenderung dianggap tidak bisa berkarya dan menjadi beban tanggungan semata.

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan generasi sekarang untuk menghadapi masa tuanya. Banyak cara yang bisa dilakukan seperti gaya hidup yang sehat dan selalu berkarya.

4. Bonus Demografi

Bonus demografi ialah suatu keadaan keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang. Bonus demografi terjadi karena penurunan kelahiran yang dalam jangka panjang menurunkan proporsi penduduk muda, sehingga investasi untuk pemenuhan kebutuhannya berkurang dan sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dengan demikian, perubahan struktur umur penduduk dan menurunnya beban ketergantungan memberikan peluang yang disebut bonus demografi atau *demographic dividend*. Kondisi bonus demografi akan diiringi dengan munculnya suatu kesempatan, yang disebut sebagai *window of opportunity* yang dapat dimanfaatkan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat.

Peluang itu hanya terjadi sekali dalam riwayat kependudukan suatu bangsa di dunia, sehingga akan sangat rugi jika Indonesia tidak bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. Puncak bonus demografi terbaik Bangsa Indonesia adalah pada Tahun 2020 – 2030, di mana pada saat itulah angka ketergantungan penduduk memiliki angka paling kecil.

5. Lingkungan Ramah Penduduk

Lingkungan ramah penduduk merupakan kondisi yang paling kondusif dari daya dukung lingkungan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi penduduk pada suatu wilayah. Hal ini dapat terjadi karena interaksi antara penduduk yang tinggal pada suatu lingkungan, dengan rona lingkungan alamiah yang ada.

Terdapat 4 (empat) pendekatan dalam upaya mewujudkan lingkungan ramah penduduk ini, yaitu (1) pendekatan legalitas, yang dilandaskan pada seperangkat aturan hukum dan kebijakan. Maksudnya adalah penegakkan aturan dan hukum yang telah ada untuk melindungi lingkungan hidup dari peristiwa degradasi lingkungan, baik karena pencemaran maupun perusakan lingkungan, (2) pendekatan ekonomi kreatif, yang dilandaskan pada pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang lebih kepada ekonomi kreatif yang tidak menguras sumberdaya alam, (3) pendekatan teknologis, di mana pendekatan ini dilandaskan pada penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari,

(4) pendekatan spiritual, sosial dan budaya, yang dilandaskan pada keyakinan agama yang memerintahkan makhluk Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga lingkungan hidup.

MATERI 3

KARAKTER PENDUDUK BERKEBANGSAAN

A. Pendahuluan

Secara umum, isu terkait karakter penduduk berkebangsaan atau yang lazim didengar saat ini yakni Revolusi Mental bukanlah suatu isu baru, jauh sebelum ini Presiden Soekarno telah medengungkan kalimat Revolusi Mental tersebut dalam pidatonya pada tahun 1957, dimaksudkan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala, dengan tujuan lebih memperkuat kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.

Sebelum membahas lebih dalam tentang penduduk berkarakter kebangsaan, penulis terlebih dahulu menghantarkan satu persatu definisi tentang apa itu kependudukan dan apa itu karakter kebangsaan.

Studi kependudukan adalah studi yang berkenaan dengan segala aspek yang berhubungan dengan tingkat kemakmuran penduduk, baik pada wilayah tertentu maupun di permukaan bumi umumnya, yang melingkupi tidak hanya terbatas pada demografi, tetapi juga meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, psikologi, history, geografi, serta menyangkut mental, tradisi, hubungan antar individu, keruangan dan kemakmuran.

Seperti yang diketahui bersama masalah kependudukan merupakan masalah yang berkenaan dengan tingkat kemakmuran penduduk, khususnya tingkat kemakmuran

yang sangat rendah. Variabel utama yang menjadi penyebab masalah kependudukan, yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat, dan keduanya adalah pertumbuhan bahan kebutuhan primer yang tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk. Ketidakseimbangan kedua variabel inilah yang menjadi dasar masalah kependudukan.

Dewasa ini masalah kependudukan bukan hanya merupakan masalah lokal maupun regional melainkan sudah menjadi masalah internasional. Kependudukan telah disadari sebagai salah satu masalah besar. David L. Sill (Sumaatmadja, 2008: 226) mengemukakan 5 masalah besar di dunia dewasa ini yakni; (1) *peace* atau perdamaian, (2) *prejudice* atau purbasangka, (3) *population* atau penduduk, (4) *poverty* atau papamiskin, dan (5) *pollution* atau pencemaran.

Dari lima masalah besar yang dikemukakan tersebut, masalah penduduk merupakan salah satu diantaranya. Masalah kependudukan ini tidak dapat dilepaskan dari masalah besar lainnya, baik yang menyangkut masalah kemiskinan dan pencemaran, maupun yang berkenaan dengan prasangka dan perdamaian. Meadows (1972: 29) mengaitkan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang cepat dengan pertumbuhan kebutuhan-kebutuhannya yang diungkapkan pada pertumbuhan industrialisasi, pertumbuhan produksi pangan, dan pertumbuhan konsumsi.

Pertumbuhan variabel-variabel tadi jika tidak diubah dan dikendalikan akan menghasilkan pertumbuhan pencemaran yang mempengaruhi batas pertumbuhan dunia. Secara

keseluruhan masalah ini akan mengancam kapasitas pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan mengancam kelestarian kehidupan penduduk di planet bumi.

Sementara itu, Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan akibat dari keputusan yang dibuatnya (Suyatno, 2009). Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*).

Menurut Thomas Lickona, tanpa ketiga aspek ini, pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, peserta didik akan memiliki kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis (Suyatno, 2009). Untuk memenuhi keberhasilan akademis yang dimaksud, Pusat Pengembangan Kurikulum (PUSKUR, 2010)) telah mengembangkan konsep pendidikan budaya dan karakter bangsa dan menuangkannya dalam suatu dokumen resmi yang berjudul “Pedoman Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa di Sekolah”.

Dalam dokumen tersebut “budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan (*belief*) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya”. Sedangkan karakter dimaknai sebagai “watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakininya dan digunakannya sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, hormat kepada orang lain, dan sebagainya.

Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dan pengertian pendidikan yang dinyatakan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka “pendidikan budaya dan karakter bangsa” diartikan sebagai proses internalisasi serta penghayatan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang dilakukan peserta didik secara aktif di bawah bimbingan guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan serta diwujudkan dalam kehidupannya di kelas, sekolah, dan masyarakat.

Rumusan di atas, tetap menampilkan konsep pendidikan ideal yang secara umum menanamkan pengetahuan (kognitif), menanamkan nilai-nilai atau sikap (afektif), dan melatih keterampilan (psikomotorik) kepada para peserta

didik untuk mempersiapkan masa depannya yang lebih baik. Karakter adalah '*distinctive trait, distinctive quality, moral strength, the pattern of behavior found in an individual or group*'. Kamus Besar Bahasa Indonesia memang belum memasukkan kata karakter, yang ada adalah kata 'watak' yang diartikan sebagai: sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku; budi pekerti; tabiat. Jadi, dapat diartikan secara umum bahwa karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi 'positif'. Orang berkarakter adalah orang punya kualitas moral tertentu yang positif.

Dengan demikian pendidikan membangun karakter secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau yang baik, bukan yang negatif atau yang buruk. Karakter atau watak adalah ekspresi dari keseluruhan nilai-nilai yang kita taati. Karakter seseorang merupakan ekspresi dari suatu moralitas. Kini, krisis moral tengah melanda para generasi bangsa, sebagai akibat pergeseran (*shift*) nilai-nilai yang berdampak terhadap warna moralita bangsa.

Pembentukan karakter bukanlah hal yang mudah. Karakter dibangun dari berbagai aspek yang mendukungnya dan melalui proses yang berkelanjutan serta komitmen yang kuat. Dengan demikian, pembentukan karakter perlu waktu panjang, dari masa kanak-kanak sampai usia dewasa ketika seseorang mampu mengambil keputusan mengenai dirinya sendiri.

Di era globalisasi, karakter yang kuat memiliki peran yang sangat strategis dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas yang memiliki integritas yang tinggi sebagai bangsa Indonesia. Berkaitan dengan tantangan besar bangsa yang dihadapi, kita perlu menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui pendidikan karakter berbasis nilai. *Re-discovery*, revitalisasi, atau *invented tradition* nilai-nilai sosial-budaya kebangsaan perlu dilakukan melalui medium pendidikan karakter bagi generasi bangsa sebagai figur generasi bangsa.

Untuk itu, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda perlu dirancang sebagai wahana sistemik dengan tujuan:

- a) Mengembangkan potensi afektif generasi bangsa sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa
- b) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku generasi bangsa yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius
- c) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab generasi bangsa sebagai penerus bangsa
- d) Mengembangkan kemampuan generasi bangsa menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan
- e) Mengembangkan kreativitas dan persahabatan dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (*dignity*).

Bila ditilik kandungan isi dari tujuan di atas, pendidikan karakter bukan berbobot pada transfer of knowledge tetapi lebih memiliki kedudukan sebagai *transfer of values*. Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter Kebangsaan dikembangkan dengan bersumber pada:

- a) Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama. Secara politis kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.
- b) Pancasila: negara Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut. Artinya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi dan kemasyarakatan diatur dalam pasal-pasal UUD 1945. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan dan kemauan, dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupannya sebagai warga negara.
- c) Budaya, adalah suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut.

Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam memberi makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat tersebut. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai-nilai dari pendidikan budaya dan karakter bangsa.

- d) Tujuan Pendidikan Nasional; tujuan pendidikan nasional adalah kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Di dalam tujuan pendidikan nasional terdapat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki seorang warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa dibandingkan ketiga sumber yang disebutkan di atas.

Pendidikan karakter berbasis kebangsaan, sejak awal kemerdekaan sebenarnya telah terpikirkan oleh Bung Karno sebagai salah satu pendiri bangsa yang dengan tegas menyatakan pentingnya *nation and character building*. Pengisian kemerdekaan, bukan hanya menekankan pembangunan *welfare-state*, tetapi juga pembangunan karakter bangsa yang kuat untuk membedakan dengan bangsa-bangsa lainnya.

Dalam penanaman karakter, pendidikan memiliki fungsi yang paling utama. Pendidikan, baik dalam keluarga (in-formal), masyarakat (non-formal) maupun di sekolah (formal)

memiliki peran yang sangat penting. Melalui sinergi tiga lingkungan pendidikan ini, proses pembelajaran karakter terjadi sepanjang hayat, untuk membentuk watak dan mengembangkan potensi diri, sehingga terbentuk kepribadian unggul, cerdas, kreatif, inovatif dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, baik secara lokal, nasional maupun global.

Sekaitan dengan paparan Pendidikan Karakter di atas, diharapkan pendidikan karakter bagi generasi bangsa dapat mengembalikan peran generasi bangsa dalam pembangunan karakter bangsa, yakni perannya sebagai patriotis, nasionalis yang inklusif, intelektualis yang moralis. Untuk menginternalisasi ketiga karakter tersebut bagi generasi bangsa, maka pendidikan karakter harus dirancang dengan membekali beberapa kompetensi, yakni:

1. Kompetensi personal, kemampuan dasar yang berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan kepribadian diri peserta didik sebagai makhluk individu yang merupakan hak dan tanggung jawab personalnya. Kompetensi yang dikembangkan adalah pembentukan konsep dan pengertian diri, sikap objektif terhadap diri sendiri, aktualisasi diri, kreativitas diri, kemandirian itu sendiri, termasuk bagaimana menumbuhkembangkan budi pekerti luhur, disiplin dan kerja keras serta sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga perlu menumbuhkembangkan dan memantapkan keimanan dan ketaqwaannya.

2. Kompetensi sosial, kemampuan dasar yang berkaitan dengan pengembangan kesadaran sebagai makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya. Kompetensi yang dikembangkan adalah kesadaran dirinya sebagai anggota masyarakat sehingga perlu saling menghormati dan menghargai; pemahaman dan kesadaran atas kesantunan hidup bermasyarakat dan berbangsa; kemampuan berkomunikasi dan kerja sama antara sesama; sikap pro-sosial atau altruisme; kemampuan dan kepedulian sosial termasuk lingkungan; memperkokoh semangat kebangsaan, pemahaman tentang perbedaan.
3. Kompetensi intelektual, merupakan kemampuan berpikir yang didasarkan pada adanya kesadaran atau keyakinan atas sesuatu yang baik yang bersifat fisik, sosial, psikologis, yang memiliki makna bagi dirinya maupun orang lain. Kompetensi yang dikembangkan adalah daya pikir untuk menerima dan memproses serta membangun pengetahuan, nilai dan sikap, serta tindakannya baik dalam kehidupan personal maupun sosial, kemampuan mengidentifikasi masalah sosial, merumuskan masalah sosial dan memecahkan masalah.

Dengan tiga kompetensi di atas, Pendidikan Karakter sebagai wahana program sistemik pendidikan karakter bangsa, dapat turut membentuk karakter generasi bangsa yang mampu:

- a) Mengamalkan ajaran agama yang dianut dan menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional;

- b) Memahami sikap percaya diri terhadap kekurangan dan kelebihan diri sendiri;
- c) Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas;
- d) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif serta menerapkan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain;
- e) Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya;
- f) Kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah gejala alam dan sosial dalam kehidupan sehari-hari;
- g) Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab, menghargai karya seni dan budaya nasional;
- h) Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun dengan menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dan kesatuan;
- i) Memiliki jiwa kewirausahaan dan menghargai tugas pekerjaan serta memiliki kemampuan untuk berkarya;
- j) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat serta menghargai adanya perbedaan pendapat;
- k) Memiliki nasionalisme yang tinggi dan kesetiaan terhadap NKRI;
- l) Pemilikan nilai-nilai budaya bangsa (having) sekaligus menjadikannya (being) sebagai jatidiri bangsa sekaligus mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Revolusi Mental

Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, Karakter Penduduk Berkebangsaan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan suatu grand desain pendidikan karakter, sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa. Regulasi pendidikan karakter diatur dalam UU (Undang-Undang) Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS atau Sistem Pendidikan Nasional (Depdiknas RI, 2003).

Bagi suatu bangsa, karakter adalah nilai-nilai keutamaan yang melekat pada setiap individu warga negara dan kemudian menjejantah sebagai personalitas dan identitas kolektif bangsa. Karakter berfungsi sebagai kekuatan mental dan etik yang mendorong suatu bangsa merealisasikan cita-cita kebangsaannya dan menampilkan keunggulan-keunggulan komparatif, kompetitif, dan dinamis di antara bangsabangsa lain (Koesoema, 2010; Shulhan, 2010; Sudrajat, 2010; dan Iriany, 2014).

Dalam Rencana Induk (Grand Design) Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa, Kementerian Pendidikan RI (Republik Indonesia) menyebutkan bahwa terdapat 3 aspek pembentuk karakter luhur bangsa, yaitu: (1) Agama, Pancasila, UUD atau Undang-Undang Dasar 1945, dan UU SISDIKNAS; (2) Teori Pendidikan, Psikologi, Nilai, dan Sosial-Budaya; serta (3) Pengalaman Terbaik dan Praktek Nyata (Nuh, 2015).

Harkat dan martabat suatu bangsa berkaitan erat dengan pendidikan yang dialami oleh suatu bangsa itu sendiri. Karena dengan pendidikan, suatu bangsa dapat menentukan karakter, sikap, dan perilakunya ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pendidikan sangatlah penting dalam pembangunan suatu bangsa, karena dengan pendidikan itu suatu bangsa tidak mudah dijajah oleh bangsa lain; dengan pendidikan pulalah suatu bangsa dapat mencapai kemajuan-kemajuan dan perkembangan-perkembangan yang dapat membawanya mewujudkan cita-cita bangsa; dan dengan pendidikan juga suatu bangsa dapat mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lain di dunia (Muttaqin et al., 2006; dan Iriany, 2014).

Berbagai kemajuan dan pencapaian yang telah diraih oleh bangsa Indonesia, baik itu di bidang politik, ekonomi, dan keamanan maupun kesejahteraan rakyat setelah kemerdekaan, namun masih belum dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat, besar, disegani, dan dihormati keberadaannya di tengah-tengah bangsa di dunia (Wibowo, 2014). Hal ini memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan, yakni perubahan yang dapat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Bangsa yang maju ditentukan oleh mentalitas yang tangguh, baik individual maupun kolektif, dari warga negara Indonesia sendiri.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, ianya masih memerlukan pandangan-pandangan yang menuntut perubahan mendasar dari pola pendidikan di Indonesia. Pandangan yang saat ini menjadi perhatian banyak pihak

adalah “revolusi mental”, yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut beliau, revolusi mental perlu diawali dari dunia pendidikan. Maka dari itu, Jokowi (Joko Widodo) mengusulkan agar di SD (Sekolah Dasar), 80 persen pendidikan karakter, sementara 20 persen untuk pengetahuan. Jokowi juga mengungkapkan bahwa di SMP (Sekolah Menengah Pertama), jatah untuk pendidikan karakter diturunkan menjadi 60% dan pengetahuan dinaikkan menjadi 40%; sementara di SMA (Sekolah Menengah Atas), pendidikan karakter menjadi 20% dan pengetahuan menjadi 80%.¹

Selanjutnya, Suratno (2014) mengatakan bahwa pendidikan karakter menjadi sangat penting karena tiga hal, yakni: pertama, secara makro, telah terjadi kemerosotan karakter bangsa yang ditandai oleh tingginya indeks korupsi, premanisme, dan kekerasan; kedua, secara mikro, dalam dunia pendidikan juga banyak kasus bullying, tawuran antar pelajar, kelemahan sistem kurikulum, dan proses pembelajaran yang tidak kondusif bagi pembentukan karakter bangsa; serta ketiga, Jokowi-JK atau Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, sejak kampanye hingga sekarang menegaskan tentang perlunya “revolusi mental” terkait tiga hal utama, yaitu kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam budaya (Suratno, 2014).

¹ © 2016 by Minda Masagi Press and UPI Bandung, West Java, Indonesia
ISSN 1979-0112 and www.mindamas-journals.com/index.php/sosiohumanik

Karakter berfungsi sebagai kekuatan mental dan etik, yang mendorong suatu bangsa merealisasikan cita-cita kebangsaannya dan menampilkan keunggulan-keunggulan komparatif, kompetitif, dan dinamis di antara bangsabangsa lain (Muttaqin et al., 2006).

Berdasarkan fenomena yang ada, dan hasil penelitian sebelumnya, terdapat dua hal yang harus mendapat perhatian secara serius. Pertama, munculnya fenomena menurunnya budi pekerti luhur di kalangan mahasiswa. Kedua, belum adanya model pendidikan karakter di PT (Perguruan Tinggi), yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dapat membentuk karakter mahasiswa, yang mencintai produk Indonesia dan mendukung kemandirian pangan (Shulhan, 2010).

Oleh karenanya, perlu dicari dan dirumuskan model pendidikan karakter bangsa untuk mencintai produk Indonesia dan mendukung kemandirian pangan yang efektif, serta dapat dilaksanakan di lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Pendidikan Karakter dan Revolusi Mental. Generasi penerus bangsa, yang akan menentukan masa depan bangsa ini, diharapkan lahir dari perubahan mentalitas yang dimulai saat ini. Istilah “revolusi mental” saat ini bukanlah suatu istilah yang asing lagi, semenjak pemerintahan baru Jokowi-JK (Joko Widodo – Jusuf Kalla) dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, pada bulan Oktober 2014. Mental itu sendiri berkaitan dengan pikiran (*mind*). Mentalitas juga berkaitan dengan cara berpikir yang sudah menjadi kebiasaan berpikir,

dan suatu kebiasaan (*habit*) pada umumnya terbentuk lewat pembiasaan. Sehingga, mentalitas dapat diubah dengan cara melakukan perubahan pada kebiasaan (Mulyadi et al., 2008).

Pada acara kegiatan pra-musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) oleh Bappenas RI (Badan Perancang Pembangunan Nasional Republik Indonesia) pada tahun 2015, dan dipetik juga dalam Sri Lindawati (2015), disebutkan bahwa revolusi mental, secara rasional, dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, Revolusi Mental bermula di alam pikiran yang menuntun bangsa dalam meraih cita-cita bersama dan mencapai tujuan kolektif bernegara, yakni: memajukan kesejahteraan umum; dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Kedua, Revolusi Mental membangkitkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif, dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern.

Ketiga, Revolusi Mental mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Keempat, Revolusi Mental dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, insititusi sosial, dan masyarakat sampai dengan lembagalembaga negara (dalam Lindawati (2015).

Di dunia pendidikan, revolusi mental ditekankan pada pembentukan karakter serta pengembangan kepribadian yang dapat membentuk jati diri bangsa. Maka, tidak berlebihan bila kita menyebut guru adalah kunci dalam implementasi revolusi mental. Revolusi mental memang harus dimulai dari dunia pendidikan dan secara simultan berjalan di bidang-bidang lainnya.

Mengapa dunia pendidikan? Karena setidaknya selama 18 tahun, waktu anak manusia dihabiskan di bangku pendidikan, mulai Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Untuk itu, tanggungjawab seorang guru semakin bertambah untuk ikut membentuk jati diri bangsa melalui peserta didiknya (Mulyadi et al., 2008; dan Suyanto, 2009). Menurut Agus Wibowo (2014), pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat (Wibowo, 2014).

Walaupun secara formal, manusia menuntut ilmu pada lembaga pendidikan pada jangka waktu tertentu, namun prinsipnya, proses-belajar yang dialami manusia berlangsung sepanjang hayat; artinya, belajar adalah proses yang terus-menerus, yang tidak pernah berhenti dan terbatas pada dinding kelas (Suwirta, Saripudin & Abdulkarim eds., 2008).

Hal ini juga didasari pada asumsi bahwa di sepanjang kehidupannya, manusia akan selalu dihadapkan pada masalah-masalah, hambatan-hambatan, dan rintangan-rintangan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan ini. Prinsip belajar sepanjang hayat ini sejalan

dengan empat pilar pendidikan universal, seperti yang dirumuskan oleh UNESCO (United Nations for Education, Scientific, and Cultural Organization) pada tahun 1990-an, dan juga dikutip oleh Khijron Mahjuro (2007) dan Sri Lindawati (2015), yaitu: *learning to know*, yang berarti juga *learning to learn*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together* (Delors et al., 1992; Mahjuro, 2007; dan Lindawati, 2015).

Learning to know atau *learning to learn* mengandung pengertian bahwa belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi kepada produk atau hasil belajar, akan tetapi juga harus berorientasi kepada proses belajar. Dengan proses belajar, siswa bukan hanya sadar akan apa yang harus dipelajari, akan tetapi juga memiliki kesadaran dan kemampuan bagaimana cara mempelajari yang harus dipelajari itu.

Learning to do mengandung pengertian bahwa belajar itu bukan hanya sekedar mendengar dan melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan, tetapi belajar untuk berbuat, dengan tujuan akhir penguasaan kompetensi yang sangat diperlukan dalam era persaingan global.

Learning to be mengandung pengertian bahwa belajar adalah membentuk manusia yang “menjadi dirinya sendiri”. Dengan kata lain, belajar untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu, dengan kepribadian yang memiliki tanggung jawab sebagai manusia. *Learning to live together* adalah belajar untuk bekerjasama. Hal ini sangat diperlukan, sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat global

di mana manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, tak mungkin bisa hidup sendiri atau mengasingkan diri bersama kelompoknya (Delors et al., 1992; Mahjuro, 2007; dan Lindawati, 2015).

Berdasarkan empat pilar tersebut, berarti manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya dan merupakan kebutuhan mutlak, karena tanpa pendidikan, sangat tidak mungkin suatu kelompok manusia dapat hidup dan maju berkembang menurut konsep dan pandangan hidupnya. Revolusi mental merupakan harapan bangsa dan masyarakat saat ini menuju perubahan jati diri bangsa yang lebih baik. Melakukan revolusi mental adalah guna membentuk revolusi karakter bangsa melalui dunia pendidikan, peneguhan dan penguatan ke-bhinneka-an, dan memperkuat restorasi sosial yang merupakan bagian dari titik pusat utamanya.

Membentuk generasi yang kreatif dan berintelektual menjadi latar belakang diwujudkannya revolusi mental bangsa (Idris, 2012; dan Lindawati, 2015). Oleh karena itu, bidang pendidikan sangat penting dalam menjaga pengarah dan peningkatan mutu dan kesempurnaan aset hidup bangsa. Melalui pendidikanlah akan diperoleh pemahaman-pemahaman baru dalam hal pengetahuan, keaktifan, dan kekritisannya. Namun, dalam menjalankan proses revolusi mental tidak hanya dengan berbicara dan berdiskusi saja, tetapi harus diwujudkan dengan tindakan, yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan.

C. Pancasila sebagai Dasar Revolusi Mental

Kelahiran Pancasila sebagai *grand arrative* yang orisinal milik bangsa Indonesia, ditambah pengalaman sejarahnya, selayaknya memberikan keyakinan tersendiri. Dimana Pancasila haruslah menjiwai segala sendi kehidupan, termasuk dalam dinamika pemerintahan negeri ini. Mengabaikan nilai-nilai luhur Pancasila sama dengan mencederai konsensus nasional.

Di tengah pudarnya penghayatan terhadap Pancasila, Presiden Joko Widodo menggagas revolusi mental yang disambut begitu baik oleh segenap lapisan masyarakat. Revolusi mental diyakini sebagai jawaban atas akutnya krisis yang melanda bangsa dewasa ini. Revolusi mental merupakan suatu paradigma baru dalam upaya *character building* sebagai gerakan signifikan guna mewujudkan *nation building*.

Salah satu hal penting dalam pelaksanaan revolusi mental di Indonesia adalah dengan mengacu atau mengedepankan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum, sedangkan konstitusi atau Batang Tubuh UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorn* artinya sebagai hukum dasar. Hal ini harus ditekankan, karena diakui atau tidak, masih banyak upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara dengan ideologi lainnya seperti komunis, sosial demokrat, LGBT (lesbi, gay, bisex dan transgender), ataupun ideologi sesat lainnya dengan mempropagandakan secara terus menerus bahwa Pancasila tersebut sudah usang.

Secara kongnitif hal ini dapat dijelaskan bahwa ideologi pada dasarnya substantif, maka setiap kelompok atau siapapun yang meragukan hal substantif sama saja dengan keinginan untuk mengganti hal yang substantif tersebut. Tidak mungkin secara logika mengganti fondasi rumah tanpa merobohkan rumah tersebut. Bangsa Amerika Serikat tidak mungkin meragukan lagi apa yang sudah disepakati dalam *Declaration of Independence*-nya atau Bangsa Inggris sudah tuntas nasionalisme dengan *monarchy* atau Bangsa India tidak mungkin meragukan prinsip-prinsip yang telah ditanamkan oleh Gandhi dan Nehru, semua itu adalah hal yang substantif, kecuali dengan sengaja atau tidak sengaja, karena pemahaman dan wawasan filosofis seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai dan tidak dimengerti hal yang substantif tadi, maka dengan cara revolutif dan evolutif berniat mengubah nilai substantif itu. Oleh karena itu, sudah sewajarnya seluruh Bangsa Indonesia tidak perlu meragukan Pancasila.

Percaya atau tidak dan diakui atau tidak, kondisi Bangsa Indonesia yang sudah mengalami dekadensi moral atau *moral hazard* sekarang ini, karena kita tidak pernah melaksanakan ideologi negara Pancasila yang sudah ditemukan oleh para *founding fathers* kita secara serius. Oleh karena itu, yang terjadi sekarang ini adalah krisis multi dimensional dengan indikasi terjadi reduksi atas rakyat Indonesia menjadi masyarakat “kuda bendi” atau masyarakat kaca mata kuda meminjam istilah Prof. DR. Soerjanto Poespowardojo dari Universitas Indonesia yang telah menimbulkan beberapa implikasi buruk seperti masyarakat

menjadi permisif, acuh tak acuh, lebih mengedepankan sikap postmodernisme dan kehilangan jejak bangsa sendiri, tumbuh dan berkembangnya pendukung neoliberal dan nilai-nilai *life style snobisme* mengarah dan mengubah kehidupan ke arah konsumtifisme.

Oleh karena itu menjadi tantangan kita bersama bahwa perlu ada penyelamatan dan rehabilitasi kondisi serta konstelasi keterpurukan masyarakat dengan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, menghidupkan kesadaran ideologi masyarakat (sadar/eling-bangun-mandiri) serta menunjukkan identitas, integritas dan kewibawaan Pancasila.

Revolusi mental berdasarkan sila pertama Pancasila, maka harus direfleksikan dengan kehidupan beragama dan keagamaan yang semakin sehat, menghargai dan terjadinya toleransi beragama yang sangat kuat. Namun, juga ada komitmen kuat untuk siapapun tidak melakukan kegiatan “mengagamakan atau memindahkan orang atau kelompok yang sudah beragama” secara terang-terangan atau tersembunyi dengan dalih, motif atau alasan apapun juga, karena hal tersebut akan merusak dan mencederai toleransi beragama itu sendiri. Revolusi mental sesuai sila pertama Pancasila juga menjadi tantangan bersama seluruh umat beragama di Indonesia untuk mereaktualisasi atau merealisasikan nilai-nilai luhur ajaran agamanya dalam pekerjaan, hubungan sosial dan hubungan berbangsa.

Laporan Human Rights Watch New York (2013) : kaum minoritas beragama dan perempuan terus mendapat perlakuan diskriminatif. Penyerangan dan pengusiran atas kelompok Syiah dan Ahmadiyah, serta maraknya peraturan yang “memojokkan” perempuan membuat penegakkan HAM di Indonesia mundur pada 2013. Laporan ini sama dengan penilaian Setara Institute (2013). Catatan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan, selama 2013 ada 342 peraturan yang membedakan perlakuan terhadap perempuan dari lelaki, 97% diantaranya di daerah misalnya peraturan cara berpakaian, peraturan prostitusi dan pornografi. Jika revolusi mental terjadi berdasarkan sila pertama Pancasila, maka hal tersebut diatas tidak akan terjadi. Revolusi mental berdasarkan sila kedua Pancasila berarti pemerintahan Jokowi dan JK harus segera mengupayakan keadilan dan mencegah meluasnya *moral hazard* dan kebiadaban yang disinyalir banyak kalangan terjadi di masyarakat, karena penegakan hukum yang tidak adil, dapat dibeli dan tumpul keatas dan tajam ke bawah.

Tellyrand mengibaratkan kekuasaan ibarat bayonet artinya banyakyang bisa dilakukan dengan bayonet, kecuali duduk diatasnya artinya kekuasaan cenderung digunakan untuk melukai pihak lain. Oleh karena itu, Jokowi harus dapat memastikan para menteri yang dipilihnya adalah bukan orang yang selalu minta dilayani, sewenang-wenang atau otoriter dll. Disamping itu para menteri juga menyadari bahwa jabatannya adalah “subsidi dari rakyat” sebab rakyat sudah menyerahkan kepercayaan kepada Jokowi yang sebagian kepercayaan tersebut diberikan ke para

menterinya. Artinya para menteri tersebut berkuasa karena “subsidi kepercayaan rakyat”, sehingga dosa besar jika mereka menindas rakyat.

Revolusi mental sesuai sila kedua Pancasila adalah bagaimana kita menjaga persatuan bangsa ini, sehingga harus ada kata sepakat bahwa gerakan separatisme dan radikalisme harus ditolak, serta bagaimana masyarakat menyelesaikan segala masalah tidak dengan berkonflik, karena masih sangat sering terjadi konflik antar warga masyarakat di beberapa daerah akhir-akhir ini, itupun dengan hal-hal sepele atau tidak mendasar.

Revolusi mental berdasarkan sila ketiga adalah bagaimana seluruh element negara baik dari pemerintahan dan masyarakatnya bersama-sama mengamalkan dan mengimplementasikan semangat gotong-royong dalam menjalankan dinamika bernegara.

Revolusi mental berdasarkan sila keempat Pancasila adalah bagaimana segala kebijakan yang terkait dengan nasib rakyat harus diputuskan oleh eksekutif dan legislatif termasuk yudikatif secara arif bijaksana, mengedepankan musyawarah mufakat dan tidak selalu menggunakan voting. Baik, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) ditantang untuk mewujudkan revolusi mental di bidang ini, karena pada dasarnya masyarakat sebenarnya lebih bijak, lebih dewasa dan lebih nyantai dalam melihat sebuah permasalahan dibandingkan para politisi. Diakui atau tidak, rakyat lebih negarawan dan lebih ikhlas dibandingkan mereka.

Revolusi mental berdasarkan sila kelima Pancasila adalah bagaimana mewujudkan keadilan sosial dalam wadah persatuan dan kesatuan NKRI.

D. Pengutamaan Revolusi Mental

Adapun Pengutamaan (Prioritas) Revolusi Mental yang termuat ke dalam agenda pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kalla diberi nama Nawa Cita (9 agenda prioritas), dapat tersaji dalam poin-poin berikut:²

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia

² http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi_Misi_JOKOWI-JK.pdf

Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Tiga Nilai Revolusi Mental

1. Integritas (jujur, dipercaya, berkarakter, bertanggung jawab)
2. Kerja Keras (etos kerja, daya saing, optimis, inovatif dan produktif)
3. Gotong royong (kerja sama, solidaritas, komunal, berorientasi pada kemaslahatan)

Strategi Internalisasi 3 Nilai Revolusi Mental

1. Jalur birokrasi

Internalisasi 3 nilai revolusi mental pada Kementrian/ Lembaga melalui:

- a) Pembentukan tugas gugus dan pic
- b) Tersusunnya program, kegiatan nyata berbasis nilai-nilai revolusi mental.
- c) Menjadi contoh tauladan (*role model*)

2. Jalur swasta

- a) Memperkuat kemitraan antara pengusaha kecil dan pengusaha besar.
- b) Insektif pengurangan pajak bagi pengusaha Indonesia yang mengembangkan produk lokal inovatif.
- c) Instruksi presiden kepada pengusaha media untuk berkolaborasi mempromosikan revolusi mental.
- d) Mengembangkan lembaga keuangan mikro di desa.
- e) Mendukung inisiatif usaha menengah membuka pasar/sentral yang menjual produk lokal yang inovatif, kreatif dan harga terjangkau.

3. Jalur kelompok masyarakat

Pembudayaan 3 nilai revolusi mental dalam kelompok masyarakat

- a) Membangun role model
- b) Aspirasi terhadap kelompok masyarakat
- c) Keteladanan oleh tokoh

4. Jalur pendidikan

- a) Memperkuat kurikulum pendidikan kewarganegaraan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan untuk membangun integrasi, membentuk etos kerja keras dan semangat gotong royong.

- b) Menerapkan ekstra kurikulum revolusi mental di sekolah.
- c) Meningkatkan sarana pendidikan yang merata.
- d) Meningkatkan kompetensi guru dalam mendukung revolusi mental

E. Kewarganegaraan dan Bela Negara

a) Kewarganegaraan

Kewarganegaraan berasal dari bahasa Inggris "*citizenship*"³ yakni merupakan keahlian yang melekat pada sebuah komunitas politik yang membawa hak-hak penyertaan politik. Seorang individu yang mempunyai keahlian (hak politik) ini akan disebut sebagai warga negara. Dalam konteks ini, kewarganegaraan sepadan dengan kerakyatan atau kebangsaan yang dalam bahasa Inggris dinamakan dengan istilah *nationality*⁴. Bagaimanapun, kedua istilah ini harus dibedakan. Seorang warga negara mempunyai hak-hak untuk aktif menyuarakan hak politik di negaranya. Seperti hak memilih ataupun menjadi calon pilihan rakyat atau hak untuk dipilih, sedangkan setiap rakyat tidak seluruhnya mempunyai hak-hak tersebut, walaupun biasanya mereka mempunyainya.

Kewarganegaraan merupakan anggota dalam sebuah komunitas politik dalam negara dan dengan hal itu membawa hak untuk berpartisipasi dalam bidang politik.

³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Huku Tata Negara Indoensia, 302-303

⁴ John M. Echol dan Hassan Shadily, An Englis-Indonesia Dictionary (Jakarta: PT. GRamedia, 1996), 114.

Seseorang dengan keanggotaan tersebut menjadi warga negara. Istilah ini secara umum mirip dengan kebangsaan, walaupun dimungkinkan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara. Misalnya, duta suatu negara yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan PBB atau utusan dunia internasional secara hukum merupakan subyek dari suatu negara dan berhak atas perlindungan hukum tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik.

Kewarganegaraan berasal dari hubungan normatif antara undang-undang dengan warga sebuah negara. Sebaliknya, kerakyatan biasanya berasal dari tempat kelahiran (*ius soli*) atau berasal dari darah keturunan (*ius sanguinis*). Disamping itu, kewarganegaraan dapat diperoleh melalui naturalisasi. Beberapa pengertian tentang kewarganegaraan, antar lain sebagai berikut:

- 1) Kewarganegaraan dalam arti *yuridis* (*juridische nationalitiet*) dan sosiologis (*sociologische nationalitiet begrip*). Kewarganegaraan dalam arti yuridis adalah ikatan hukum (*derechtsband*) antara Negara dengan orang-orang pribadi (*natuurlijke personen*) karena ikatan itu menimbulkan akibat, bahwa orang-orang tersebut masuk dalam lingkungan kuasa pribadi dari negara yang bersangkutan (*burgers van die staatzijn*)⁵

⁵ B.P. Paulus, Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), 43.

Sedangkan kewarganegaraan dalam arti sosiologis adalah kewarganegaraan yang tidak berlandaskan ikatan yuridis/hukum, tetapi sosial politik yang disebut *natie* (nasionalitas).⁶ Perihal penting dalam pengertian kewarganegaraan yuridis (*juridische nationaliteit*), adalah adanya ikatan tersebut dapat dilihat antara lain dalam bentuk pernyataan tegas seorang individu untuk menjadi anggota atau warga Negara suatu Negara tertentu. Bentuk konkritnya ialah pernyataan tersebut dalam bentuk surat-surat resmi, baik berupa keterangan maupun keputusan yang digunakan sebagai bukti adanya keanggotaan dari negara tersebut. Misalnya, adanya paspor, surat laksana paspor dari negara itu.

Kewarganegaraan sosiologis adalah kewarganegaraan yang terikat dengan suatu negara karena adanya persamaan suku bangsa, kesatuan ikatan karena satu keturunan, kebersamaan sejarah, daerah/tanah/wilayah dan penguasa (pemerintahan) atau dengan kata lain, penghayatan kultural yang tumbuh dan berkembang dalam suatu persekutuan daerah atau negara tempat ia tinggal.⁷

- 2) Kewarganegaraan dalam artiformal dan material (*formeelen materiel nationaliteits begrip*).

Disamping yuridis dan sosiologis di atas, pengertian kewarganegaraan dapat pula dibedakan antara kewarganegaraan yang formal dengan

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

kewarganegaraan yang bersifat material (*deinhoud* atau materinya). Hal yang dimaksud dengan Kewarganegaraan dalam arti formal adalah tempat kewarganegaraan itu dalam sistematika hukum, sedangkan kewarganegaraan dalam arti material (isinya) ialah akibat hukum dari status kewarganegaraan itu.⁸

Mengenai tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum, menyangkut salah satu sendi negara, yaitu rakyat negara, maka status kewarganegaraan itu terletak di bidang hukum publik, sebab kaidah-kaidah mengenai adanya negara bersifat hukum publik (*publiekrechtelijk*).

Maksud dari kewarganegaraan dalam arti material (isinya) adalah akibat hukum dari status kewarganegaraan itu sendiri. Apabila hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang konkrit terhadap seseorang yang timbul dari status kewarganegaraan seseorang tersebut. Misalnya, adanya ikatan hukum yang timbul akibat perkawinan antara bangsa/negara, dan status anak seorang warga Negara Indonesia dengan orang asing.

Sedangkan fungsi kewarganegaraan adalah pembatasan dan pengaturan kekuasaan negara. Salah satu akibat dari ikatan seseorang dengan negara, ialah orang tersebut tidak jatuh dalam kekuasaan negara asing dan pihak lain; sebab

⁸ Ibid.,44.

negaranya mempunyai kekuasaan untuk memberlakukan kaidah-kaidah /konvensi internasional untuk melindungi setiap orang dan warga negaranya.⁹

b) Asas Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan yang mula-mula dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan status seseorang apakah termasuk atau tidaknya seseorang tersebut dalam golongan warga negara suatu negara ialah:

1. Asas keturunan, yakni asal-usul darah, geneologis daribapak/ayahnya atau disebut sebagai *ius sanguinis*, dan
2. Asas tempat kelahiran, yakni dimana asal seseorang tersebut bertempat tinggal dan berdomisili di Negara awal, yang disebut sebagai *ius soli*.

Penentuan kewarganegaraan yang dipakai suatu negara dalam menentukan status seseorang sebagai warga negara berdasarkan kelahiran dikenal dengan dua asas kewarganegaraan, yaitu asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis*. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Latin. *Ius* yang bermakna hukum, dalil, atau pedoman. Sedang *soli* berasal dari kata *solum* yang bermakna negeri, tanah air, atau daerah. Kata *sanguinis* berasal dari kata *sanguis* yang bermakna darah (atau keturunan). Dengan demikian *ius soli* mempunyai makna bahwa persyaratan dan ketentuan yang dipakai suatu negara

⁹ Ibid., 45

dalam menentukan status keanggotaan dan kewarganegaraan berdasarkan tempat dan daerah asal kelahiran, dan asas *ius sanguinis* ini dipakai oleh negara dalam menentukan status kewarganegaraan berdasarkan darah dan asal usul geneologi, atau keturunan.¹⁰

Asas *ius sanguinis* menetapkan kewarganegaraan seorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan dimana ia sendiri dan orang tuanya berada dan melahirkan.

Contoh, seorang yang dilahirkan di negara A, orang tuanya adalah warga negara B, maka ia adalah warga negara B.

Asas *Ius Soli* menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan.

Contoh, seseorang yang lahir di negara A, adalah warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. Dalam menentukan kewarganegaraan itu dipergunakan dua *ste/sel* atau tata aturan yang mengikat kewarganegaraan, di samping asas yang tersebut di atas. *Ste/sel* yang disebut itu adalah:

¹⁰ Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenada Media, 2005), 75

- a. *Ste/se/* aktif, orang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara
- b. *Ste/se/* pasif, orang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum tertentu. Berhubungan dengan kedua *ste/se/* itu harus dibedakan dan mengakibatkan konsekuensi hukum berupa:
 - 1) Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dan berpindah kewarganegaraan tertentu. Hal ini berlaku dalam *ste/se/* aktif.
 - 2) Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu negara lain. Seseorang tetap memilih negara kelahirannya. Hal ini berlaku dalam *ste/se/* pasif.

Dalam penyelesaian masalah kewarganegaraan menurut salah satu keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) dipergunakan baik *ste/se/* aktif dengan Hak Opsi, yang dikenakan kepada penduduk Indonesia keturunan Eropa. Penerapan *ste/se/* pasif dengan Hak Repudiasi, yang dikenakan kepada penduduk Indonesia keturunan Timur Asing, seperti keturunan Cina, Korea, Jepang, dan Arab.¹¹

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia ini, yaitu:¹²

¹¹ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata HUKum Indonesia, 98.

¹² Penjelasan umum UU No. 12 Tahun tentang kewarganegaraan RI, 22-26

- a. Asas kepentingan nasional, adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai Negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri;
- b. Asas perlindungan maksimum, adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh terhadap kepada setiap warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik dalam maupun luar negeri.
- c. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan
- d. Asas kebenaran substantif, adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya.
- e. Asas non-diskriminatif, adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
- f. Asas keterbukaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, adalah yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

- g. Asas keterbukaan, adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
- h. Asas publisitas, adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

c) Bela Negara dan Implementasinya

Setelah memahami tentang hak dan kewajiban warga Negara ternyata bahwa makna bela Negara sangat berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban warga Negara karena berhubungan dengan mempertahankan tetap tegaknya negara dan tetap utuhnya bangsa sehingga tujuan mendirikan negara tetap dapat terpelihara, sebagai wujud dari kewajiban warga Negara terhadap unsur-unsur yang ada dalam Negara.

1. Menurut UUD pasal 30 UU No. 20/ 1982: HANKAM

“Bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideology Negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman.”

2. Menurut UUD pasal 31 UU No.2/ 1989: System pendidikan nasional

“Bela Negara dilakukan melalui pendidikan bela Negara, pendidikan dapat dilakukan lewat 2 jalur:

- a) Formal: sekolah
 - PPBN tingkat dasar (SD-SMA)
 - PPBN tingkat lanjut (Perguruan Tinggi)
- b) Nonformal, informal (diluar sekolah).
Contoh: Kegiatan PRAMUKA.

Berdasarkan pengertian bela Negara adalah membela kepentingan nasional pada seluruh aspek kehidupan nasional, hal ini memberikan kejelasan bahwa bela Negara tidak hubungan dengan kepentingan militer semata, tetapi kepentingan seluruh bangsa yang konsekuen dengan cita-citanya pada saat ingin mendirikan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk dari bela Negara akan tergantung pula pada jenis ancaman yang dihadapi, kalau ancamannya dalam bentuk fisik tentunya warga negarapun harus menyiapkan diri dalam bentuk kesiapan fisik seperti setelah kemerdekaan, rongrongan pemberontak/ separatisme antara tahun 1945-1962 terus terjadi dan upaya Negara luar untuk kembali menjajah Indonesia terus ada, sehingga upaya bela Negara diarahkan pada kesiapan fisik, melalui pendidikan pendahuluan perlawanan rakyat (PPPR) berdasarkan UU No. 29/ 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat.

Namun setelah itu tepatnya dimulai tahun 1973 pemahaman bela Negara lebih diarahkan pada penumbuhan kesadaran, kesadaran, kerelaan berkorban dan kecintaan terhadap tanah air melalui ilmu pengetahuan karena ancaman telah bergeser pada masalah-masalah social, jenis pendidikannya berubah menjadi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

F. Rangkuman

Tidak dapat disangkal oleh kita, bahwasanya fakta Bangsa Indonesia tengah menghadapi krisis jati diri. Nilai-nilai pancasila, sebagai falsafah dan ideologi bangsa, sudah banyak dilupakan. Oleh karena itu perlu ditanamkan kepada rakyat Indonesia untuk kembali ke jati dirinya. Nilai-nilai Pancasila dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk mengembalikan jati diri dan karakter bangsa adalah melalui revolusi mental.

Revolusi Mental sebagai sebuah Tantangan Dunia Pendidikan. Suatu tantangan dalam dunia pendidikan Indonesia diawali dari pembentukan karakter, mulai dari yang sederhana, misalnya masalah membuang sampah sembarangan dan pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas, merupakan contoh perbuatan yang tidak baik dan berkaitan dengan mentalitas seseorang. Mengapa masih ada saja orang yang membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya; atau mengapa masih saja ada orang yang melanggar rambu-rambu lalu-lintas?

Sebagian orang beranggapan bahwa hal ini terjadi karena manusia memiliki rasa egois; dan ego lah yang menjadi penyebabnya (Efendi, 2008; dan Nagata, 2014). Dalam konteks ini, Agus Wibowo (2014) mengatakan bahwa sikap egois tidak bisa dihilangkan dari diri manusia; dan masalah mentalitas seperti ini tidak dapat dijawab dengan cara membuang ego dari diri manusia (Wibowo, 2014).

Menurut Kemendikbud RI (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) pada tahun 2010, dan juga dikutip dalam Sri Lindawati (2015), permasalahan mentalitas lainnya yang muncul di masyarakat, seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massal, kehidupan ekonomi yang konsumtif, serta kehidupan politik yang tidak produktif, menjadi persoalan budaya dan karakter bangsa (dalam Puspito et al. eds., 2011; dan Lindawati, 2015).

Hal ini juga sinkron dengan apa yang menjadi sasaran dari revolusi mental di era kini. Perubahan orientasi pendidikan tersebut mengarah pada tujuan pendidikan nasional, yang merupakan rumusan mengenai kualitas manusia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Sehingga rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa (Depdiknas RI, 2003).

Adalah Presiden Soekarno, tokoh yang pertama kali melontarkan pentingnya masalah *nation building* ini dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 17 Agustus 1957. Presiden Soekarno melihat bahwa *nation building* sebagai fase kedua dalam revolusi Indonesia sesudah fase pertama yang

dinamakan fase *liberation*, yaitu pembebasan Indonesia dari penjajah Belanda (Soekarno, 1965; Legge, 1985; dan Adam, 2007). Permasalahan ini dikedepankan sebagai tanggapan terhadap keadaan Indonesia pada saat itu, yang ditandai oleh makin kuatnya kecenderungan mengutamakan kepentingan kelompok, golongan, suku, agama, daerah, dan partai di atas kepentingan negara dan bangsa, serta makin lunturnya idealisme (wawancara dengan Responden C, 10/6/2015).

Pentingnya *character building* juga disampaikan oleh Presiden Soekarno pada Pidato Kenegaraan tanggal 17 Agustus 1962. Ketika itu, *character building* dikaitkan dengan *nation building* dan perjuangan pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Sebagaimana diketahui bahwa masalah Irian Barat ini seharusnya sudah diserahkan kedaulatannya dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia, yakni “satu tahun” setelah penandatanganan KMB (Konferensi Meja Bundar) pada tahun 1949. Tetapi, sampai dengan tahun 1960-an, pemerintah Belanda belum ada tanda-tanda untuk menyerahkannya, sehingga Presiden Soekarno mencanangkan Tri Kora (Tiga Komando Rakyat) untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda (Soekarno, 1965; Legge, 1985; dan Adam, 2007).

Di era Reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang, wacana pembangunan bangsa dan pembangunan karakter meletakan pengakuan atas hak-hak warganegara sebagai isu sentral dalam masyarakat pluralis yang demokratis. Dengan kata lain, perjuangan dan pemerolehan hak sipil, hak asasi manusia, dan keadilan sosial dan politik diyakini akan lebih mudah dicapai (wawancara dengan Responden A, 10/6/2015). Upaya itu diwujudkan, misalnya, melalui

Amandemen UUD 1945 NKRI (Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan keinginan untuk merestorasi Pancasila (Efendi, 2008; dan Koesoema, 2010).

Akan tetapi, setelah hampir sewindu, kelihatannya harapan ini tidak begitu tampak, terkecuali pada aspek kebebasan berekspresi, dimana kesempatan yang tersedia memang jauh lebih luas (tidak terkekang) dibandingkan dengan kesempatan pada masa rezim Orde Lama (1959-1966) dan Orde Baru (1966-1998) yang otoriter. Di lain pihak, di era “transisi demokrasi”, bangsa Indonesia justru dihadapkan pada pelbagai fenomena yang mempengaruhi kewarganegaraannya, seperti nasionalisme ekonomi, etika sosial, pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi, degradasi lingkungan, lokalisme demokratis, dan multikulturalisme (Liddle, 1992; dan Indriyanto, 2014).

Dalam aspek manusia pula, Indonesia kehilangan daya saing. Dalam *World Competitiveness Scoreboard* tahun 2007, Indonesia menempati peringkat 54 dari 55 negara, turun dari peringkat 52 pada tahun 2006 (dalam Raka, 2008; dan Kemendag RI, 2010). Bangsa Indonesia kehilangan imej dan kemauan untuk mentaati hukum, bahkan mentaati aturan yang paling sederhana, yaitu aturan berlalu-lintas (Raka, 2008:3).

Di tengah fenomena semakin menurunnya karakter bangsa, pendidikan karakter perlu semakin dikuatkan melalui jalur pendidikan formal, informal, dan nonformal. Keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi tiga institusi penting yang perlu bersinergi dalam mengimplementasikan pendidikan

karakter melalui revolusi mental. Perubahan pola pikir menjadi kunci utama dalam revolusi mental. Perlu proses, kesungguhan, dan komitmen untuk cepat berubah. Selain faktor manusianya, juga perlu disiapkan sistem yang membuat masyarakat mau mengubah atau memperbaiki mentalitasnya melalui konstruksi model pendidikan karakter bangsa berbasis gerakan cinta produk Indonesia, sebagai upaya merekonstruksi jati diri dan karakter bangsa Indonesia, dengan berdasarkan kepada nilai-nilai agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan budaya lokal.

Pendidikan diarahkan pada upaya memanusiakan manusia, atau membantu proses hominisasi dan humanisasi. Maksudnya adalah bahwa pelaksanaan dan proses pendidikan harus mampu membantu peserta didik agar menjadi manusia yang berbudaya tinggi dan bernilai tinggi, seperti bermoral, berwatak, bertanggungjawab, dan bersosialitas. Para peserta didik juga perlu dibantu untuk hidup berdasarkan pada nilai moral yang benar, mempunyai watak yang baik, dan bertanggungjawab terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Dalam konteks inilah pendidikan karakter dan budi pekerti sangat diperlukan dalam kehidupan peserta didik di era globalisasi (Efendi, 2008; Elmubarok, 2009; dan Suyanto, 2009).

Perkembangan model pendidikan karakter bangsa untuk mendukung kemandirian pangan dan cinta produk Indonesia di lingkungan keluarga pada masa sekarang ini, di era pemerintahan Jokowi-JK (Joko Widodo dan Jusuf Kalla), adalah mendasarkan kebijakan pembangunannya pada Nawacita. Penjelasan Nawacita tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja, dan Indonesia Sejahtera.
6. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
7. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan ke-bhinneka-an.

PENDALAMAN MATERI

A. Materi 1 Konsep Dasar Kependudukan

Bertambahnya jumlah penduduk yang menemndiami planet bumi menyebabkan semakin berkurangnya daya dukung planet bumi. Jumlah penduduk yang semakin banyak akan mendorong peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Peningkatan jumlah penduduk pada suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari faktor lingkungan meliputi norma dan nilai, budaya, dan pendidikan. Rendahnya pengetahuan tentang pemahaman akan nilai dan budaya menyebabkan dibanyak tempat terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Misalnya masih adanya anggapan dimasyarakat lokal tentang banyak anak banyak rezeki menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan angka jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara ditentukan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi.

1. Kelahiran

Kelahiran (Fertilitas) sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Natalitas mempunyai arti yang sama dengan fertilitas hanya berbeda ruang lingkupnya. Fertilitas menyangkut peranan kelahiran pada perubahan penduduk sedangkan natalitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi manusia.

Tingkat fertilitas kasar (*Crude Birth Rate/CBR*) dapat didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun. Untuk menentukan tingkat fertilitas kasar dapat menggunakan persamaan 2.1.

$$CBR = \frac{B}{P_m} \times k \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana :

- CBR = tingkat fertilitas kasar
- P_m = penduduk pertengahan tahun
- B = jumlah kelahiran pada tahun tentu
- k = bilangan konstan dengan nilai 1000

Tingkat Fertilitas Umum (*General Fertility Rate* atau GFR). Pesamaan yang digunakan untuk menentukan GFR dapat disajikan sebagai berikut.

$$GFR = \frac{B}{Pf(15-49)} \times k \dots\dots\dots (2.2)$$

Dimana

- GFR = tingkat fertilitas umum
- B = jumlah kelahiran
- Pf (15-49) = jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan tahun.

Tingkat Fertilitas Menurut Umur (*Age Specific Fertility Rate = ASFR*). Untuk menentukan ASFR digunakan persamaan 2.3.

$$ASFR_i = \frac{B_i}{P_{fi}} \times k \dots\dots\dots (2.3)$$

Dimana

ASFR_i = jumlah kelahiran bayi pada kelompok umur i

P_{fi} = jumlah perempuan kelompok umur i
pada pertengahan tahun

K angka konstanta 1000

2. Kematian

Kematian (Mortalitas) merupakan salah satu komponen demografi yang akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Tinggi atau rendahnya mortalitas tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, namun juga menjadi barometer tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Mortalitas atau kematian dapat didefinisikan suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Dengan kata lain, bahwa yang dikatakan kematian apabila telah terjadi kelahiran hidup.

Dalam demografi terdapat beberapa pengukuran data kematian penduduk, yaitu: a) tingkat kematian kasar (*Crude Death Rate* atau *CDR*), b) tingkat kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate*, atau *ASDR*), dan c) kematian bayi (*Infant Mortality Rate* atau *IMR*).

Tingkat kematian kasar (CDR) adalah jumlah kematian pada tahun tertentu dalam per 1000 penduduk pada pertengahan tahun. Untuk menentukan CDR digunakan persamaan 2.4 disajikan berikut.

$$CDR = \frac{D}{P_m} \times k \dots\dots\dots (2.4)$$

Dimana :

D = jumlah kematian pada tahun tertentu

P_m = jumlah penduduk pada pertengahan tahun

K = bilangan konstan yang biasanya bernilai 1000

ASDR merupakan tingkat kematian berdasarkan kelompok umur tiap 1000 penduduk dalam pertengahan tahun. Untuk penentuan ASDR digunakan persamaan 2.5.

$$ASDR_i = \frac{D_i}{P_{mi}} \times 1000 \dots\dots\dots (2.5)$$

Dimana:

D_i = jumlah kematian pada kelompok umur i

P_{mi} = jumlah penduduk pada pertengahan tahun
pada kelompok umur i

Selanjutnya tingkat kematian bayi (*Infant Mortality Rate atau IMR*) merupakan jumlah kematian bayi setiap 1000 kelahiran hidup pada pertengahan tahun. Untuk menentukan IMR digunakan persamaan 2.5 berikut.

$$IMR = \frac{D_o}{B} \times 1000 \dots\dots\dots (2.5)$$

Dimana :

D_o = jumlah kematian bayi pada tahun tertentu

B = jumlah bayi lahir pada tahun tertentu

3. Migrasi

Migrasi penduduk merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat atau keadaan menuju tempat atau keadaan lain. Migrasi penduduk dapat juga diistilahkan dengan mobilitas penduduk. Migrasi penduduk berdasarkan sifatnya dapat dibedakan atas dua yaitu migrasi vertikal dan migrasi horizontal. Migrasi vertikal merupakan perpindahan penduduk yang disebabkan terjadinya perubahan status sosial, misalnya seseorang yang bekerja di sektor pertanian berubah statusnya menjadi sektor perdagangan. Selain itu, migrasi horizontal merupakan perpindahan atau pergerakan penduduk yang melintasi batas wilayah menuju wilayah lain dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah merupakan dasar dan menjadi indikator dalam penentuan migrasi horizontal.

Terdapatnya perbedaan antar wilayah dari segi ekonomi dan kesempatan kerja menjadi faktor pendorong terjadinya migrasi penduduk. Semakin tinggi perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain, maka migrasi yang terjadi semakin tinggi.

Masyarakat desa menuju wilayah perkotaan diistilahkan urbanisasi. Urbanisasi merupakan masalah yang dihadapi banyak kota besar di dunia dan Indonesia khususnya. Tingginya angka urbanisasi menimbulkan banyak persoalan, diantaranya peningkatan kepadatan penduduk, permukiman kumuh, lapangan pekerjaan, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya. Ketidak merataan pembangunan dan persoalan ekonomi dianggap sebagai

faktor penyebab permasalahan urbanisasi. Selain itu, adanya budaya merantau bagi masyarakat suku minang juga sebagai faktor penyebab terjadinya urbanisasi.

Transmigrasi telah memindahkan penduduk dari pulau Jawa menuju luar pulau Jawa, seperti wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Transmigrasi telah memberikan kontribusi dalam meratakan persebaran jumlah penduduk. Meskipun pada saat ini, jumlah penduduk masih terkonsentrasi di pulau Jawa, namun cerita keberhasilan program transmigrasi dalam pemanfaatan sumberdaya alam khususnya pertanian telah berkontribusi dalam ekonomi nasional.

4. Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup merupakan suatu indikator kesehatan masyarakat. Umur harapan hidup merupakan representasi dari nilai angka kematian kasar (CDR) dan tingkat kematian bayi (IMR). Semakin tinggi CDR dan IMR maka semakin rendah angka harapan hidup pada suatu wilayah.

5. Data Kependudukan

Sensus penduduk merupakan suatu proses keseluruhan dari pengumpulan data, penilaian, menganalisis, dan penyajian data penduduk. Informasi yang disajikan dari sensus penduduk menggambarkan tentang ciri-ciri demografi, sosial ekonomi, dan lingkungan. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang Indonesia telah melaksanakan sensus enam kali yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.

Sensus penduduk hanya memberikan informasi kependudukan pada saat dilaksanakan sensus. Sensus dapat dianalogikan sebagai pemotretan penduduk yang dilaksanakan pada hari tertentu. Selain itu, untuk menggambarkan catatan kejadian-kejadian kependudukan yang terjadi setiap saat maka dilakukan registrasi penduduk.

6. Perkembangan dan dampak kependudukan

Pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah dipengaruhi tiga faktor alami, yaitu faktor kelahiran, faktor kematian, dan faktor migrasi. Namun pada sisi lain, pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh faktor non alami. Faktor-faktor yang bersifat non alami dapat berupa peperangan, penemuan obat, program kesehatan lingkungan dan masyarakat, serta lain-lainnya.

Pertumbuhan penduduk dapat juga dikaitkan dengan daya dukung lingkungan (*craying capacity*). Bila dilihat secara global, maka mungkin saja jumlah penduduk dan sumberdaya alam masih memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun banyaknya yang menggunakan sumberdaya alam, menyebabkan percepatan habisnya sumberdaya alam dan menurunkan daya dukung lingkungan. Usaha yang paling tepat untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya dukung lingkungan yakni dengan program penurunan jumlah penduduk

B. Materi 2 Masalah Kependudukan

Masalah kependudukan bisa dipahami sebagai suatu topik atau tema dalam ranah kependudukan, yang membutuhkan perhatian khusus. Terkait tentang kependudukan, hal yang menjadi isu sampai hari ini ialah persoalan (1) jumlah dan pertumbuhan penduduk, (2) penduduk remaja dan orang muda, (3) bonus demografi, (4) penduduk lanjut usia, (5) lingkungan ramah penduduk. Untuk menelaah isu kependudukan, tidak bisa secara umum. Mesti di telaah satu per satu atau masing masing dari aspek tersebut.

Materi ini lebih kepada menghubungkan antara variabel variabel yang ada pada demografi dengan variabel yang ada pada sistem atau domain lain. Artinya, tidak sekadar memperkenalkan demografi saja, tapi berbicara tentang ilmu kependudukan. Hauser (1969) membedakan bahwa demografi merupakan analisis statistik terhadap jumlah, distribusi dan komposisi penduduk, serta komponen variasi dan perubahannya, sedangkan studi kependudukan mempersoalkan hubungan hubungan antara variabel demografi dengan variabel pada sistem yang lain.

Dinamika Penduduk

Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk. Perubahan perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Dinamika atau perubahan lebih cenderung pada perkembangan jumlah penduduk suatu Negara atau wilayah tersebut. Jumlah penduduk berarti kuantitas penduduk yang ada pada suatu wilayah. Penentuan jumlah

penduduk, terikat pada batasan tempat dan waktu. Misalnya jumlah penduduk pada wilayah X di satuan waktu tertentu, ialah sebanyak 1000 Jiwa. Angka 1000 menunjukkan banyak atau jumlahnya, dan jiwa merupakan satuan.

Jumlah penduduk didefinisikan sebagai banyaknya penduduk yang ada pada satu wilayah administrative yang dihitung pada satuan waktu tertentu. Sedangkan pertumbuhan penduduk ialah besarnya pertambahan penduduk yang ada pada satu wilayah per satuan waktu. Sedangkan yang dimaksud sebagai penduduk ialah setiap warga negara yang tinggal di wilayah tertentu, dalam waktu enam bulan atau lebih, dan mempunyai keinginan untuk menetap. Oleh karena penentuan jumlah penduduk dibatasi oleh waktu dan tempat, maka jumlah penduduk ini disimbolkan dengan P_t . Simbol P berarti jumlah penduduk pada suatu wilayah, dan t adalah satuan waktu tertentu.

Persamaan jumlah dan pertumbuhan penduduk secara matematis ialah sebagai berikut :

$$P_t = P_0 + B - D + I - E$$

Di mana :

- P_t : Jumlah penduduk pada waktu t
- P_0 : Jumlah penduduk tercatat sebelum waktu t
- B : Jumlah kelahiran
- D : Jumlah kematian
- I : Jumlah imigrasi
- E : Jumlah emigrasi

Tujuan mempelajari jumlah dan pertumbuhan penduduk ini adalah sebagai landasan untuk mencermati permasalahan kependudukan yang ada, selanjutnya bisa dijadikan dasar dan acuan untuk melahirkan kebijakan yang relevan sebagai solusi dari permasalahan tersebut. .

Relevansi jumlah dan pertumbuhan penduduk dalam pembangunan kependudukan adalah bahwa jumlah dan pertumbuhan penduduk merupakan kondisi kuantitas penduduk. Sementara itu, penduduk adalah sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga apabila ada masalah di dalam kependudukan, hal itu menjadi potensi dan permasalahan besar bagi pembangunan yang dilaksanakan.

Masalah kependudukan secara umum dipandang dari masalah kuantitas dan kualitas penduduk itu. Dapat dirinci permasalahan penduduk sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk besar.
- b. Pertumbuhan penduduk yang cepat.
- c. Distribusi / penyebaran penduduk yang tidak merata
- d. Banyaknya pengangguran, yang berarti penduduk di usia produktif tapi tidak produktif.
- e. Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan, kompetensi dan keahlian yang belum optimal.

Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk sesuai dengan makna komposisi yang bisa dipahami sebagai komponen penyusun yang secara kuantitatif menentukan terhadap hal yang disusunnya.

Oleh karena itu, terkait dengan komposisi penduduk, berarti kita akan menelisik dan menganalisis hal hal yang ada di dalam jumlah penduduk. Tentu saja banyak komponen yang menyusun jumlah penduduk, diantaranya ialah jenis kelamin dan usia penduduk yang ada. Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk laki laki dan perempuan, yang tersusun dari tingkatan umur. .

Piramida Penduduk

Piramida penduduk merupakan model yang menyajikan kuantitas penduduk pada suatu wilayah, yang sekaligus merepresentasikan komposisi penduduk yang ada itu menurut umur dan jenis kelamin. Perlunya penyajian dalam bentuk representatif berupa piramida ini di samping untuk mempermudah memaknai data, juga secara lebih visual menunjukkan kondisi yang sebenarnya yang terjadi pada suatu jumlah penduduk.

Piramida penduduk tidak hanya mampu menginformasikan jumlah penduduk yang ada. Lebih dari itu, piramida penduduk memberitahukan potret yang sebenarnya yang terjadi dalam suatu jumlah penduduk tersebut. Dengan piramida penduduk pada suatu wilayah, dapat diketahui riwayat kependudukan suatu wilayah tersebut. Jelas sekali hal ini berguna untuk data dasar terhadap kajian aspek apa saja dalam ranah pembangunan.

Dengan mengetahui jumlah penduduk, kita dapat mengetahui langkah apa yang dapat kita lakukan dalam kesejahteraan penduduk. Pada dasarnya besarnya jumlah penduduk merupakan modal untuk melakukan

pembangunan. Tantangan yang harus ditaklukan yaitu bagaimana meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sehingga sumberdaya manusia ini dapat memajukan aspek teknologi, ekonomi, sosial dan politik. Peluangnya ialah jika kualitas sumberdaya manusia semakin baik, tentunya akan timbul inovasi inovasi baru sehingga penduduk Indonesia tidak mengalami krisis energi.

Penduduk Remaja dan Orang Muda

Penduduk remaja (umur 15 – 19 tahun) dan orang muda (umur 10 – 14 tahun) adalah generasi penerus bangsa dan pelaksana pembangunan di masa depan. Pada kondisi saat ini, mereka belum termasuk kelompok penduduk produktif. Tetapi di masa mendatang, menjadi penduduk usia produktif yang akan mempunyai tanggungan.

Peningkatan kualitas penduduk remaja dan usia muda mutlak dilakukan dalam kesiapan bangsa menghadapi masa depan. Kualitas penduduk berupa peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan untuk memiliki keterampilan dan kompetensi yang berguna bagi dirinya, masyarakat, nusa dan bangsa. Terkait hal ini, pembangunan kependudukan mesti melibatkan dimensi dan sektor pendidikan dan kesehatan. Karena masalah kependudukan bukan masalah yang bisa diselesaikan oleh BKKBN saja.

Penduduk Lanjut Usia

Penduduk lanjut usia tergolong penduduk yang tidak produktif. Dalam komposisi penduduk Indonesia saat ini, penduduk lansia memiliki jumlah yang sedikit dibanding dengan penduduk angkatan kerja. Penduduk lanjut usia

adalah orang-orang yang telah mengalami penurunan fungsi fisiknya sehingga cenderung dianggap tidak bisa berkarya dan menjadi beban tanggungan semata.

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan generasi sekarang untuk menghadapi masa tuanya. Banyak cara yang bisa dilakukan seperti gaya hidup yang sehat dan selalu berkarya.

Bonus Demografi

Bonus demografi ialah suatu keadaan keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang. Bonus demografi terjadi karena penurunan kelahiran yang dalam jangka panjang menurunkan proporsi penduduk muda, sehingga investasi untuk pemenuhan kebutuhannya berkurang dan sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Terjadinya Bonus Demografi

Terjadinya bonus demografi merupakan suatu proses panjang dalam riwayat kependudukan Bangsa Indonesia. Karena bonus demografi tidak bisa terjadi pada satu waktu atau satu generasi. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa bonus demografi terjadi dimulai dari suatu keadaan di mana fertilitas menurun. Selanjutnya pada kurun waktu tertentu ke depan, dalam komposisi penduduk terjadi jumlah usia produktif yang besar dibanding dengan penduduk usia non produktif (yang menjadi tanggungan yaitu anak-anak dan

lansia). Akan tetapi tentu saja hal ini percuma dan bahkan bisa jadi petaka bagi suatu bangsa apabila jumlah usia produktif yang besar tersebut ternyata malah pengangguran (tidak produktif secara kenyataannya dalam kehidupan, walaupun secara komposisi umur mereka adalah pada usia produktif).

Lingkungan Ramah Penduduk

Lingkungan ramah penduduk merupakan kondisi yang paling kondusif dari daya dukung lingkungan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi penduduk pada suatu wilayah. Hal ini dapat terjadi karena interaksi antara penduduk yang tinggal pada suatu lingkungan, dengan rona lingkungan alamiah yang ada.

Terdapat 4 (empat) pendekatan dalam upaya mewujudkan lingkungan ramah penduduk ini, yaitu (1) pendekatan legalitas, yang dilandaskan pada seperangkat aturan hukum dan kebijakan. Maksudnya adalah penegakkan aturan dan hukum yang telah ada untuk melindungi lingkungan hidup dari peristiwa degradasi lingkungan, baik karena pencemaran maupun kerusakan lingkungan, (2) pendekatan ekonomi kreatif, yang dilandaskan pada pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang lebih kepada ekonomi kreatif yang tidak menguras sumberdaya alam, (3) pendekatan teknologis, di mana pendekatan ini dilandaskan pada penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, (4) pendekatan spiritual, sosial dan budaya, yang dilandaskan pada keyakinan agama yang memerintahkan makhluk Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga lingkungan hidup.

C. Materi 3 Karakter Penduduk Berkebangsaan

Karakter Penduduk Berkebangsaan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan suatu *grand desain* pendidikan karakter, sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa. Regulasi pendidikan karakter diatur dalam UU (Undang-Undang) Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS atau Sistem Pendidikan Nasional (Depdiknas RI, 2003).

Dalam Rencana Induk (*Grand Design*) Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa, Kementerian Pendidikan RI (Republik Indonesia) menyebutkan bahwa terdapat 3 aspek pembentuk karakter luhur bangsa, yaitu: (1) Agama, Pancasila, UUD atau Undang-Undang Dasar 1945, dan UU SISDIKNAS; (2) Teori Pendidikan, Psikologi, Nilai, dan Sosial-Budaya; serta (3) Pengalaman Terbaik dan Praktek Nyata (Nuh, 2015).

Karakter berfungsi sebagai kekuatan mental dan etik, yang mendorong suatu bangsa merealisasikan cita-cita kebangsaannya dan menampilkan keunggulan-keunggulan komparatif, kompetitif, dan dinamis di antara bangsabangsa lain (Muttaqin et al., 2006).

Kelahiran pancasila sebagai *grand arrative* yang orisinal miik bangsa Indonesia, ditambah pengalaman sejarahnya, selayaknya memberikan keyakinan tersendiri. dimana Pancasila haruslah menjiwai segala sendi kehidupan, termasuk dalam dinamika pemerintan negeri ini. mengabaikan nilai-nil luhur Pancasila sama dengan mencederai konsensus nasional.

Salah satu hal penting dalam pelaksanaan revolusi mental di Indonesia adalah dengan mengacu atau mengedepankan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum, sedangkan konstitusi atau Batang Tubuh UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorn* artinya sebagai hukum dasar. Hal ini harus ditekankan, karena diakui atau tidak, masih banyak upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara dengan ideologi lainnya seperti komunis, sosial demokrat, LGBT (lesbi, gay, bisex dan transgender), ataupun ideologi sesat lainnya dengan mempropagandakan secara terus menerus bahwa Pancasila tersebut sudah usang.

Revolusi mental berdasarkan sila pertama Pancasila, maka harus direfleksikan dengan kehidupan beragama dan keagamaan yang semakin sehat, menghargai dan terjadinya toleransi beragama yang sangat kuat. Namun, juga ada komitmen kuat untuk siapapun tidak melakukan kegiatan “mengagamakan atau memindahkan orang atau kelompok yang sudah beragama” secara terang-terangan atau tersembunyi dengan dalih, motif atau alasan apapun juga, karena hal tersebut akan merusak dan mencederai toleransi beragama itu sendiri. Revolusi mental sesuai sila pertama Pancasila juga menjadi tantangan bersama seluruh umat beragama di Indonesia untuk mereaktualisasi atau merealisasikan nilai-nilai luhur ajaran agamanya dalam pekerjaan, hubungan sosial dan hubungan berbangsa.

Revolusi mental sesuai sila kedua Pancasila adalah bagaimana kita menjaga persatuan bangsa ini, sehingga harus ada kata sepakat bahwa gerakan separatisme dan radikalisme harus ditolak, serta bagaimana masyarakat

menyelesaikan segala masalah tidak dengan berkonflik, karena masih sangat sering terjadi konflik antar warga masyarakat di beberapa daerah akhir-akhir ini, itupun dengan hal-hal sepele atau tidak mendasar.

Revolusi mental berdasarkan sila ketiga adalah bagaimana seluruh element negara baik dari pemerintahan dan masyarakatnya bersama-sama mengamalkan dan mengimplementasikan semangat gotong-royong dalam menjalankan dinamika bernegara.

Revolusi mental berdasarkan sila keempat Pancasila adalah bagaimana segala kebijakan yang terkait dengan nasib rakyat harus diputuskan oleh eksekutif dan legislatif termasuk yudikatif secara arif bijaksana, mengedepankan musyawarah mufakat dan tidak selalu menggunakan voting. Baik, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) ditantang untuk mewujudkan revolusi mental di bidang ini, karena pada dasarnya masyarakat sebenarnya lebih bijak, lebih dewasa dan lebih nyantai dalam melihat sebuah permasalahan dibandingkan para politisi. Diakui atau tidak, rakyat lebih negarawan dan lebih ikhlas dibandingkan mereka.

Revolusi mental berdasarkan sila kelima Pancasila adalah bagaimana mewujudkan keadilan sosial dalam wadah persatuan dan kesatuan NKRI.

Tiga Nilai Revolusi Mental

1. Integritas (jujur, dipercaya, berkarakter, bertanggung jawab)

2. Kerja Keras (etos kerja, daya saing, optimis, inovatif dan produktif)
3. Gotong royong (kerja sama, solidaritas, komunal, berorientasi pada kemaslahatan)

Strategi Internalisasi 3 Nilai Revolusi Mental

1. Jalur birokrasi
Internalisasi 3 nilai revolusi mental pada Kementrian/ Lembaga melalui:
 - a) Pembentukan tugas gugus dan pic
 - b) Tersusunnya program, kegiatan nyata berbasis nilai-nilai revolusi mental.
 - c) Menjadi contoh tauladan (role model)
2. Jalur swasta
 - a) Memperkuat kemitraan antara pengusaha kecil dan pengusaha besar.
 - b) Insektif pengurangan pajak bagi pengusaha Indonesia yang mengembangkan produk lokal inovatif.
 - c) Instruksi presiden kepada pengusaha media untuk berkolaborasi mempromosikan revolusi mental.
 - d) Mengembangkan lembaga keuangan mikro di desa.
 - e) Mendukung inisiatif usaha menengah membuka pasar/sentral yang menjual produk lokal yang inovatif, kreatif dan harga terjangkau.
3. Jalur kelompok masyarakat
Pembudayaan 3 nilai revolusi mental dalam kelompok masyarakat
 - a) Membangun *role model*
 - b) Aspirasi terhadap kelompok masyarakat
 - c) Keteladanan oleh tokoh

4. Jalur pendidikan

- a) Memperkuat kurikulum pendidikan kewarganegaraan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan untuk membangun integrasi, membentuk etos kerja keras dan semangat gotong royong.
- b) Menerapkan ekstra kurikuler revolusi mental di sekolah.
- c) Meningkatkan sarana pendidikan yang merata.
- d) Meningkatkan kompetensi guru dalam mendukung revolusi mental

Kewarganegaraan berasal dari hubungan normatif antara undang-undang dengan warga sebuah negara. Sebaliknya, kerakyatan biasanya berasal dari tempat kelahiran (*ius soli*) atau berasal dari darah keturunan (*ius sanguinis*). Disamping itu, kewarganegaraan dapat diperoleh melalui naturalisasi.

Asas kewarganegaraan yang mula-mula dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan status seseorang apakah termasuk atau tidaknya seseorang tersebut dalam golongan warga negara suatu negara ialah:

1. Asas keturunan, yakni asal-usul darah, geneologis dari bapak/ayahnya atau disebut sebagai *ius sanguinis*, dan
2. Asas tempat kelahiran, yakni dimana asal seseorang tersebut bertempat tinggal dan berdomisili di Negara awal, yang disebut sebagai *ius soli*.

Makna bela Negara sangat berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban warga Negara karena berhubungan dengan mempertahankan tetap tegaknya negara dan tetap

utuhnya bangsa sehingga tujuan mendirikan negara tetap dapat terpelihara, sebagai wujud dari kewajiban warga Negara terhadap unsure-unsur yang ada dalam Negara.

1. Menurut UUD pasal 30 UU No. 20/ 1982: HANKAM
“Bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideology Negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman.”
2. Menurut UUD pasal 31 UU No.2/ 1989: System pendidikan nasional
“Bela Negara dilakukan melalui pendidikan bela Negara, pendidikan dapat dilakukan lewat 2 jalur:
 - a) Formal: sekolah
 - PPBN tingkat dasar (SD-SMA)
 - PPBN tingkat lanjut (Perguruan Tinggi)
 - b) Nonformal, informal (diluar sekolah).
Contoh: Kegiatan PRAMUKA.

Berdasarkan pengertian bela Negara adalah membela kepentingan nasional pada seluruh aspek kehidupan nasional, hal ini memberikan kejelasan bahwa bela Negara tidak hubungan dengan kepentingan militer semata, tetapi kepentingan seluruh bangsa yang konsekuen dengan cita-citanya pada saat ingin mendirikan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk dari bela Negara akan tergantung pula pada jenis ancaman yang dihadapi, kalau ancamannya dalam bentuk fisik tentunya warga negarapun harus menyiapkan diri dalam bentuk kesiapan fisik seperti setelah kemerdekaan, rongrongan pemberontak/separatisme antara tahun 1945-1962 terus terjadi dan upaya Negara luar untuk kembali menjajah Indonesia terus ada, sehingga upaya bela Negara diarahkan pada kesiapan fisik, melalui pendidikan pendahuluan perlawanan rakyat (PPPR) berdasarkan UU No. 29/ 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat.

Namun setelah itu tepatnya dimulai tahun 1973 pemahaman bela Negara lebih diarahkan pada penumbuhan kesadaran, kesadarn, kerelaan berkorban dan kecintaan terhadap tanah air melalui ilmu pengetahuan karena ancaman telah bergeser pada masalah-masalah social, jenis pendidikannya berubah menjadi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- . 2010. Penduduk Indonesia Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota Sensus Penduduk 2010. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Adams, Cindy. (2007). Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jakarta: Yayasan Bung Karno dan Media Pressindo, Terjemahan.
- Adioetomo, Sri Moertiningsih., Samosir, Omas Bulan. 2014. Dasar Dasar Demografi. Salemba Empat. Jakarta.
- Ahmad, Maskur. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Metode Praktis. Palembang.
- AIPI [Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia]. (2010). Rekomendasi Peran Pendidikan dalam Pembangunan Karakter Bangsa. Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Arsyad, Lincolin. 2004. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik (BPS). <http://www.bps.com>
- Badan Pusat Statistik, 1992. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1991, Badan Pusat Statistik, BKKBN, Departement Kesehatan, Maccro Calverton Mary Land, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2011 (b), Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010, BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2000. Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2000. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

- Bagian proyek peningkatan tenaga akademik direktorat jendral pendidikan Tinggi DEPDIKNAS.2002. Kapita selekta pendidikan kewarganegaraan Bag, 1. Jakarta.
- Bagian proyek peningkatan tenaga akademik direktorat jendral pendidikan Tinggi DEPDIKNAS.2002. Kapita Selektta Pendidikan Kewarganegaraan Bag. II. Jakarta.
- Both, Anne & Peter Mclawley. (1983). Ekonomi Orde Baru. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Bretschger, L and T.M. Steger.2004. The Dynamics of Economic Integration: Theory and Policy.WIF: Institute of Economic Research Working Paper 04/32.
- Brubacker, J.S. 1950. *Modern Phylosophis of Education*. Mc Graw Hill. New York.
- Butler & Lewis. 1983. *Transitions : Continuity and Change Over the Life Cycle*. Mc Graw Hill. New York.
- Creswell, John W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Depdiknas RI [Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Pusat Dokumentasi Depdiknas RI.
- Efendi, Tauû q. (2008). *Jati Diri Bangsa Indonesia: Menuju Indonesia Jaya*. Jakarta: Exatama Mediasindo.
- Elmubarok, Z. (2009). *Membumikan Pendidikan Nilai: Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Hasmi, Eddy., Moeliono, Laurike., Panjaitan, Anggita Hotna dan Satriyo, Anastasia. 2013. Masa Depan Indonesia. BKKBN. Jakarta.

Hauser, P.M. 1969. *Population Studies*. Rand McNally. Chicago.

<http://www.kemenkeu.go.id/en/node/46343>

Indriyanto, Bambang. (2014). "Mengkaji Revolusi Mental dalam Konteks Pendidikan" dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol.20, No.4 [Desember].

Kemendiknas RI [Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2003). Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

Khalidi, Fardil. 2014. Business Strategy SDM Indonesia Belum Siap Menghadapi MEA 2015. Jakarta: <http://swa.co.id>

Koesoema, Doni. (2010). Pendidikan Karakter. Roma: FIP UKS [Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Kepausan Salesian], Terjemahan.

Krueger, Richard A. (1988). Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research. California: Sage Publications.

Legge, John D. (1985). Sukarno: Sebuah Biograû Politik. Jakarta: PT Sinar Harapan, Terjemahan.

Lemabaga Ketahanan Nasional. 1998. Kewiraan Untuk Mahasiswa, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Liddle, William. (1992). Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia pada Masa Awal Orde Baru. Jakarta: Graû ti Press, Terjemahan.

- Mantra, Bagoes. 1999. Demografi Umum. Penerbit Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Mendows, DH., Randers, J., dan Behrens, WW. 1972. *The Limits to Growth*. University Books. New York.
- Otto Soemarwoto. 2014. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Panjaitan, Anggita Hotna., Laurike, Moeliono. 2013. Lansia; Siapa Bilang Sia Sia!. BKKBN. Jakarta.
- Parkay et al, 2010. *Curriculum Leadership*. Person. Boston
- Permana, Ida Bagus. 2012. Pembangunan Berwawasan Kependudukan. BKKBN. Jakarta
- Rusli, Said. 2004. Pengantar Ilmu Kependudukan. LP3ES. Jakarta.
- Soerjani, Moch., Ahmad, Rofiq., Munir, Rozy. 2010. Lingkungan : Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Sumarsono S.dkk.2002. Pendidikan kewarganegaraan, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sumirat, Juli. 2011. Kesehatan Lingkungan. UGM Press. Yogyakarta

**RENCANA
PEMBELAJARAN
BUKU AJAR
(RPBA)**

RENCANA PEMBELAJARAN BUKU AJAR (RPBA)

A. IDENTITAS BUKU

Judul Buku : Buku Ajar Pengintergrasian Pendidikan Kependudukan Pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di Perguruan Tinggi
Waktu : 1 (satu) Semester
Semester : Ganjil / Genap
Status Mata Kuliah : Mata Kuliah Wajib Umum

B. DESKRIPSI BUKU

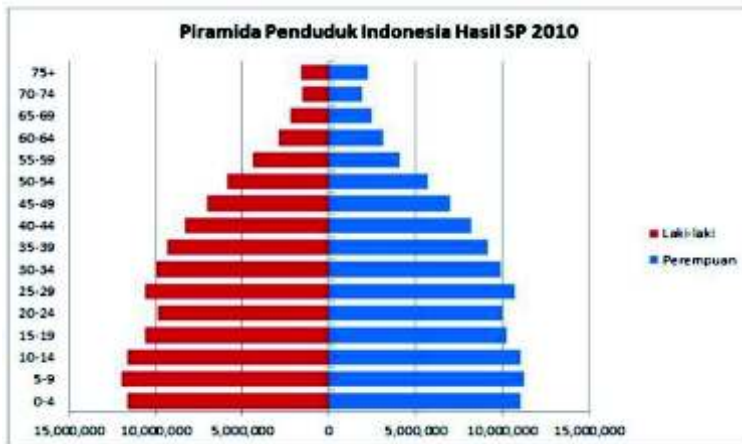
Salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa di Indonesia adalah wawasan dan kecakapan berkenaan dengan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH). Hal ini tidak lain karena PKLH merupakan suatu program kependudukan yang bertujuan untuk membina anak didik untuk memiliki pengetahuan, kesadaran, sikap dan perilaku yang rasional serta bertanggung jawab mengenai pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Secara substansi, PKLH merupakan materi pembelajaran dalam rangka membentuk suatu karakter Warga Negara Indonesia (WNI) yang berwawasan kependudukan dan lingkungan hidup, yaitu yang dalam tingkah laku sosial, ekonomi, politik dan budayanya berpandangan progresif terhadap masalah-masalah kependudukan dan lingkungan

hidup menuju kehidupan keluarga dan masyarakat yang serasi seimbang dalam hubungannya dengan Tuhan, lingkungan sosial dan lingkungan hidupnya.

Dalam usaha Peningkatan kualitas wawasan mengenai Pendidikan Kependudukan maka di susunlah buku ajar yang seiring dengan konteks kependudukan di era global. Melalui Buku Ajar ini diharapkan dapat membentuk warga negara yang memiliki wawasan, sikap, dan perilaku yang mengerti akan masalah kependudukan dalam hal penduduk dan pembangunan, karena peningkatan populasi penduduk memicu kerusakan lingkungan, seperti semakin banyaknya jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat yang menyebabkan banyaknya lahan yang dijadikan pemukiman penduduk. Dimana penebangan hutan untuk memenuhi area pemukiman dan pertanian yang tidak terkendali dapat menyebabkan banjir, erosi bahkan terganggunya habitat tumbuhan dan hewan yang ada disana.

Selain memberikan materi substansial, secara praktis buku ajar ini diorientasikan untuk memberikan wawasan dan kecakapan bagi Mahasiswa dalam materi Kependudukan, karena isu kependudukan menjadi salah satu hal penting yang perlu melibatkan dukungan mahasiswa. Secara global, jumlah remaja (10-24 tahun) sebesar 25 persen atau 1,8 miliar dari penduduk dunia, hasil sensus penduduk tertinggi yaitu pada tahun 2010 menunjukan bahwa secara nasional jumlah remaja mencapai 64 juta atau 27,6 persen dari total penduduk Indonesia. (Arsip Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat tahun 2015)



Gambar 1. Piramida Penduduk Indonesia 2010
(Sumber : BPS tahun 2010)

Besarnya jumlah remaja ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi guna menekan laju pertumbuhan penduduk, karena remajalah yang akan menjadi cikal bakal penerus bangsa. Melalui pengintegrasian pendidikan kependudukan pada mata kuliah wajib umum (MKWU) di perguruan tinggi mahasiswa mendapat pemahaman mengenai materi kependudukan. Maka desain pembelajaran buku ajar ini difokuskan kepada pemahaman terhadap standar isi bahan ajar untuk menghadapi tantangan Indonesia dalam usaha memaksimalkan potensi generasi muda.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bahan ajar ini diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kecakapan tentang kependudukan sebagai bekal menjadi generasi muda yang sadar dan peduli terhadap masalah kependudukan

D. MATERI PERKULIAHAN

Pertemuan Ke	Pokok Bahasan
I	Orientasi Perkuliahan dan Kontrak Belajar Pengantar Perkuliahan: a. Latar belakang, Deskripsi dan tujuan pembelajaran Pendidikan Kependudukan b. Sasaran, Materi dasar, dan metode Pembelajaran Pendidikan Kependudukan
II	Materi 1 Konsep Dasar Kependudukan A. Pendahuluan B. Kelahiran
III	C. Kematian D. Migrasi
IV	E. Umur Harapan Hidup F. Data Kependudukan
V	G. Perkembangan dan Dampak Kependudukan
VI	Materi 2 Masalah Kependudukan A. Pendahuluan B. Dinamika Kependudukan
VII	C. Penduduk Remaja dan Orang Muda D. Bonus Demografi
VIII	Ujian Tahap Pertama
IX	E. Penduduk Lanjut Usia F. Lingkungan Ramah Penduduk
X	Materi 3 Karakter Penduduk Berkebangsaan A. Pendahuluan B. Revolusi Mental

XI	C. Pancasila sebagai Dasar Revolusi Mental D. Pengutamaan Revolusi Mental
XII	E. Kewarganegaraan dan Bela Negara
XIII	Materi 4 Masyarakat Ekonomi ASEAN A. Pendahuluan B. Berdirinya ASEAN
XIV	C. Kesepakatan Kerjasama ASEAN D. Pengertian dan Ruang Lingkup MEA
XV	A. Ciri-ciri dan Unsur MEA B. Langkah Menghadapi MEA
XVI	Ujian Tahap Kedua

E. PENDEKATAN PERKULIAHAN

Pendekatan yang digunakan pada buku ini yaitu pendekatan terpadu (integratif) sedangkan pendekatan di dalam perkuliahan ini yaitu *scientific learning* dengan model pembelajaran *active learning* dengan menerapkan beberapa metode pembelajaran secara bergantian dan bervariasi pada setiap kegiatan pembelajarannya, diantaranya yaitu: ceramah, tanya jawab, diskusi, *active debate*, penugasan, kerja kelompok, dan unjuk kerja.

G. PENILAIAN HASIL BELAJAR

Tercapainya tujuan pendidikan baru dapat diketahui bila telah dilakukan evaluasi terhadap tindakan dan kegiatan pendidikan tersebut. Untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara teoritik dan praktis, dilakukan *middle test*, *final test*, unjuk kerja, dan portofolio.

Dari berbagai tugas dan tes tersebut, kemudian ditentukan nilai akhir hasil belajar. Nilai akhir hasil belajar merupakan penjumlahan dari skor-skor berikut:

Komponen	Skor Maksimal
Kuis	10
Tugas Terstruktur	20
UTS	20
Aktifitas dan Keterampilan Praktik	25
UAS	25
Jumlah:	100

Konversi nilai :

A = 85-100, **B+** = 74–84, **B** = 70–74, **C+** = 65–69, **C** = 60-64,
D = 50–59, **E** = 0–49.

F. TUGAS-TUGAS MAHASISWA

1. Tugas Terstruktur Mandiri dan Kelompok dalam masing-masing pokok bahasan buku ajar pendidikan kependudukan
2. Analisis isi materi masing-masing pokok bahasan buku ajar pendidikan kependudukan

H. BUKU BACAAN

Sumber Pustaka :

Ananta, Aris. 1992. “Penduduk dan Pembangunan Berkelanjutan” dalam *Warta Demografi Tahun XXII Nomor 9. September 1992*. Jakarta : LD-FEUI.

BPS tahun 2010

Joko Tri Prasetyo. 1998. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998

Kastama, Emo.1996. *Pengantar Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH)*. Jakarta : Depdikbud RI.

Mantra, Ida Bagoes, 2000. *Demografi Umum*. Yogyakarta : Putaka Pelajar.

Permendikbud tentang Standar isi;

Salam, Burhanuddin. 1997. *Pengantar Pedagogik (Dasar-Dasar Ilmu Mendidik)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Padang, 2 Juni 2017

Penyusun,

Tim Pusat Penelitian Kependudukan
dan Lingkungan Hidup (PPKLH) UNP



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL